



RANCANGAN

RKPD

**Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR ISI

Status Tanggal 30 Maret 2016

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-8
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-23
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-31
2.2. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu	II-59
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-66
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-4
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016	III-4
3.1.2 Rencana Target Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	III-9
3.2. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-30
3.2.1 Pendapatan daerah	III-31
3.2.2 Belanja Daerah	III-35
3.2.3 Pembiayaan	III-41
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-44
3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-44
3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan	III-44
3.3.1.2 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat	III-46
3.3.1.3 Kerangka Pendanaan Keuangan Daerah	III-47

3.3.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-49
3.3.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-53
3.3.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-56
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN	
4.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-2
4.2	Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019	IV-8
4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan	IV-14
4.4	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2017	IV - 26
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur	II-2
Tabel 2.2	Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014	II-3
Tabel 2.3	Sex Ratio, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2014	II-7
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2014	II-11
Tabel 2.5	Laju Inflasi Menurut Kota Inflasi Kalimantan Timur dan Perbandingan dengan Inflasi Nasional, 2010-2015	II-13
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2014	II-16
Tabel 2.7	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2014	II-18
Tabel 2.8	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2014	II-19
Tabel 2.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2014	II-20
Tabel 2.10	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota (%) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014	II-23
Tabel 2.11	Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2014	II-24
Tabel 2.12	Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014	II-25
Tabel 2.13	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014	II-28
Tabel 2.14	Jumlah Investor PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014	II-29
Tabel 2.15	Jumlah Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014	II-30
Tabel 2.16	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014	II-31

Tabel 2.17	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2014 (2012=100)	II-33
Tabel 2.18	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Subsektor, Tahun 2013-2014 (2012=100)	II-33
Tabel 2.19	Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013	II-34
Tabel 2.20	Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 (Update 2013/2014)	II-35
Tabel 2.21	Jumlah Perusahaan Air Minum dan Kapasitas Produksinya Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012-2014	II-36
Tabel 2.22	Panjang Jalan menurut status dan jenis permukaan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014	II-38
Tabel 2.23	Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2014	II-39
Tabel 2.24	Jumlah Demonstrasi Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014	II-40
Tabel 2.25	Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014	II-43
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2015	II-64
Tabel 2.27	Faktor Penghambat dan Upaya-Upaya untuk Mencapai Target Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur	II-68
Tabel 3.1	Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur	III-10
Tabel 3.2	Statistik PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014	III-12
Tabel 3.3	PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2014 (Jutaan Rp.)	III-15
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (%)	III-16
Tabel 3.5	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kalimantan Timur Tahun 2014 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012 = 100)	III-18

Tabel 3.6	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2013 – Maret 2014	III-20
Tabel 3.7	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Wilayah, Maret 2013 - Maret 2014	III-21
Tabel 3.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2013 -Maret 2014	III-23
Tabel 3.9	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014	III-24
Tabel 3.10	Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (dalam juta rupiah)	III-33
Tabel 3.11	Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (dalam juta rupiah)	III-35
Tabel 3.12	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (dalam juta rupiah)	III-37
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama (dalam juta rupiah)	III-39
Tabel 3.14	Defisit Riil Anggaran (dalam juta rupiah)	III-41
Tabel 3.15	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur (dalam juta rupiah)	III-42
Tabel 3.16	Proyeksi Pendapatan Tahun 2016-2017 Provinsi Kalimantan Timur	III-46
Tabel 3.17	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2016-2017	III-49
Tabel 3.18	Rencana Struktur Belanja Daerah Tahun 2016-2017	III-54
Tabel 3.19	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2016-2017 Provinsi Kalimantan Timur	III-56
Tabel 4.1	Target Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019	IV--13
Tabel 4.2	Sasaran Target Nasional dan Target Provinsi Kalimantan Timur	IV-14
Tabel 4.3	Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	IV-22
Tabel 4.4	Target Peningkatan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	IV-26

Tabel 4.5	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	IV-28
Tabel 4.6	Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	IV-34
Tabel V.1	Daftar Pagu Indikatif Renja SKPD Tahun 2017	V-12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur	I-5
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-8
Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015	II-4
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2014	II-5
Gambar 2.3	Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota (%) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014	II-6
Gambar 2.4	Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014	II-8
Gambar 2.5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)	II-9
Gambar 2.6	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (%)	II-9
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2014	II-10
Gambar 2.8	Nilai Inflasi Year on Year Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Termasuk Kota Tarakan)	II-13
Gambar 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014	II-15
Gambar 2.10	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014	II-17
Gambar 2.11	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014 (Tahun)	II-18
Gambar 2.12	Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2014	II-20
Gambar 2.13	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2014	II-21
Gambar 2.14	Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2014 (%)	II-22
Gambar 2.15	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Provinsi Kalimantan Timur	II-25

Tahun 2010 - 2014

Gambar 2.16	Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2014	II-27
Gambar 2.17	Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita/Bulan (Rp) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2014	II-32
Gambar 2.18	Produksi Tenaga Listrik (MWh) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014	II-37
Gambar 2.19	Persentase Penduduk 10 tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014	II-41
Gambar 2.20	Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014	II-42
Gambar 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adh Berlaku Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2014	III-6
Gambar 3.2	Struktur Ekonomi (%)Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (Tahun Dasar 2010)	III-7
Gambar 3.3	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014	III-8
Gambar 3.4	Grafik Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional Bulan Januari - Desember 2014	III-17
Gambar 4.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	IV-8
Gambar 4.2	Fokus atau Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018	IV-27



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur sudah memasuki *middle period* dimana pelaksanaan RKPD 2015 telah selesai dilaksanakan dan RKPD 2016 mulai diimplementasikan dalam pembangunan daerah. Berbagai hasil pembangunan yang merupakan target pembangunan jangka menengah telah dirasakan oleh masyarakat mulai pemenuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga peningkatan taraf perekonomian makro dan mikro. Oleh karena itu, untuk meneruskan estafet pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018, perlu dirumuskan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pelaksanaan tahun 2017 sebagai salah satu langkah menuju pencapaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018.

Rumusan RKPD 2017 ini memiliki nilai penting dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah mengingat dalam penyusunannya akan memasukkan berbagai kebijakan baru maupun hasil revisi dari dokumen pemerintahan pemerintah baik pusat maupun provinsi. Dengan terpilihnya presiden baru yakni Ir. Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan atmosfir yang cukup berbeda pada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah disusun dan ditetapkan pada periode sebelum pelaksanaan pemilihan presiden. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur memiliki periode pelaksanaan tahun 2013 hingga 2018 sehingga dengan adanya Ir. Joko Widodo sebagai presiden baru (kebijakan pembangunan nasional baru melalui NAWACITA) maka pola dan rumusan pembangunan jangka menengah daerah mengalami perubahan maupun penajaman.

Perubahan berbagai kebijakan tersebut otomatis akan menyebabkan beberapa penyesuaian baik sasaran pembangunan, arah kebijakan, hingga program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk mencapai target pembangunan nasional melalui kebijakan-kebijakan baru. Oleh karena itu, pada penyusunan RKPD 2017 ini akan



mengintegrasikan berbagai dokumen revisi pembangunan daerah terutama revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen pembangunan nasional baru sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan utamanya dalam pengintegrasian dengan program prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Visi, Misi dan Agenda Prioritas Nawa Cita di bawah kepemimpinan presiden Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan (utamanya kebijakan daerah) sangat ditentukan oleh evaluasi dan monitoring sebagai bagian dari pembelajaran dari kekurangan pembangunan maupun optimalisasi dari kelebihan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem Penyelenggaraan Negara. Sehingga Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Pembangunan daerah pada tahun 2017 ini memiliki prioritas dalam perwujudan perekonomian yang berkualitas dan optimal. Hal ini terlihat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki fokus/tema pembangunan di tahun 2017 yakni, "Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas". Tema ini merupakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2017 yang mengindikasikan sebuah harapan untuk meningkatkan nilai tambah produksi unggulan daerah agar memiliki daya saing dan daya beli. Prioritas pembangunan pada tahun



2017 sudah mengimplementasikan dimensi pembangunan sektor unggulan pada strategi pembangunan nasional dan juga secara langsung sinkron dengan agenda prioritas nasional yakni “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pelaksanaannya memiliki satu tahun periode pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Dalam RKPD juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana evaluasi ini akan digunakan sebagai pijakan untuk merumuskan berbagai kebijakan lanjutan agar dapat lebih baik dan optimal pelaksanaannya.

RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahapan tahunannya. Dengan demikian, penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Dalam pelaksanaan RKPD 2017, perlu memperhatikan prinsip-prinsip:

1. Berlandaskan pada kearifan lokal;
2. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian daerah;
3. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; dan
4. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Sebagai penjabaran dari



pelaksanaan RPJMD tahun keempat, maka RKPD tahun 2017 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2017 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2017. Selain itu, RKPD tahun 2017 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu evaluasi pembangunan Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Dalam penyusunan RKPD perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan daerah jangka menengah maupun rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut:

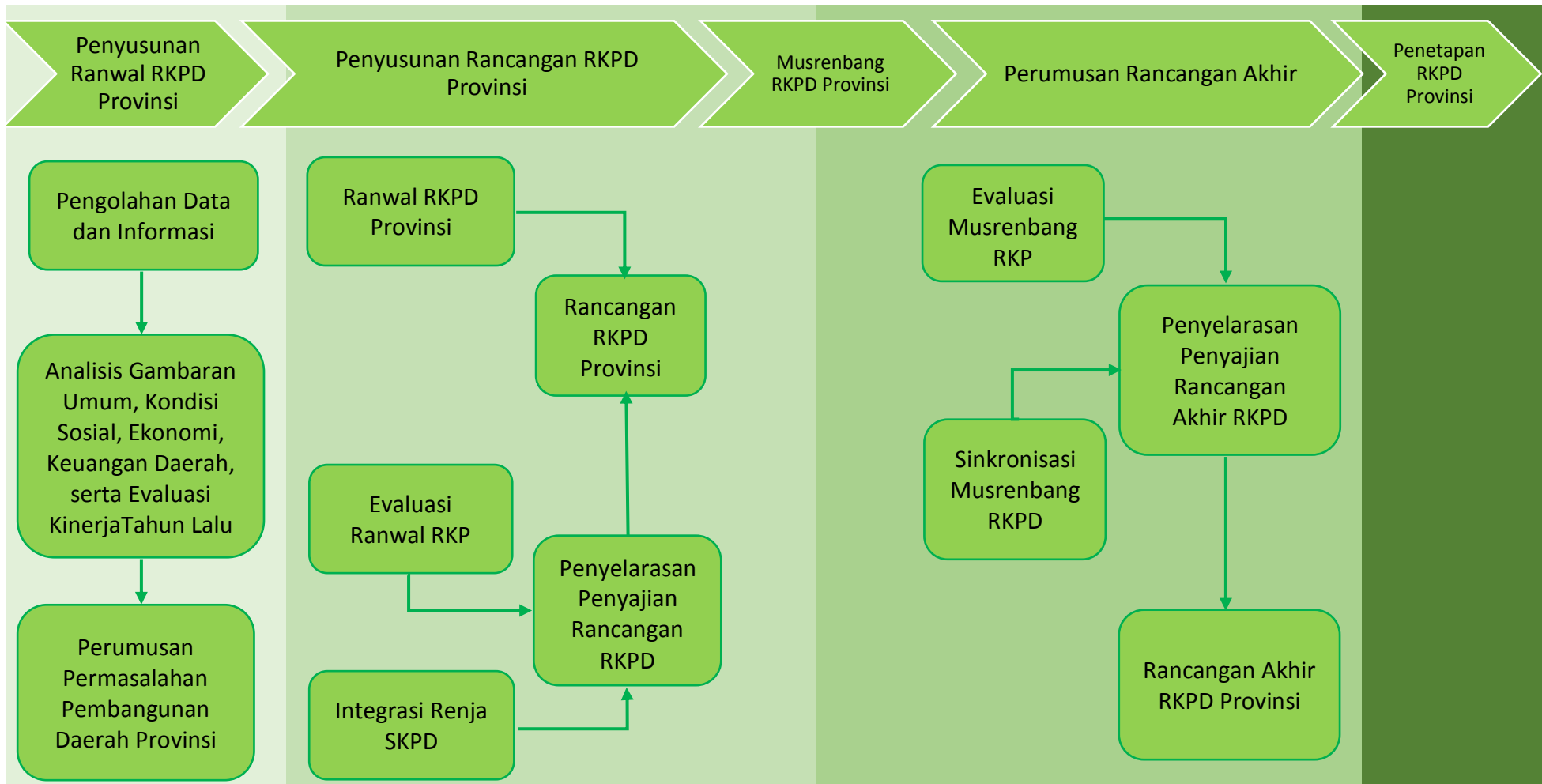
- 1) Persiapan Penyusunan RKPD;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 6) Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Keenam tahapan tersebut di atas digambarkan pada bagan sederhana seperti gambar

1.1.



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur





1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 memiliki landasan hukum yang dalam bentuk Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); serta
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
3. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; serta
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 66);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2017 untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Tahun 2017, yaitu:

- a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dengan Rencana Kerja



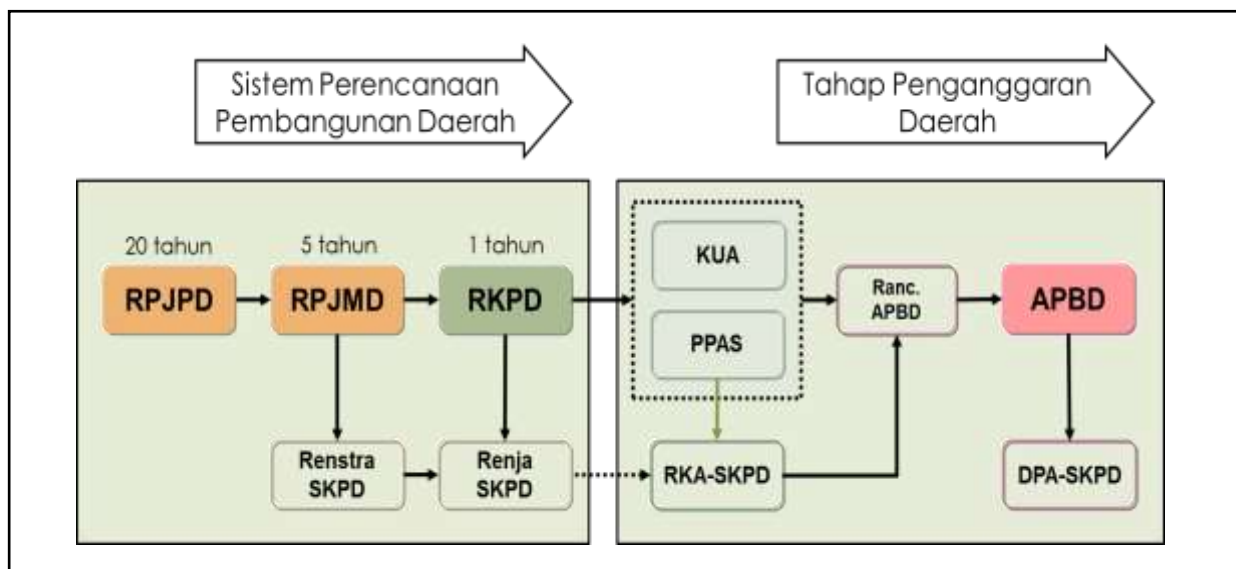
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;

- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017;
- c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Operasionalisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun keempat (Tahun 2017).

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa:



1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintah; memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.

BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah; memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah).

BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; mengemukakan pernyataan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja



yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. Penutup; mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian timur yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam melimpah. Keanekaragaman sumber daya alam terutama mineral tersebut menjadikan kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap perkembangan perekonomian nasional diperhitungkan hingga saat ini. Selain itu, wilayahnya yang luas dan berkembang menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kesempatan dalam menggali potensi menuju daya saing daerah maupun nasional. Meskipun begitu, pengelolaan yang terstruktur dan bijaksana terutama dalam penggalian potensi sumber daya alam tak terbarukan menjadi fokus utama dalam menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan yang merupakan isu strategis internasional dalam menghadapi *global warming*.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah karena letak geografisnya di wilayah tropis. Begitu pula Provinsi Kalimantan Timur, provinsi yang terletak di perbatasan wilayah tengah dan timur Indonesia ini memiliki beranekaragam sumber daya hayati yang tumbuh dalam bentangan alam yang luas. Selain itu, wilayahnya yang berbatasan darat dengan Negara Malaysia menjadi ciri khas tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola administrasi kewilayahan maupun kependudukannya.

Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai lebih dari segi geografis dibandingkan dengan provinsi lain termasuk perhatian dari pemerintah pusat. Selain itu, letak geografis Provinsi



Kalimantan Timur berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia melalui Selat Makasar dan Selat Lombok yang memiliki potensi strategis sebagai pendukung perekonomian wilayah. Hal tersebut dikarenakan ALKI berperan dalam memperlancar transportasi kapal-kapal dagang (baik dalam maupun luar negeri) yang melintasi wilayah kepulauan Indonesia.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki daratan cukup luas di Negara Indonesia. Luas wilayah yang mencapai **12.734.692** ha yang terdiri dari daratan seluas **12.638.893** ha dan perairan darat seluas **95.799** ha, menjadikan Provinsi Kalimantan Timur lebih memiliki peluang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sedangkan dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten yaitu Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota yaitu Balikpapan, Bontang, dan Samarinda.

Adapun pembagian wilayah administratif pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1. Paser	1.109.696	10	144
2. Kutai Barat	1.370.992	16	194
3. Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5. Kutai Timur	3.105.171	18	135
6. Berau	2.173.519	13	110
7. Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8. Balikpapan	51.225	6	34
9. Samarinda	71.653	10	59



Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
10. Bontang	16.314	3	15
Provinsi Kalimantan Timur	12.734.692	103	1.032

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2015

Posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 33' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Dari sisi klimatologi, Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pengukuran iklim melalui tiga stasiun bandara yakni di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Berikut statistik klimatologi yang terangkum dalam tabel di bawah ini.

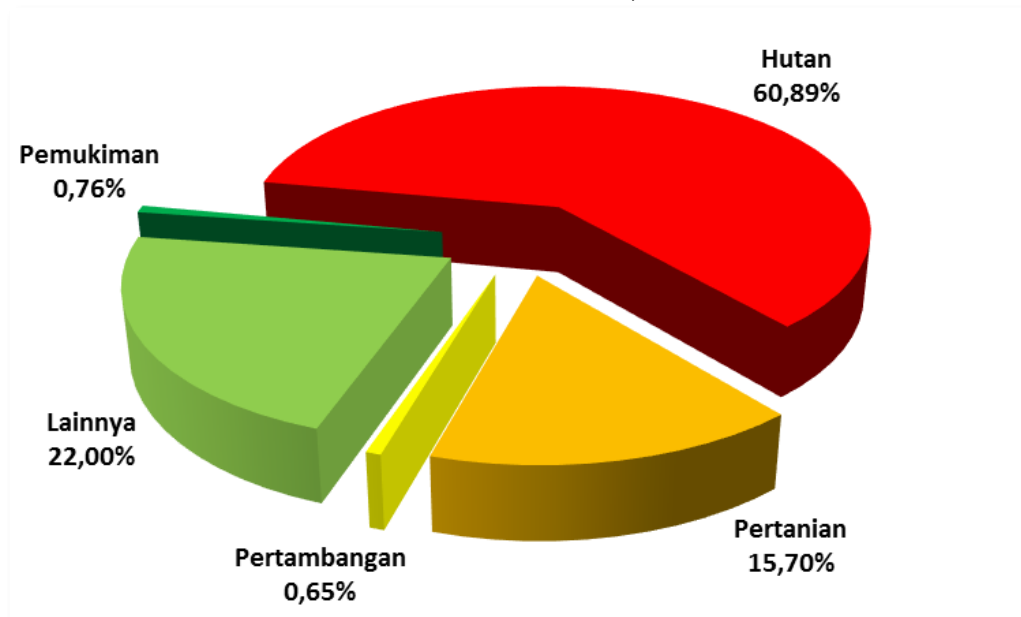
Tabel 2.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	22,20	22,30	22
	- Maksimum	35,20	33,80	34,40
2	Kelembaban (%)	82	84	82
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.012,9	1.011,7	1.010,9
4	Kecepatan Angin (Knot)	4	4	4
5	Curah Hujan (mm)	344,80	511,40	196,80
6	Penyinaran Matahari (%)	46,8	52,5	50,8

Sumber: BMKG Wilayah Kaltim

Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh lahan hutan dengan luas total 7.749.498 ha atau seluas 60,89 persen dari luas total luas daratan Kalimantan Timur. Lahan hutan yang dimaksud terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, hutan mangrove primer, dan hutan mangrove sekunder. Sedangkan luas lahan pertanian mencapai 15,70 persen yang terdiri dari pertanian, perkebunan, perikanan darat, maupun lahan sawah. Selain itu, pemukiman penduduk hanya menempati wilayah Kalimantan Timur sebesar 0,76 persen dan pertambangan sebagai salah satu kontribusi terbesar perekonomian Kalimantan Timur hanya menggunakan lahan sebesar 0,65 persen.

Gambar 2. 1
Persentase Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka, 2015

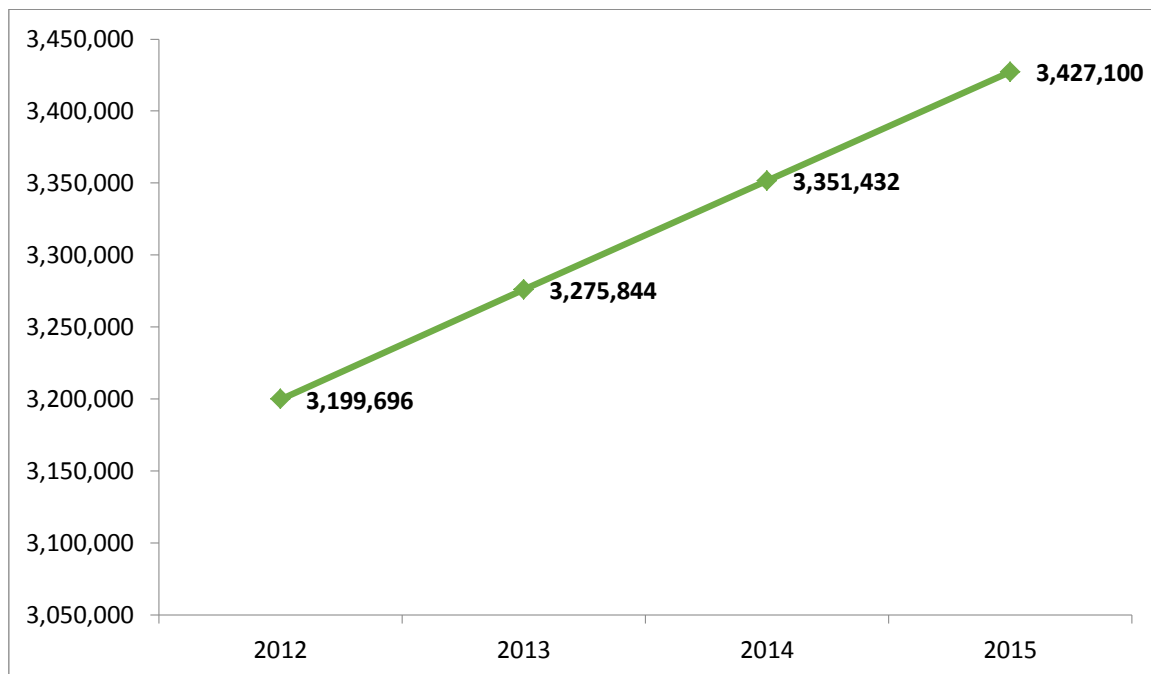
2.1.2 Aspek Demografi

Penduduk Kalimantan Timur terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penambahan penduduk ini terjadi karena dua faktor yakni pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Secara statistik, banyak cara dalam menentukan jumlah penduduk suatu wilayah baik melalui estimasi survei, registrasi penduduk, proyeksi penduduk.



Dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan ini, jumlah penduduk didekati dengan menggunakan proyeksi penduduk yang dilakukan penyesuaian kembali melalui *back casting* Susenas oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Pada penghitungan jumlah penduduk didapatkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3.427.100 jiwa dimana angka ini meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hampir mencapai 3,28 juta jiwa pada tahun 2013 mencapai 3,35 jiwa pada tahun 2014.

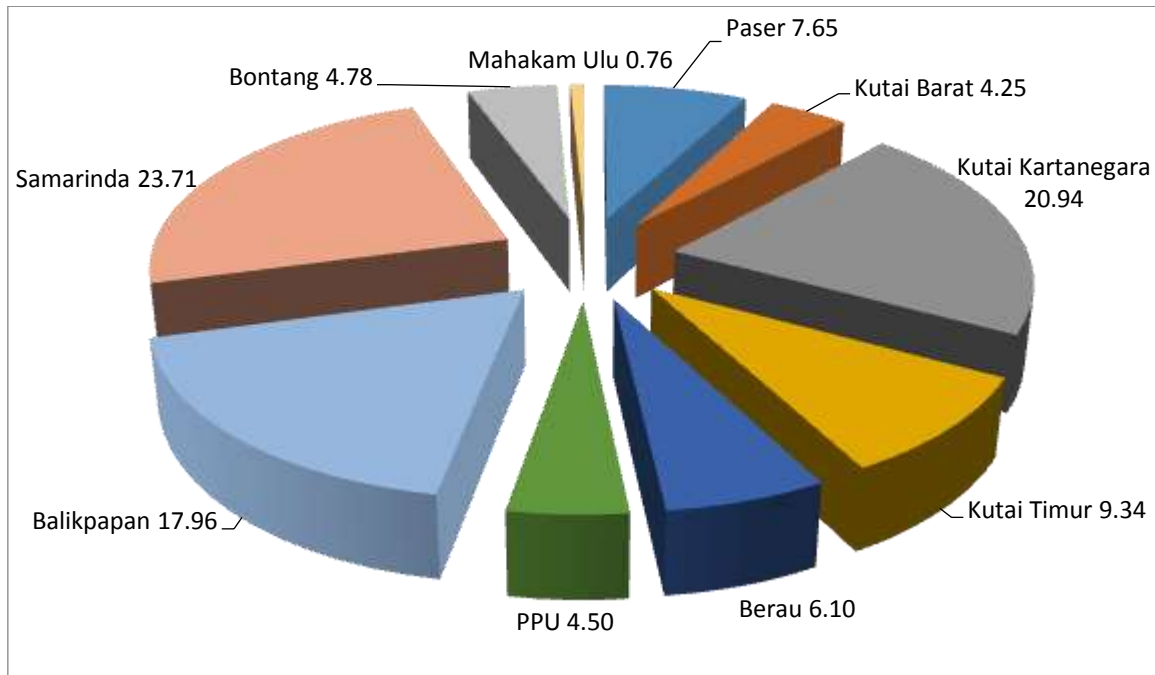
Gambar 2. 2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2015

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan baik jumlah penduduk maupun kepadatan penduduk antar kabupaten/kota. Ketimpangan sangat terlihat pada wilayah kota yang secara total hanya memiliki luas wilayah 1,09 persen namun dihuni oleh 46,45 persen penduduk, sedangkan 53,55 persen penduduk mendiami 98,91 persen luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang notabene merupakan wilayah administrasi kabupaten.

Gambar 2.3
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota (%)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015



Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda yaitu sebesar 23,71 persen karena Kota Samarinda menjadi pusat pemerintahan sekaligus jasa perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur, diikuti Kabupaten Kutai Kartanegara dengan persentase penduduk sebesar 20,94 persen dan Kota Balikpapan sebesar 17,96 persen. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang kurang dari 5 persen terdapat di Kota Bontang (4,78%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,50%) , Kutai Barat (4,25%) dan yang paling sedikit jumlahnya adalah Kabupaten Mahakam Hulu yang bahkan tidak mencapai 1 persen (0,76%).

Pada indikator kependudukan yang lain, penduduk Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki dimana *sex ratio* mencapai 110,34 dimana mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 110-111 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.



Tabel 2.3
Sex Ratio, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2015

No.	Kab/Kota	Sex ratio	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Paser	113,08	23,64	2,48
2	Kutai Barat	111,92	10,63	0,66
3	Kutai Kartanegara	110,68	27,62	2,58
4	Kutai Timur	118,50	10,31	4,41
5	Berau	116,25	9,61	2,95
6	Penajam Paser Utara	109,51	52,74	1,38
7	Balikpapan	106,85	1.201,76	1,85
8	Samarinda	107,03	1.134,08	1,8
9	Bontang	110,54	1.004,05	2,5
10	Mahakam Ulu	114,88	1,34	0,67
Provinsi Kalimantan Timur		110,34	26,91	2,31

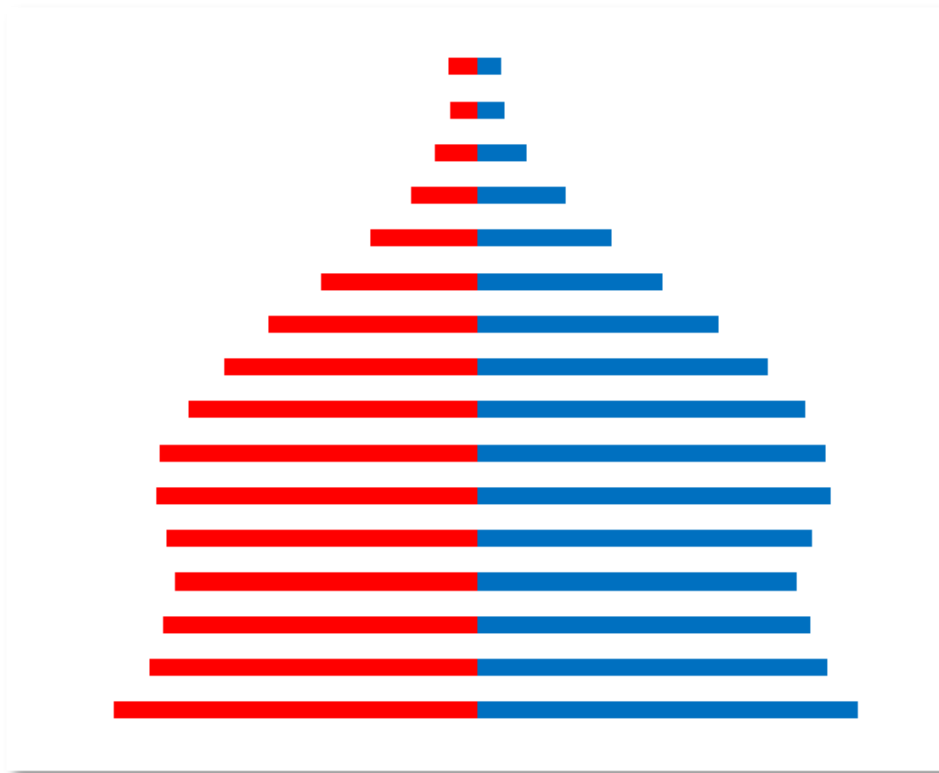
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2015

Kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 hanya sebesar **26,91** jiwa/km² yang mengindikasikan bahwa luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak sebanding dengan penduduk yang tinggal di dalamnya. Analisis singkat dari kepadatan penduduk tersebut yakni setiap 26-27 jiwa penduduk menempati 1 km² wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Distribusi penduduk yang tidak merata semakin memperkeruh perkembangan daerah utamanya kabupaten yang memiliki daerah pelosok karena kurang memiliki potensi sumber daya manusia untuk mengolah daerah tersebut.

Jika dilihat dari piramida penduduk di bawah ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk usia muda memiliki jumlah yang cukup besar dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur periode ini dan akan menjadi potensi yang menunjang bagi pembangunan jika diberdayakan dengan optimal. Begitu pula dengan masyarakat usia produktif yang mendominasi jumlah penduduk sehingga potensi mereka jika dimaksimalkan akan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah.



Gambar 2. 4
Piramida Penduduk
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2015

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

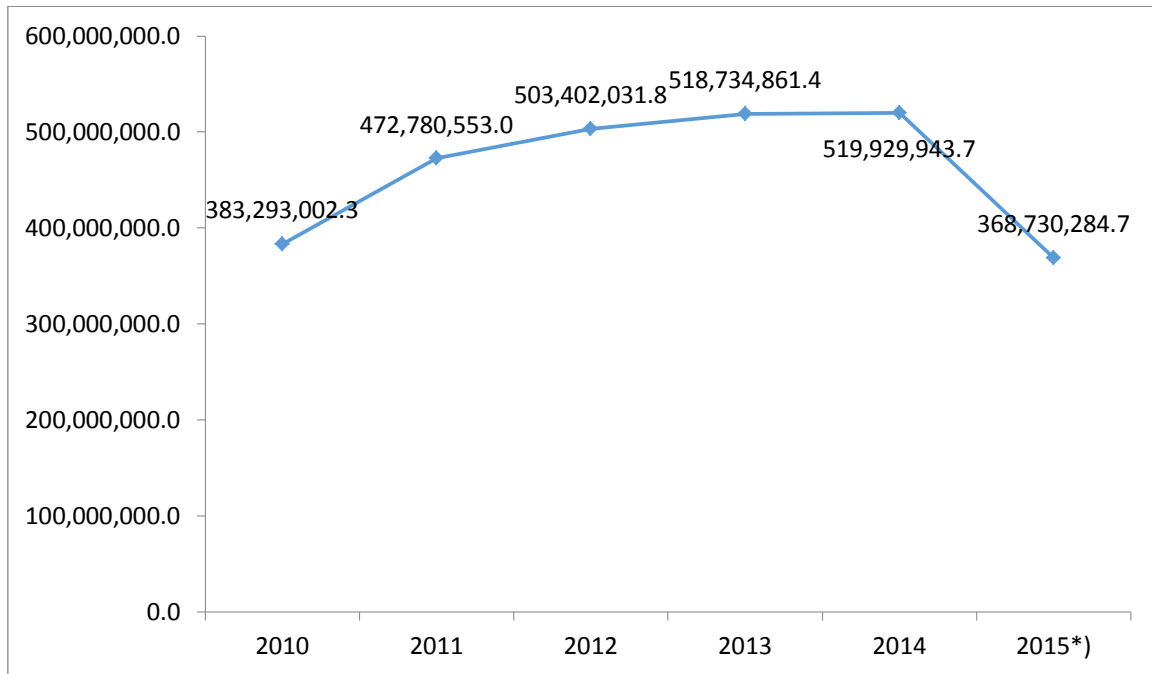
2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun hingga mencapai angka 518.734.861,4 juta rupiah atau hampir mencapai 518,73 triliun rupiah pada tahun 2014 dan mencapai 519,93 triliun rupiah pada tahun 2014 sedangkan Tahun 2015 sampai dengan Triwulan III mencapai 368,73 triliun. Nilai PDRB tahun terakhir ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 383,29 triliun rupiah dimana kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun berikutnya yakni 2011 dengan nilai PDRB mencapai 472,78 triliun rupiah.

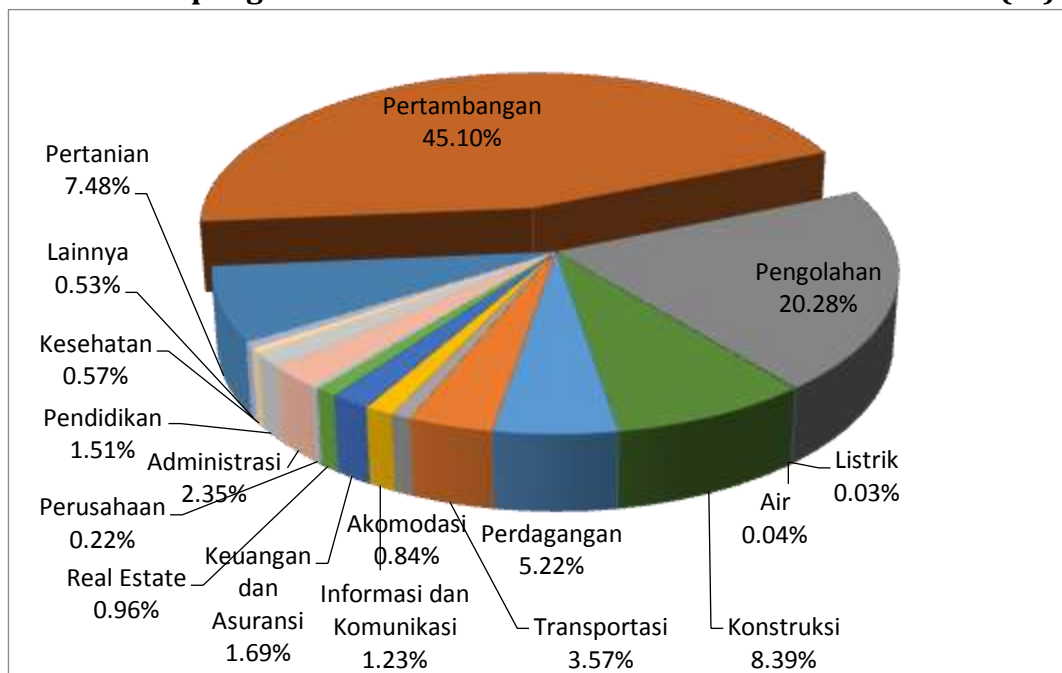


Gambar 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)



Ket : Tahun 2015 sampai dengan Triwulan III
Sumber: BPS Prov Kalimantan Timur

Gambar 2.6
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (%)

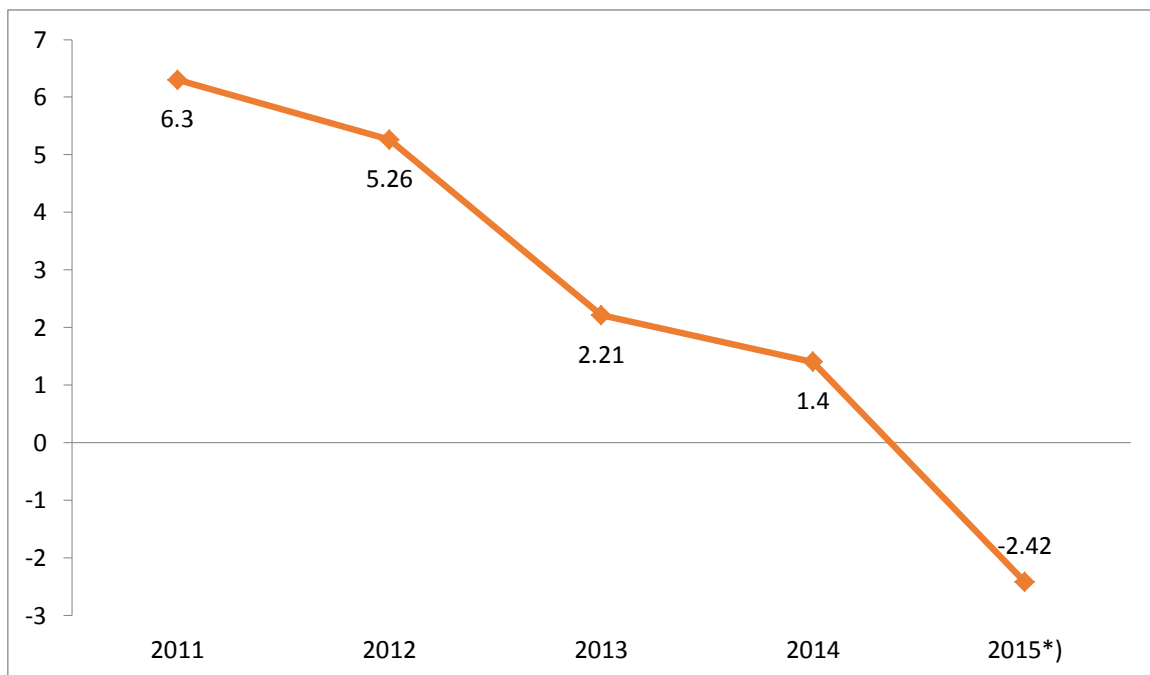


Sumber: BPS Prov Kalimantan Timur



Pembentukan nilai PDRB atas Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 sampai dengan Triwulan III masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian meskipun mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 45,10 persen terhadap PDRB total. Sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yakni mencapai 20,28 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014. Untuk kontribusi sektor pertanian sebagai salah satu komoditas yang akan dijadikan sektor unggulan oleh pemerintah provinsi, pada tahun 2015 ini mencapai 7,48 persen. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai memberdayakan sektor-sektor yang berfokus pada sumber daya alam terbarui mengingat sektor pertambangan dan penggalian semakin menurun produksinya.

Gambar 2. 7
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2015



Ket : *) data sampai dengan Triwulan III

Sumber: BPS Prov Kaltim

Besarnya PDRB Kalimantan Timur dapat menggambarkan positifnya kondisi perekonomian Kalimantan Timur secara umum, namun belum dapat memberikan informasi tingkat kesejahteraan masyarakat secara mikro. Meskipun nilai PDRB selalu meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi di Provinsi Kalimantan Timur terjadi



perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mencapai 6,3 persen dan menurun sedikit pada tahun berikutnya 5,26 persen. Namun pada dua tahun terakhir yakni tahun 2013 dan 2014, pertumbuhan ekonomi melambat dengan drastis dimana pada tahun 2013 hanya mencapai 2,21 persen dan melambat kembali pada tahun berikutnya menjadi sebesar 1,4 persen.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2015

Kategori		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,31	7,62	5,92	4,41	2,20
B	Pertambangan dan Penggalian	10,64	8,01	1,73	-0,69	-4,94
C	Industri Pengolahan	-3,77	-3,49	-1,53	0,28	-4,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,62	13,27	3,64	17,14	46,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,42	2,63	6,26	4,55	2,12
F	Konstruksi	4,75	6,21	4,91	5,95	1,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,4	5,59	2,99	4,27	2,81
H	Transportasi dan Pergudangan	9,91	7,25	7,7	8,35	3,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,21	9,68	3,46	4,96	5,01
J	Informasi dan Komunikasi	8,84	12,1	9,11	9,65	8,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,83	12,46	14,46	2,6	2,13
L	Real Estat	5,48	8,27	8,23	8,15	4,26
M,N	Jasa Perusahaan	14,35	8,54	8,22	10,31	-4,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,65	1,89	3,13	9,47	9,40
P	Jasa Pendidikan	23,03	19,09	18,74	15,78	15,86



Kategori		2011	2012	2013	2014	2015
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,02	10,43	5,12	9,74	14,73
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,24	3,66	2,72	6,78	8,05
Total		6,3	5,26	2,21	1,4	-2,42

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2015

Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dipicu dengan terjadinya pertumbuhan negatif pada sektor pertambangan dan penggalan serta industri pengolahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan akibat dua kategori tersebut memberi dampak yang sangat signifikan mengingat kedua kategori tersebut memiliki andil yang cukup tinggi pada struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

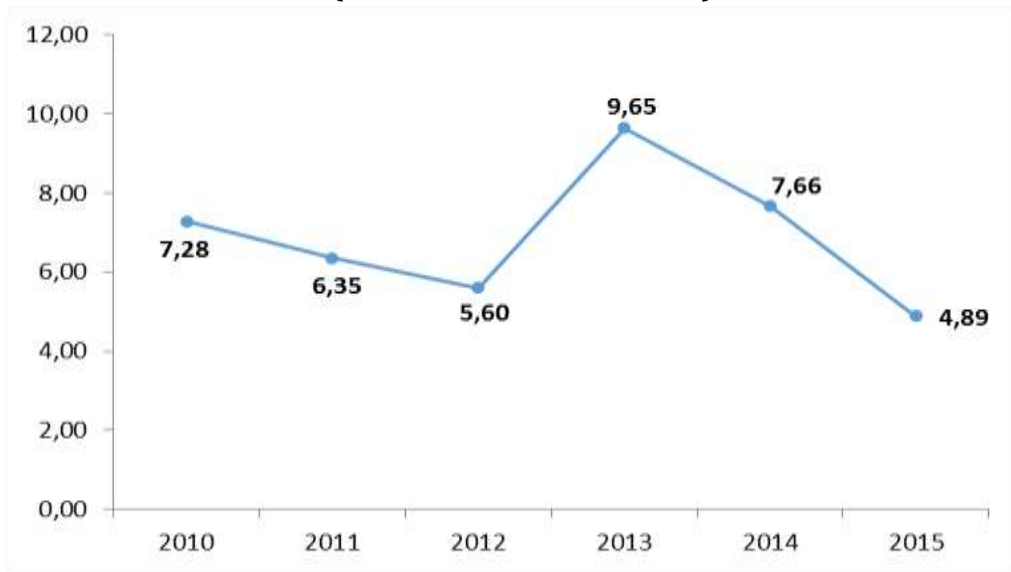
2) Laju Inflasi

Terjadinya gejolak harga akan menyebabkan stabilitas ekonomi masyarakat terganggu dan rentan menjadi masalah sosial-ekonomi terutama kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok untuk meredam terjadinya gejolak harga tersebut. Untuk mengetahui seberapa tinggi fluktuasi harga pasar yang terjadi di suatu wilayah, pemerintah daerah dapat menggunakan angka laju inflasi sebagai potret real terjadinya fluktuasi harga yang terjadi di tengah masyarakat dalam periode bulanan hingga tahunan.

Provinsi Kalimantan Timur melakukan penghitungan inflasi dibangun dari 3 kota IHK yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Tarakan. Selama tahun 2010-2012, inflasi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi stabil yang berarti stabilitas harga terjaga dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Kalimantan Timur tidak bergejolak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2013, terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan hingga mencapai 9,65 pada inflasi tahunannya meskipun pada tahun selanjutnya menurun kembali hingga mencapai angka 7,66 persen pada tahun 2014 dan menurun kembali pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,89 persen.



Gambar 2.8
Nilai Inflasi Year on Year Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015
(Termasuk Kota Tarakan)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Kondisi laju inflasi yang semakin menurun ini perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk mengetahui penyebabnya apakah karena kelesuan perekonomian sehingga daya beli masyarakat menurun atau karena semakin meningkatnya pemerataan dan arus komoditas barang kebutuhan pokok. Analisa lanjutan ini menjadi penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dari permasalahan perekonomian global yang melanda pada hampir seluruh wilayah nasional bahkan dunia internasional.

Tabel 2.5
Laju Inflasi Menurut Kota Inflasi Kalimantan Timur
dan Perbandingan dengan Inflasi Nasional, 2010-2015

Tahun	Samarinda	Balikpapan	Tarakan	Kalimantan Timur	Nasional
2010	7,00	7,38	7,92	7,28	6,96
2011	6,26	6,44	6,43	6,35	3,79
2012	4,81	6,41	5,99	5,60	3,73
2013	10,37	8,56	10,35	9,65	8,38
2014	6,74	7,43	11,91	7,66	8,36
2015	4,24	6,26	3,42	4,89	3,35

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015



2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

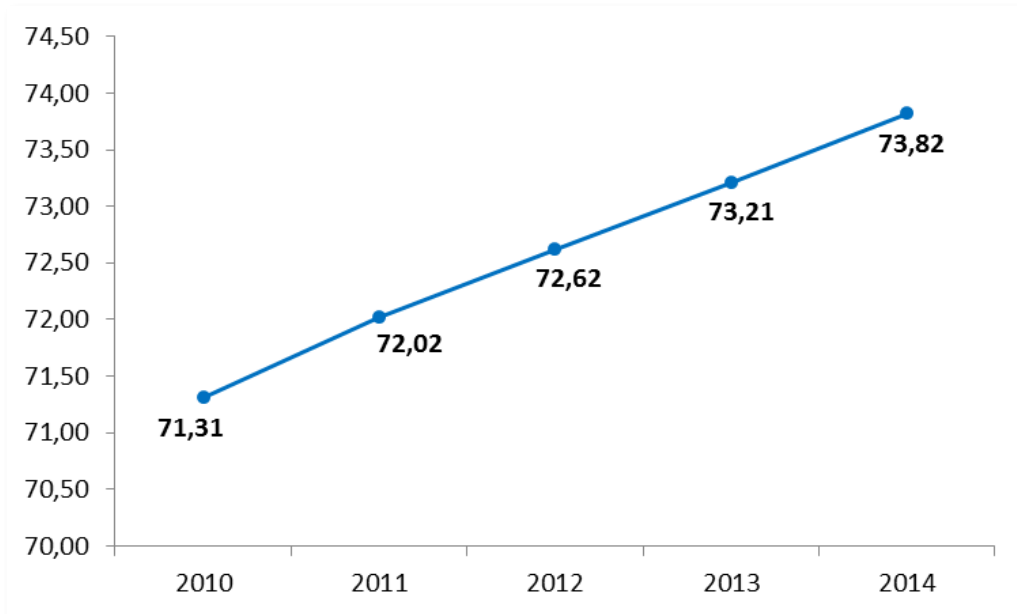
Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta seni budaya dan olahraga. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu juga terdapat variabel angka kemiskinan yang merupakan suatu gambaran dasar kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar 2. 9
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2015

Indeks pembangunan manusia dihitung untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia dengan melakukan analisis perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. IPM sendiri dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, IPM Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk kategori tinggi yang mencapai 73,31 dan sudah di atas rata-rata nasional bahkan peringkat 3 se-Indonesia. Di tahun-tahun berikutnya, IPM terus mengalami kenaikan hingga terakhir tahun 2014 angka IPM Provinsi Kalimantan Timur mencapai 73,82 dan menduduki peringkat 3 level nasional. Peningkatan angka IPM yang konsisten di tiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan masing-masing komponen penyusunnya yang akan terdeskripsikan di bagian berikutnya.



Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010 - 2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1. Paser	66,54	67,11	68,18	69,61	69,87
2. Kutai Barat	65,90	66,92	67,14	68,13	68,91
3. Kutai Kartanegara	67,45	68,47	69,12	70,71	71,20
4. Kutai Timur	66,94	67,73	68,71	69,79	70,39
5. Berau	69,16	70,43	70,77	72,02	72,26
6. PPU	66,37	66,92	67,17	68,07	68,60
7. Mahakam Ulu				63,81	64,32
8. Balikpapan	75,55	76,02	76,56	77,53	77,93
9. Samarinda	75,85	77,05	77,34	77,84	78,39
10. Bontang	76,97	77,25	77,55	78,34	78,58
Provinsi Kalimantan Timur	71,31	72,02	72,62	73,21	73,82

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2015

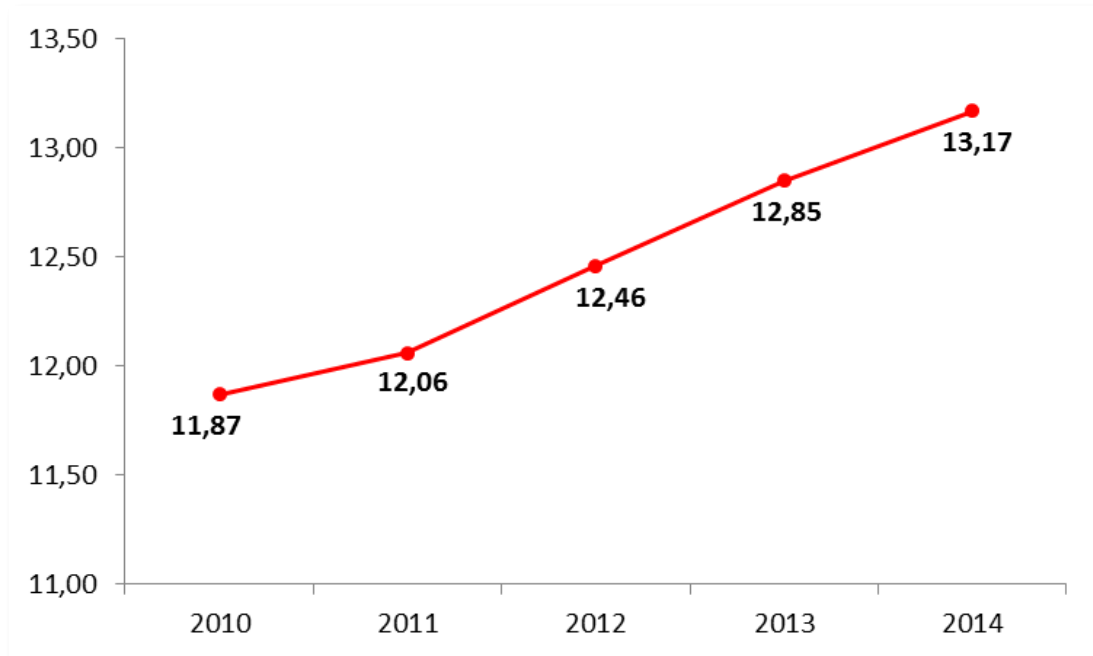
2) Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata- Rata Lama Sekolah

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berkecakupan, serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier.

Beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial adalah indikator di bidang pendidikan. Faktor pendidikan merupakan kunci peningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berujung pada kesejahteraan masyarakat karena tingginya pendidikan masyarakat akan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Timur. Terkait dengan IPM, indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.



Gambar 2. 10
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014



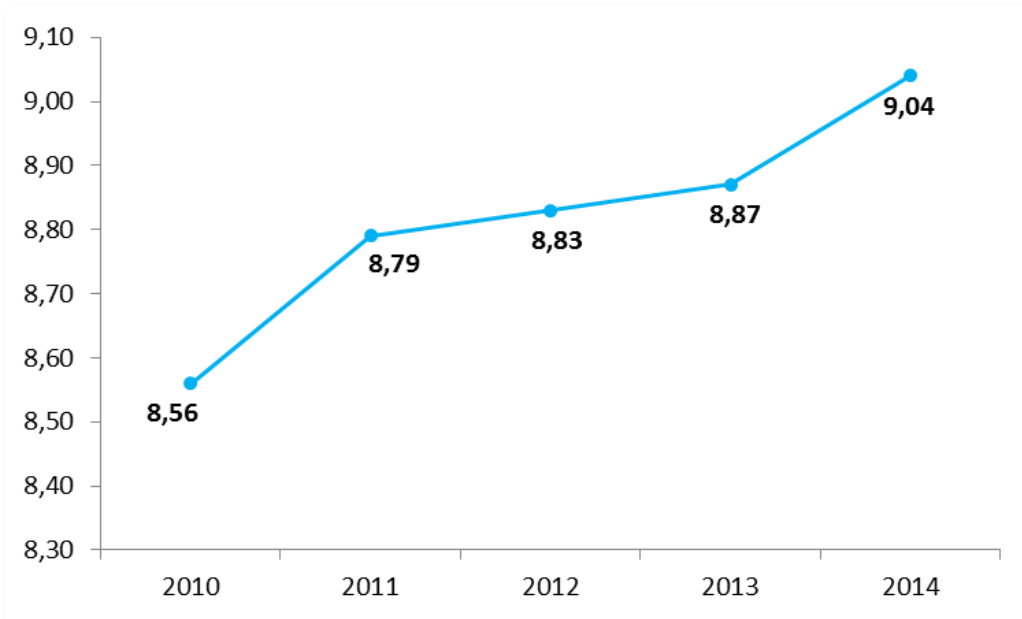
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2015

Terlihat dengan jelas bahwa *progress* bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Trend yang meningkat di tiap tahunnya mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan. Hal ini akan lebih maksimal jika selain dalam segi kuantitas pendidikan juga diimbangi dari segi kualitas pendidikan sehingga output dari pendidikan bisa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Baik pada Angka Harapan Lama Sekolah maupun Rata-rata Lama Sekolah, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dimana pada tahun 2014 penduduk Provinsi Kalimantan Timur memiliki harapan mengenyam pendidikan hingga 13,17 tahun atau dapat mencapai pendidikan hingga perguruan tinggi semester ketiga. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kalimantan Timur usia 15 tahun ke atas adalah selama 9,04 tahun atau sudah mencapai pendidikan jenjang SMA tahun pertama.



Gambar 2. 11
Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014 (Tahun)



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2015

Tabel 2.7
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota (Tahun)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1. Paser	10,91	11,13	11,88	12,52	12,63
2. Kutai Barat	11,01	11,54	11,57	11,58	12,14
3. Kutai Kartanegara	11,59	11,79	12,11	12,96	13,24
4. Kutai Timur	11,01	11,30	11,59	12,12	12,42
5. Berau	11,36	12,02	12,06	12,86	12,96
6. PPU	11,26	11,32	11,39	11,45	11,69
7. Mahakam Ulu	-	-	-	11,82	11,87
8. Balikpapan	12,07	12,27	12,47	13,15	13,43
9. Samarinda	13,07	13,52	13,64	13,76	14,16
10. Bontang	11,80	11,94	12,12	12,50	12,68
Provinsi Kalimantan Timur	11,87	12,06	12,46	12,85	13,17

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2015



Tabel 2.8
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota (Tahun)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1. Paser	7,48	7,60	7,78	7,96	7,99
2. Kutai Barat	7,26	7,46	7,53	7,89	7,98
3. Kutai Kartanegara	7,68	8,13	8,35	8,41	8,46
4. Kutai Timur	7,92	8,12	8,39	8,56	8,60
5. Berau	7,91	8,25	8,34	8,52	8,53
6. PPU	6,87	7,07	7,09	7,30	7,46
7. Mahakam Ulu	-	-	-	6,86	7,15
8. Balikpapan	10,02	10,16	10,29	10,39	10,41
9. Samarinda	9,42	9,97	10,00	10,20	10,26
10. Bontang	10,21	10,22	10,28	10,34	10,35
Provinsi Kalimantan Timur	8,56	8,79	8,83	8,87	9,04

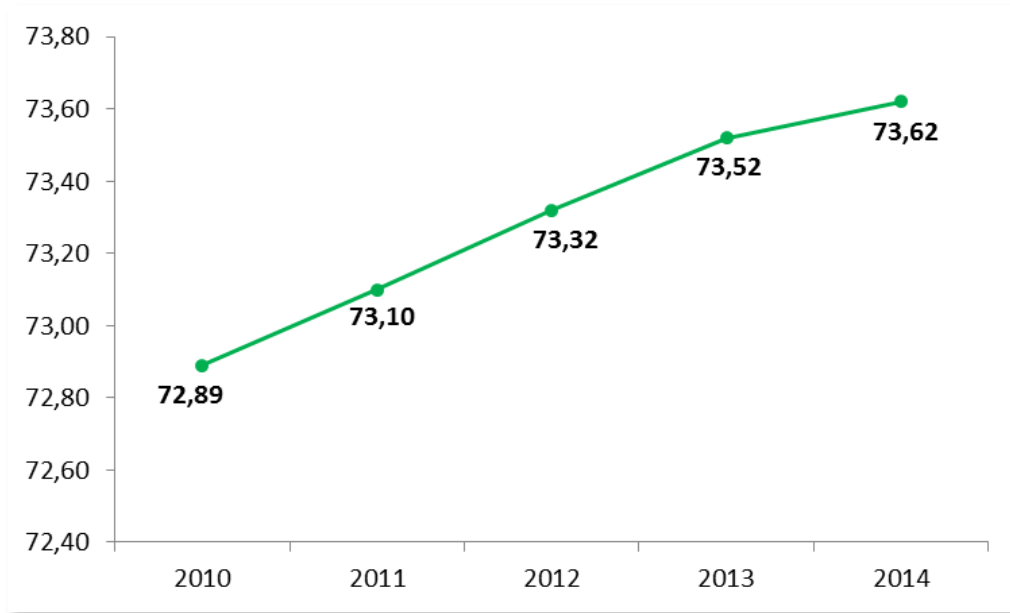
Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2015

3) Angka Harapan Hidup

Salah satu komponen penting pembentuk IPM dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah Angka Harapan Hidup yang merupakan indikator di bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan peluang bayi baru lahir akan mencapai usia harapan hidup tertentu. Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun semakin meningkat dimana pada tahun 2010, angka harapan hidup di Kalimantan Timur sebesar 72,89 tahun dan pada tahun 2014 meningkat hingga mencapai angka 73,62 tahun yang berarti bayi baru lahir pada tahun 2014 akan memiliki peluang hidup hingga usia 73-74 tahun.



Gambar 2. 12
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2015

Tabel 2.9
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota (Tahun)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1. Paser	71,80	71,83	71,85	71,86	71,88
2. Kutai Barat	71,74	71,82	71,90	71,96	72,03
3. Kutai Kartanegara	71,41	71,44	71,46	71,48	71,50
4. Kutai Timur	72,08	72,16	72,23	72,30	72,37
5. Berau	70,99	71,05	71,10	71,15	71,21
6. PPU	70,28	70,34	70,40	70,43	70,48
7. Mahakam Ulu	70,83	70,91	70,98	71,05	71,12
8. Balikpapan	73,90	73,91	73,92	73,93	73,94
9. Samarinda	73,49	73,53	73,56	73,59	73,63
10. Bontang	73,63	73,65	73,66	73,67	73,68
Provinsi Kalimantan Timur	72,89	73,10	73,32	73,52	73,62

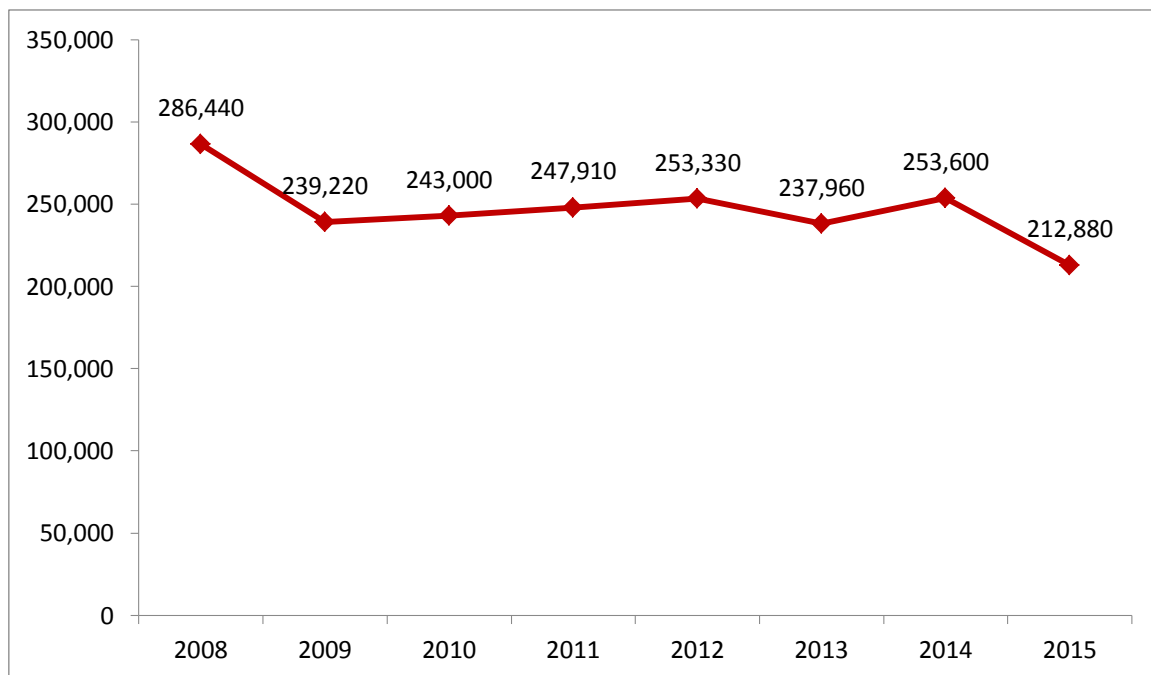
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2015



4) Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana pada tahun terakhir yakni 2015, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 212.880 jiwa. Fluktuatifnya jumlah penduduk miskin selain disebabkan karena peningkatan garis kemiskinan sebagai batasan kategori miskin, juga karena banyaknya penduduk yang pengeluaran per kapitanya mendekati garis kemiskinan sehingga beberapa kondisi dalam kehidupan masyarakat dapat memberikan pengaruh pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Kondisi tersebut terutama difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti inflasi, kenaikan harga BBM, hingga kebijakan-kebijakan mikro seperti program perlindungan social.

Gambar 2. 13
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

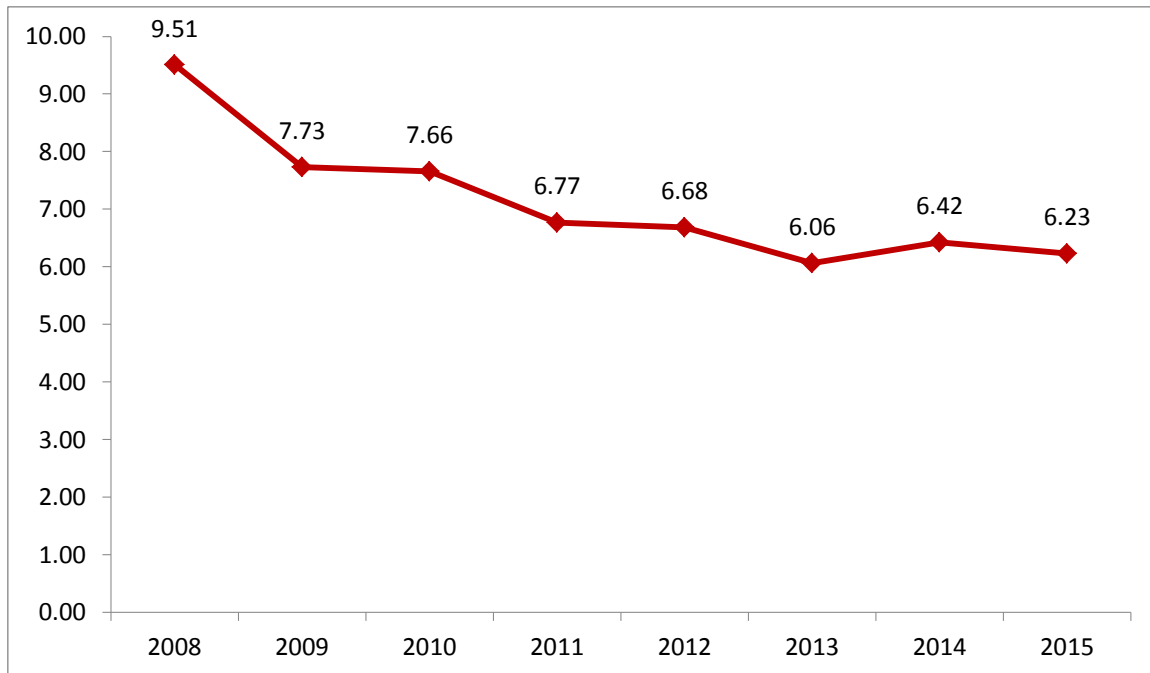
*) Data Prov.Kaltim termasuk Kaltara (Kondisi Bulan Maret)

Jika dilihat dari angka kemiskinan, secara umum terjadi penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 mencapai titik terendah kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 6,06 persen. Namun pada tahun



2014 (kondisi maret) terjadi kenaikan angka kemiskinan hingga mencapai angka 6,42 persen dan kembali menurun pada tahun 2015 yakni sebesar 6,23 persen.

Gambar 2. 14
Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

*) Data Prov.Kaltim termasuk Kaltara (Kondisi Bulan Maret)

Jika dilihat angka kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, secara absolut kemiskinan paling banyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 52,5 ribu jiwa dan diikuti oleh Kota Samarinda yang mencapai 36,7 ribu jiwa. Sedangkan yang paling sedikit memiliki penduduk miskin adalah Kota Bontang yang hanya sebanyak 8,2 ribu penduduk miskin yang tinggal. Namun jika dilihat berdasarkan persentase/angka kemiskinannya yang dibandingkan dengan total penduduk, maka angka kemiskinan paling besar adalah Kabupaten Kutai Timur (9,1%) dan Kabupaten Paser (7,87%).



Tabel 2.10
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota (%)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin (Jiwa)	Angka Kemiskinan (%)
1. Paser	348.444	20.340	7,87
2. Kutai Barat	385.008	12.920	7,53
3. Mahakam Ulu			
4. Kutai Kartanegara	371.791	52.530	7,43
5. Kutai Timur	408.224	28.300	9,10
6. Berau	404.665	9.770	4,76
7. Penajam Pasir Utara	341.499	11.580	7,56
8. Balikpapan	460.297	15.020	2,46
9. Samarinda	493.763	36.650	4,56
10. Bontang	454.392	8.210	5,10

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015 (September)

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Pendidikan

Salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan menganalisis Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur di setiap jenjang usia sekolah terus mengalami trend kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat.



Tabel 2.11
Angka Partisipasi Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2014

Angka Partisipasi Sekolah				
Usia Sekolah	2011	2012	2013	2014
7-12	98,68	99,17	99,46	99,33
13-15	92,78	96,53	96,62	97,99
16-18	67,60	71,16	73,10	80,32
Angka Partisipasi Kasar				
Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014
SD	104,83	107,76	107,57	111,04
SLTP	97,62	93,24	91,06	91,49
SLTA	73,00	80,08	82,21	85,54
Angka Partisipasi Murni				
Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014
SD	92,23	94,37	95,91	96,7
SLTP	72,40	74,37	76,10	78,73
SLTA	54,58	59,75	62,22	67,03

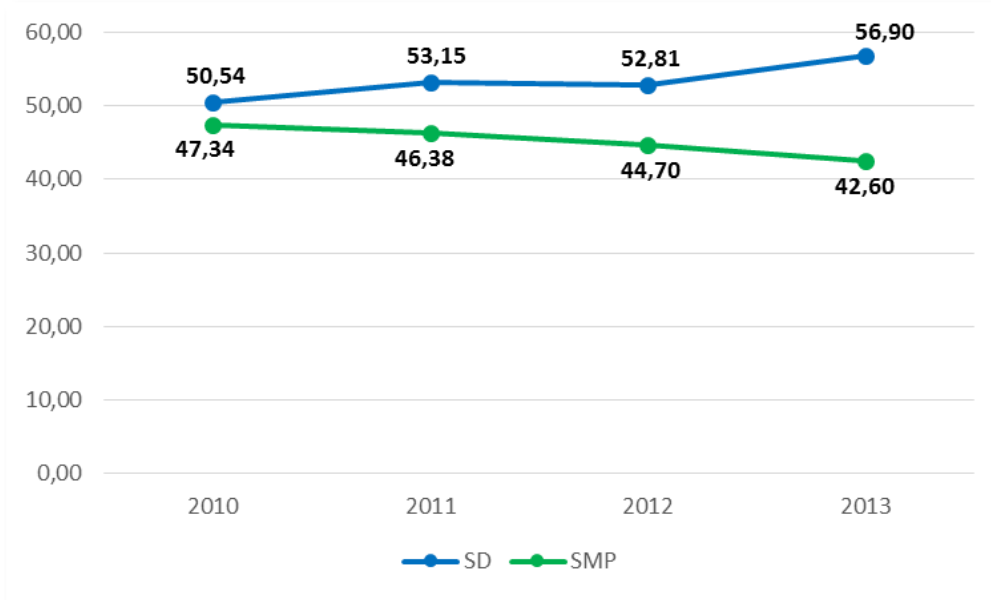
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2015

a) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini menggambarkan tingkat ketersediaan sekolah per jumlah penduduk usia sekolah. Capaian ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah sekolah. Pada jenjang SD/MI meningkat dari 50,54 pada tahun 2010 menjadi 75 pada tahun 2013 yang berarti terdapat sebanyak 75 gedung sekolah SD/MI yang tersedia untuk 10.000 penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs meningkat dari 47,34 pada tahun 2009 menjadi 62 pada tahun 2013 yang berarti terdapat sebanyak 62 gedung sekolah SMP/MTs yang tersedia untuk 10.000 penduduk usia sekolah 13-15 tahun.



Gambar 2. 15
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2013



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, 2013

b) Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah

Rasio Murid-Guru ini menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 2.12
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.649	363.096	22.036	16,48	220,19
Swasta	180	46.808	2.934	15,95	260,04



Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
MI	115	19.085	1.548	12,33	165,96
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	400	119.882	7.683	15,60	299,71
Swasta	181	28.229	2.513	11,23	155,96
MTs	145	23.859	2.478	9,63	164,54
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	131	48.484	3.476	13,95	370,11
Swasta	78	8.681	1.176	7,38	111,29
MA	58	7.053	1.055	6,69	121,60
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	78	33.606	2.734	12,29	430,85
Swasta	130	27.103	2.680	10,11	208,48

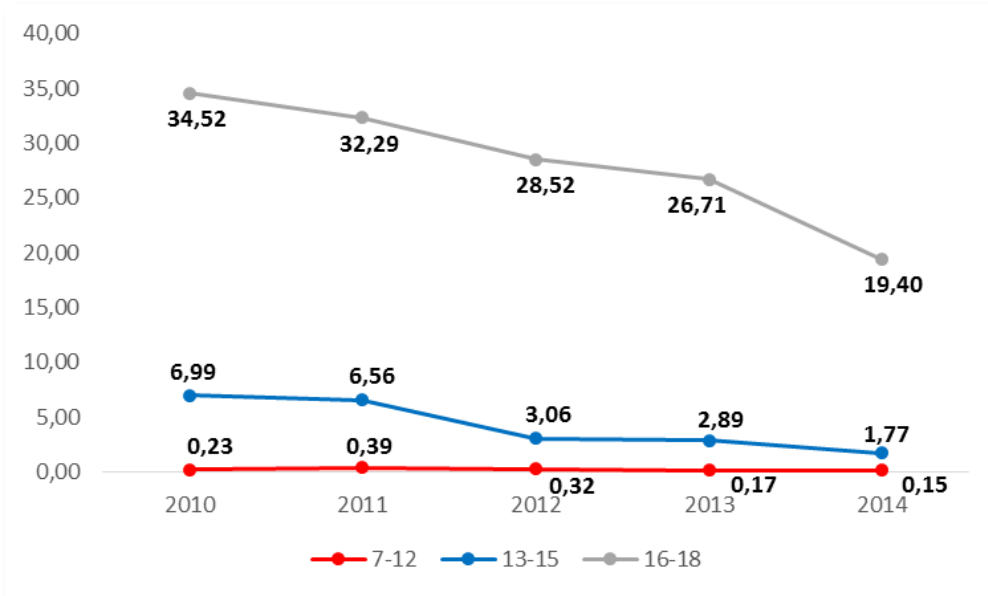
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

c) Angka Putus Sekolah

Secara umum angka putus sekolah di semua usia pendidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan angka putus sekolah paling signifikan adalah angka putus sekolah pada penduduk usia sekolah 16-18 tahun (usia SMA) dimana pada tahun 2010 mencapai 34,52 persen dan menurun tajam menjadi 19,40 persen pada tahun 2014. Sedangkan secara umum, angka putus sekolah paling sedikit berada pada jenjang usia sekolah SD (7-12 tahun) yang hanya sebesar 0,15 persen saja pada tahun 2014.



Gambar 2. 16
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2014



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

2) Kesehatan

Jumlah tenaga medis dan paramedis selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perkembangan cukup signifikan bila dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain. Peningkatan jumlah dokter, tenaga medis maupun paramedis akan berdampak kepada pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan berobat maupun konsultasi kesehatan. Secara umum, hal ini terlihat dari rasio antara dokter dan penduduk yang semakin lama semakin menurun dimana pada tahun 2014 rasio menurun hingga mencapai 2.074 penduduk per dokternya.

Peningkatan indikator kesehatan tidak hanya terjadi dalam hal peningkatan tenaga medis dan paramedis saja, masyarakat yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan terlatih juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, persentase penduduk yang mendapat pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 88,76 persen meskipun pada tahun sebelumnya sempat mencapai 90,83 persen.

Jika melihat peningkatan mutu dan pelayanan di bidang kesehatan secara keseluruhan, tidak salah jika indikator kesehatan masyarakat seperti angka usia



harapan hidup meningkat dari 72,89 pada tahun 2010 menjadi 73,62 pada tahun 2014. Dari segi kesehatan masyarakat, keluhan kesehatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan hingga mencapai 22,33 persen pada tahun 2013.

Tabel 2.13
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Dokter Umum	665	673	794	1.007	908	1.050
2.	Dokter Spesialis	281	215	276	569	359	347
3.	Dokter Gigi	213	276	262	290	269	335
4.	Perawat	1.551	1.627	1.627	3.791	3.027	
5.	Penyebaran HIV Aids	217	413	473	-		
6.	Rasio Penduduk : Dokter	2.365	2.632	2.702	2.273	2.074	
7.	Rasio Bidan	-	-	45,09	-		
8.	Angka Morbiditas (%)	16,88	11,74	12,19	-		
9.	Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	87,35	88,5	90,83	92,02	92,9	
10.	Penduduk dengan pengobatan sendiri	71,95	65,47	70,39	-		
11.	Penduduk dengan Keluhan Kesehatan	28,88	30,31	22,46	22,33	21,22	
12.	Angka Kematian Bayi	27,40	16,70	-	-	21	
13.	Angka Kematian Balita	-	32,00	-	-		
14.	Angka Kematian Ibu	110,00	101,00	-	-	177	
15.	Usia Harapan Hidup	72,89	73,10	73,32	73,52	73,62	
16.	Persentase Gizi Balita (Gizi Baik)	93,23	-	-	-		

Sumber: Data dan Informasi Pembangunan Kalimantan Timur (dan BPS diolah)



2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Jumlah investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah investor merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga mengembangkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian. Perkembangan jumlah investor PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.14
Jumlah Investor PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2015

Tahun	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	15	76	91
2011	78	53	131
2012	36	124	160
2013	236	313	549
2014	48	54	102
2015	124	36	160

Sumber: *BPMPTSP Kalimantan Timur, 2015*

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis nilai PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut.



Tabel 2.15
Jumlah Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2015

PMDN				
Tahun	Persetujuan (Juta Rp)		Realisasi (Juta Rp)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	15	163.812,38	48	7.881.289,78
2011	78	71.229.379,88	56	16.196.330,39
2012	36	9.007.225,70	44	7.709.270,00
2013	236	34.110.240,30	103	18.441.377,30
2014	48	41.671.586,67	60	12.983.049,70
2015	124	23.935.504,40	143	9.611.313,10
PMA				
Tahun	Persetujuan (US \$ 000)		Realisasi (US \$ 000)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2010	76	44.848.379,58	56	988.710,14
2011	53	12.876.750,92	172	1.348.060,81
2012	124	5.771.255,50	167	2.529.900,00
2013	313	7.000.052,40	331	1.324.197,42
2014	24	3.146.114,70	297	2.145.665,10
2015	36	5.396.492,70	420	2.381.442,30

Sumber: *BPMPTSP Kalimantan Timur, 2015*

3. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap akan melihat bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur



maupun migran). Selanjutnya rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi baik PMDN maupun PMA di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011-2015

PMDN						
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	12.227	50.240	31.905	9.505	24.825
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	47	38	92	60	143
3	Rasio daya serap tenaga kerja	260,15	1.322,11	346,79	158,42	173,6
PMA						
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	9.001	35.579	65.706	27.055	66.230
2	Jumlah proyek seluruh PMA	135	152	331	297	420
3	Rasio daya serap tenaga kerja	66,67	234,07	198,51	91,09	157,69

Sumber: *BPMPSTSP Kalimantan Timur, 2015*

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

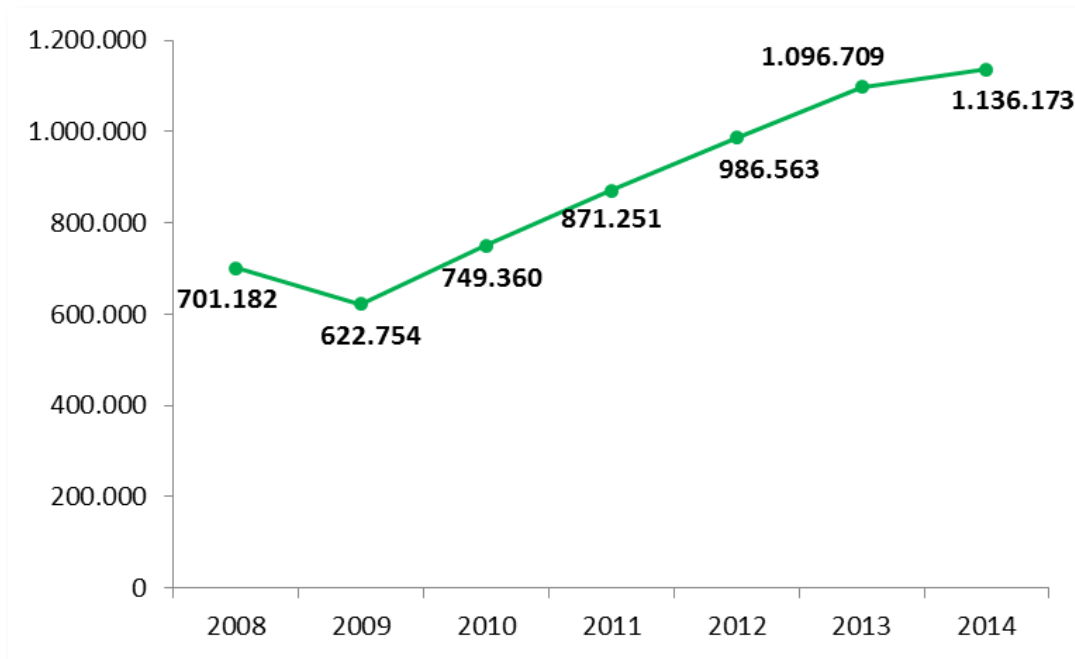
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Rata-rata pengeluaran per kapita meningkat selama empat tahun terakhir hingga pada tahun 2014 mencapai angka Rp. 1.136.173,-. Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan maka pada tahun 2014, rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita



(55,22%) lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan (44,78%). Bergesernya fokus konsumsi penduduk dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan, mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sudah lebih baik karena pengeluaran konsumsi sudah mulai memasuki barang sekunder dan tersier.

Gambar 2. 17
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita/Bulan (Rp)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2014



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

2. Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi pertaniannya. NTP akan memperlihatkan kemampuan daya beli petani di wilayah pedesaan sehingga perekonomian petani dapat dianalisis terkait kesejahteraannya. NTP di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tiga tahun terakhir bergerak fluktuatif dan sulit diprediksi. Jika dilihat berdasarkan nilai tukar per sub sektornya, terdapat kenaikan pada NTP sektor tanaman pangan dan perikanan. Sedangkan terjadi penurunan pada subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan.



Nilai Tukar Petani subsektor tertinggi adalah pada peternakan dimana mencapai 104,02, namun pada subsektor ini mengalami penurunan NTP yang sangat signifikan dibandingkan subsektor lainnya yakni sebesar 9,33 persen. Sedangkan NTP yang mengalami peningkatan tertinggi adalah NTP pada subsektor perikanan yang mencapai 14,03 persen kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.17
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2012-2015 (2012=100)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	129,43	130,69	111,58	117,26
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	132,02	137,14	111,66	120,5
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,04	95,30	99,93	97,31

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2015

Tabel 2.18
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Subsektor, Tahun 2013-2014 (2012=100)

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NTP Gabungan		95,30	99,93	4,86
1	Tanaman Pangan	86,90	96,41	10,95
2	Hortikultura	101,55	96,65	-4,82
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	104,45	102,24	-2,11
4	Peternakan	114,72	104,02	-9,33
5	Perikanan	88,98	101,46	14,03



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2015

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel 2.19
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	385.993	467.532	535.643	588.003	627.372
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	749.360	871.251	986.563	1.096.709	1.136.173
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	51,51	53,66	54,29	53,62	55,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

2.1.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Luas wilayah produktif

Permasalahan legalisasi perencanaan pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten/Kota, dan Peraturan Zonasi belum mencapai sebuah kesepakatan. Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke



masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)
terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 (Update 2013/2014)

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
Jumlah		2.234.602	3.982.325	56,11

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2013

2. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, jaringan irigasi, serta perumahan.



Penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok penduduk Kalimantan Timur seperti listrik dan air bersih masih belum maksimal dalam pencapaian pembangunannya. Hal ini terutama dilihat dari sisi pemerataan fasilitas air bersih dan listrik dimana daerah-daerah tertentu belum merasakan fasilitas infrastruktur dasar tersebut. Meskipun begitu, dari waktu ke waktu pemerintah terus mengupayakan pengembangan fasilitas air bersih dan listrik dimana terlihat kapasitas produksi efektif yang terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 6.751 liter/detik pada tahun 2014.

Tabel 2.21
Jumlah Perusahaan Air Minum dan Kapasitas Produksinya
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012-2014

No	Uraian	2012	2013	2014
1	Jumlah Perusahaan Air Minum (Unit)	14	14	14
2	Kapasitas Produksi Potensial (lt/dtk)	6.549	7.083	7.264
3	Kapasitas Produksi Potensial (lt/dtk)	5.710	5.980	6.751

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2015

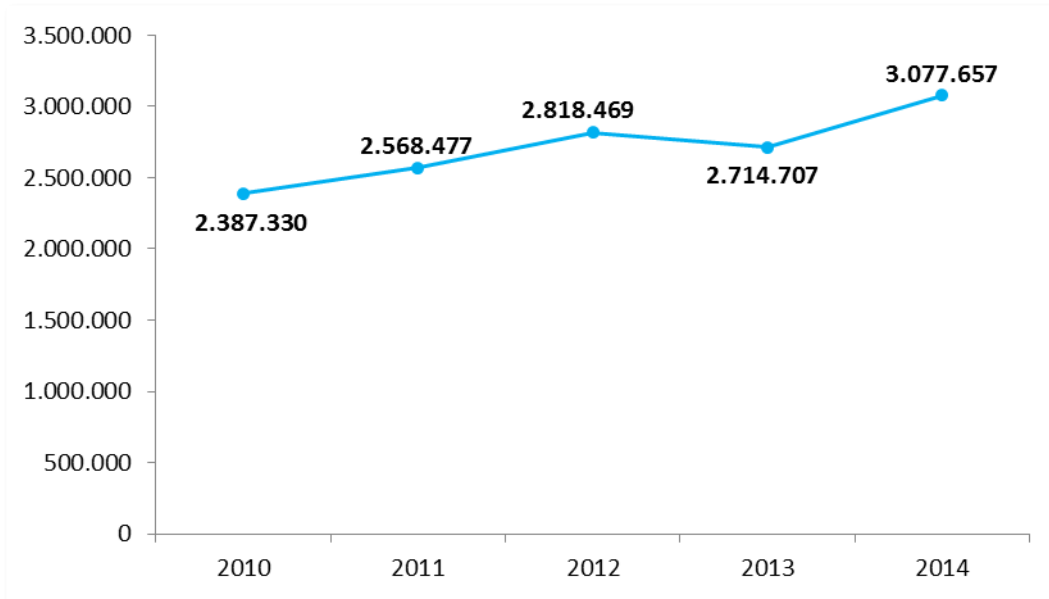
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Air Baku, peningkatan produktifitas pertanian dan pengendalian daya rusak air, pemerintah sedang membangun prasarana sumber daya air meliputi pembangunan Bendungan Marangkayu dan Muara Bangun dengan kapasitas mencapai 12 juta m² (output 250 lt/dt) serta pembangunan jaringan irigasi baru sepanjang 23.278 Meter.

Sedangkan pada fasilitas listrik, pengembangan bidang kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif tiap tahunnya namun memiliki tren meningkat secara umum. Hal ini terlihat pada peningkatan produksi tenaga listrik yang mencapai 3.077.657 MWh pada tahun 2014. Meskipun sebagian besar pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Timur adalah rumahtangga (694.681 pelanggan rumahtangga), namun secara distribusi persebarannya masih memusat pada wilayah perkotaan



sedangkan untuk daerah pelosok/terpencil belum merasakan akses listrik yang memadai.

Gambar 2. 18
Produksi Tenaga Listrik (MWh)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Infrastruktur pembangunan pada bidang perhubungan darat dapat terlihat dari konektivitas jalan lintas Kalimantan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu,

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan kawasan Samarinda - Sangatta - Muara Wahau - Berau - Kalimantan Utara.

Pembangunan infrastruktur perhubungan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya



menunjukkan 94,87 km per 1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 94,87 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) di bawah rasio nasional yaitu 115 km/1.000 km². Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki beberapa kendala seperti,

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil, serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap baik nasional maupun provinsi dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung;
5. Masih ada beberapa pembangunan infrastruktur yang belum ada kesepakatan pembiayaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
6. Dukungan swasta belum optimal.

Berdasarkan data Dinas PU untuk panjang jalan baik kabupaten, provinsi, maupun nasional dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Panjang Jalan menurut status dan jenis permukaan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

No	Status	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
1	Nasional	1.357,25	0,00	73,16	63,27
2	Provinsi	1.067,45	282,58	185,10	61,25
3	Kabupaten	2.543,64	1.824,48	2.804,36	1.811,10
4	Total	4.968,34	2.107,06	3.062,62	1.935,62

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur



2.1.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modalnya untuk berusaha di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah dari segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan keamanan berinvestasi akan menjamin keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berbondong-bondong menanamkan modal dan mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

1) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Angka kriminalitas di Kalimantan Timur cukup fluktuatif dimana pada tahun 2012 angka kriminalitas mencapai 31,10 yang berarti terjadi 31-32 tindak kriminalitas pada setiap 10.000 penduduk, sedangkan pada tahun terakhir yakni 2014, angka kriminalitas menurun hingga 29,59 yang berarti terdapat 29-30 kasus kriminalitas pada setiap 10.000 penduduk.

Tabel 2.23
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2012-2014

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014
1.	Kasus Narkoba	589	761	749
2.	Kasus Pembunuhan	47	29	25
3.	Kejahatan Seksual	33	26	17
4.	Kasus Penganiayaan	271	399	829
5.	Kasus Pencurian	602	666	2.134
6.	Kasus Penipuan	573	623	676
7.	Kasus Pemalsuan uang	5	7	1



No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun yang Dilaporkan	9.950	10.173	9.918
9.	Jumlah Penduduk	3.199.696	3.275.844	3.351.432
10.	Angka Kriminalitas	31,10	31,05	29,59

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2015

2) Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Pada tahun 2014 terjadi demonstrasi sebanyak 477 kali dimana terjadi kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 477 kali. Secara rinci, jumlah demonstrasi dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.24
Jumlah Demonstrasi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Bidang Politik	43	6	6	20
2	Ekonomi	44	226	226	250
3	Sosial	274	156	156	207
Jumlah Unjuk Rasa		361	388	388	477

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2015

2.1.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

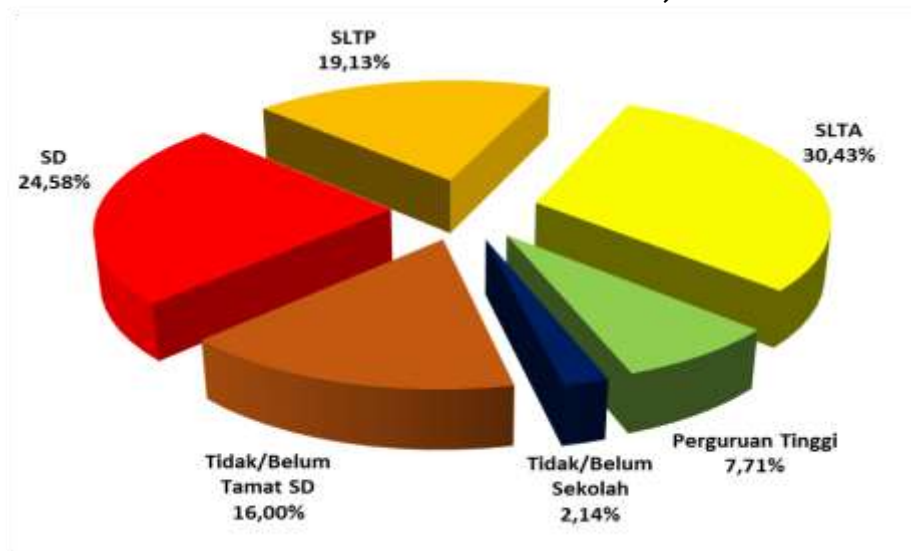


Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

A. Kualitas Pendidikan Penduduk

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah. Berikut persentase penduduk Provinsi Kalimantan Timur usia 10 tahun ke atas berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan.

Gambar 2. 19
Persentase Penduduk 10 tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2015

Dari gambar di atas terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya sebesar 7,71 persen saja. Hal ini

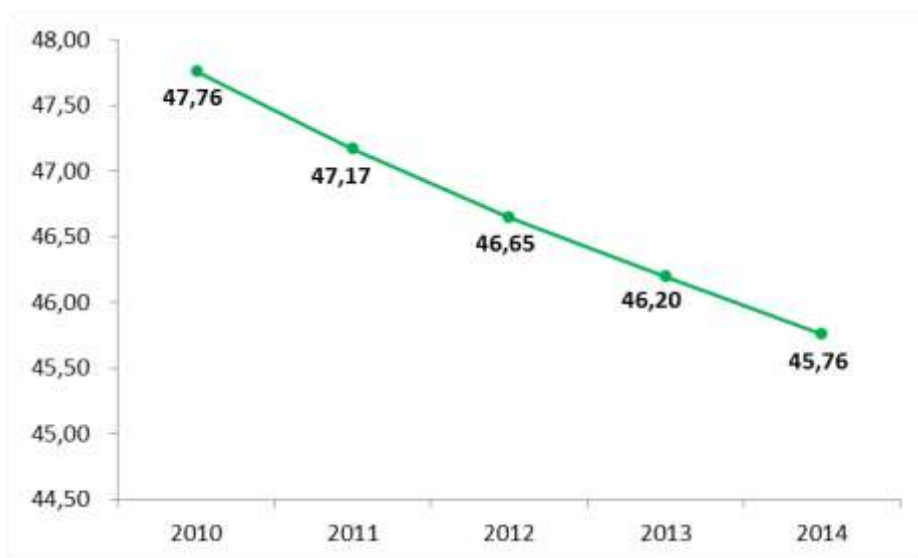


cukup mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan mutu sumber daya manusia. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi minimnya penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Selain itu, sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA (30,43%) dan SD (24,58%) dimana hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* yang terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Selain dari kualitas pendidikan, produktivitas penduduk juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun sehingga bisa diindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun.

Gambar 2. 20
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015



Berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah dalam kertas kerja sesuai dengan amanat pada lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.25
Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja
Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
I	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.199.696	3.275.844	3.351.432	3.427.100	
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,48	2,72	2,02	-2,42	Tw III
1.3	Laju Inflasi	%	5,60	9,65	7,66	4,89	
1.4	Pendapatan per Kapita	Juta Rp		64,12	61,17		
1.5	Indeks Gini		0,3555	0,3341	0,3355		
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank						
	- 40% Rendah	%	18,95	19,77	19,88		
	- 40% Sedang	%	36,37	37,67	36,96		
	- 20% Tinggi	%	44,68	42,55	43,06		
1.7	Indeks Ketimpangan Kemakmuran		0,3555	0,3341	0,3355		
1.8	Persentase penduduk miskin	%	6,68	6,06	6,42	6,23	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
1.9	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	kasus	6.405	6.686	6.722		
Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pendidikan						
1.1	Angka Melek Huruf	%	97,55	97,95	98,67		
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,83	8,87	9,04		
1.3	APK SD/MI	%	107,76	107,57	110,32		
1.4	APK SMP/MTs	%	93,24	91,06	92,04		
1.5	APK SMA/SMK/ MA	%	80,08	82,21	85,97		
1.6	APM SD/ MI	%	94,37	95,91	96,81		
1.7	APM SMP/MTs	%	74,37	76,10	78,96		
1.8	APM SMA/SMK/MA	%	59,75	62,22	67,41		
2	Kesehatan						
2.1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,32	73,52	73,62		
2.2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup				177		
2.3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup				21		
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	%					
3	Pertanahan						



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
3.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan	%					
4	Ketenagakerjaan						
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,80	7,94	7,54	7,50	
Fokus Budaya dan Olahraga							
1	Kebudayaan						
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	629	779	816	894	
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	15	19	21	21	
2	Pemuda dan Olahraga						
2.1	Jumlah Klub Olahraga	unit	1.021	1.045	1.045	1.050	
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	unit	47	47	55	97	
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Layanan Urusan Wajib							
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Dasar						
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah	%	99,17	99,46	99,35		
	7-12 tahun						



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
1.1.2	Rasio murid terhadap sekolah						
	- SD Negeri	%	196		220,19		
	- SD Swasta	%	230		260,04		
	- MI	%	154		165,96		
1.1.3	Rasio murid terhadap guru						
	- SD Negeri	%	13	14	16,48		
	- SD Swasta	%	13	14	15,95		
	- MI	%	13	14	12,33		
1.1.4	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		4.799				
1.2	Pendidikan menengah						
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah						
	- 13-15 tahun	%	96,53	96,62	97,89		
	- 16-18 tahun	%	71,16	73,10	80,50		
1.2.2	Rasio murid terhadap sekolah						
	- SMP Negeri	%	266		299,71		
	- SMP Swasta	%	141		155,96		
	- MTs	%	156		164,54		
	- SMA Negeri	%	371		370,11		
	- SMA Swasta	%	200		111,29		
	- MA	%	111		121,60		
	- SMK	%	332		291,87		
1.2.3	Rasio murid terhadap guru						
	- SMP Negeri	%	11	13	15,60		
	- SMP Swasta	%	9	11	11,23		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
	- MTs	%	12	11	9,63		
	- SMA Negeri	%	13	14	13,95		
	- SMA Swasta	%	12	8	7,38		
	- MA	%	5	8	6,69		
	- SMK	%	12	12	11,21		
1.2.4	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah						
	- Menengah Pertama		4.390				
	- Menengah Atas		2.350				
1.3	Angka Putus Sekolah						
	- SD/MI	%	0,32	0,17	0,15		
	- SMP/MTa	%	3,04	2,89	1,77		
	- SMA/SMK/MA	%	28,39	26,71	19,40		
1.4	Angka Kelulusan						
	- SD/MI	%	100,00	100,00	100,00		
	- SMP/MTs	%	99,74	99,72	100,00		
	- SMA/SMK/MA	%	99,64	99,63	99,96		
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi min. S1/D-IV	Orang			65,30		
2	Kesehatan						
2.1	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Orang	2.702	2.273	2.074		
2.2	Rasio penduduk terhadap jumlah	Orang	4.324	4.299	3.985		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
	puskesmas+pustu						
2.3	Rasio posyandu per satuan balita		0,273				
2.4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,811				
2.5	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	Kelahiran	90,83	92,02	92,9		
2.6	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	22,46	22,33			
2.7	Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	12,19				
2.8	Cakupan Puskesmas	%	166,99	180,58	174,76		
3	Pekerjaan Umum						
3.1	Panjang Jalan	Km	11.652,83		12.073,64		
3.2	Proporsi kondisi jalan baik	%	41,56		54,95		
3.3	Irigasi dalam kondisi baik	m	17.470	12.825			
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	81,89	91,09	76,19		
3.5	Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	%					
4	Perumahan						
4.1	Persentase	%	82,18	80,87	85,35		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
	rumahtangga dengan sumber air bersih						
4.2	Persentase rumahtangga dengan air minum layak	%			78,48		
4.3	Persentase rumahtangga dengan sanitasi layak	%	81,89	91,09	76,19		
4.4	Persentase rumahtangga penerangan listrik	%	94,63		96,56		
4.5	Persentase rumah layak huni	%					
5	Penataan Ruang						
5.1	Luas lahan pemukiman				0,76		
6	Perhubungan						
6.1	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	1.928.783	2.269.650	2.413.874		
6.2	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian	1.185	1.094	1.041		
6.3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	m	6,04		5,00		
6.4	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	Orang					
6.5	Jumlah penumpang	Orang	693.487	531.289	369.779		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
	angkutan laut yang turun						
6.6	Jumlah penumpang angkutan laut yang naik	Orang	571.285	494.985	290.611		
6.7	Jumlah penumpang angkutan udara yang dating	Orang	3.791.788	3.642.539	3.791.629		
6.8	Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat	Orang	3.689.629	3.593.262	3.955.136		
7	Lingkungan Hidup						
7.1	Persentase penduduk berakses air minum	%	82,18	80,87	85,35		
7.2	Indeks kualitas air sungai		7,15	7,60			
7.3	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	27	23			
7.4	Persentase sampah terangkut per hari	%	65,95	64,61	71,19		
8	Kependudukan dan Catatan Sipil						
8.1	Kepemilikan KTP	Orang		1.425.905	1.092.011	1.148.718	
8.2	Kepemilikan Akta Kelahiran	Orang	1.429.810	1.351.261	695.301	1.071.135	
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
9.1	Persentase	%	38,49				



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
	partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS Pemprov Kaltim)						
9.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	42,01	39,84	41,14		
9.3	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	30.919				
9.4	Pekerja Anak	%					
10	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
10.1	Persentase akseptor KB terhadap PUS	%	69,78	67,46	70,29	65,51	s/d Agust 2015
10.2	Banyaknya peserta baru KB	Orang	83.944	70.336	76.760	51.559	s/d Nov 2015
10.3	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	%	21,59	22,81	24,02		
11	Sosial						
11.1	Banyaknya panti asuhan	Unit	134	134	111		
11.2	Banyaknya anak yang di asuh di panti asuhan	Anak	7.938	7.368	7.296		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
11.3	Banyaknya panti wredha	Unit	4	4	4		
11.4	Banyaknya penghuni panti wredha	Orang	205	200	267		
12	Ketenagakerjaan						
12.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,64	63,53	63,48	62,39	
12.2	Persentase penduduk bekerja thd usia kerja	%	60,71	58,48	58,70	57,71	
13	Koperasi usaha kecil dan menengah						
13.1	Jumlah Koperasi	Unit	6.140	5.916	5.319	5.287	
13.2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit					
14	Penanaman Modal						
14.1	Realisasi proyek PMDN	Juta Rp	7.709.270,00	18.441.377,30	12.983.049,70	9.611.313,10	
14.2	Realisasi proyek PMA	US \$ 000	2.529.900,00	1.324.197,42	2.145.665,10	2.381.442,30	
15	Kebudayaan						
15.1	Jumlah event budaya	Event	32				
15.2	Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala	Unit	64				
15.3	Jumlah museum	Unit	8				
15.4	Jumlah taman budaya	Unit	2				



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
15.5	Jumlah desa kerajinan tradisional	Desa	8				
16	Kepemudaan						
16.1	Jumlah karang taruna	Unit	1.322	1.241	543		
17	Ketahanan Pangan						
17.1	Ketersediaan pangan utama	%		82,41	80,66		
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
18.1	Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	Unit	522	529	533		
18.2	Jumlah LSM dan Ormas	Unit	917	826	161		
19	Statistik						
19.1	Publikasi “Kabupaten/Kota Dalam Angka”		Ada	Ada	Ada	Ada	
19.2	Publikasi “PDRB Kabupaten/Kota”		Ada	Ada	Ada	Ada	
20	Komunikasi dan Informatika						
20.1	Website milik pemerintah daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	
20.2	Persentase penduduk	%	94,74		96,27		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
	menggunakan HP						
21	Perpustakaan						
21.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	1.622	1.743	1.810		
22	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
22.1	Jumlah PNS	Orang	70.814	70.580	69.536		
22.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten						
22.3	Opini BPK		WDP	WTP	WDP		
22.4	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat			68,00	72,16		
Fokus Urusan Pilihan							
1	Pertanian						
1.1	Produksi padi	Ton	424.669	438.135	426.569	429.113	
1.2	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha	Kw	41,65	42,58	42,55		
1.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	6,42	6,62	7,96	7,48	
1.4	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	0,27	0,27	0,30		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
1.5	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2,47	2,55	3,59		
2	Kehutanan						
2.1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,19	1,13	1,18		
3	Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	57,11	55,15	49,85	45,10	
4	Pariwisata						
4.1	Jumlah wisnus dan mancanegara	Orang	1.363.448	1.453.962	1.530.894	2.186.748	
4.2	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,02				
5	Kelautan dan Perikanan						
5.1	Produksi Perikanan	Ton	438.744,2	214.651,1	211.792,8		
5.2	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1,07	1,19	1,32		
6	Perdagangan						
6.1	Kontribusi subsektor	%	4,23	4,29	4,60	5,22	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
	perdagangan terhadap PDRB						
6.2	Nilai ekspor	000 US	33.792.548	31.003.083	25.825.021	17.410.960	
6.3	Nilai Impor	000 US	8.143.540	9.512.101	8.471.495	5.506.160	
6.4	Neraca perdagangan luar negeri	000 US	25.649.008	21.490.982	17.353.526		
7	Perindustrian						
7.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	17,60	17,96	19,49	20,28	
7.2	Kontribusi subsektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	%	4,83				
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	986.563	1.096.709	1.136.173		
1.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	450.920	508.706	508.801		
1.3	Rata-rata pengeluaran	Rp/Bulan	535.643	588.003	627.372		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
	konsumsi non makanan per kapita						
1.4	PDRB per kapita	Juta Rp	501,81	518,17	521,17		
1.5	Pendapatan regional per kapita	Juta Rp		64,12	61,17		
1.6	Jumlah Koperasi	Unit	6.140	5.916	5.319	5.287	
2	Pertanian						
2.1	Nilai tukar petani	%	98,04	95,30	99,93	97,31	
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	Perhubungan						
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	m	6,04		5,00		
2	Penataan Ruang						
2.1	Ketaatan terhadap RTRW						
2.2	Luas wilayah produktif						
2.3	Luas wilayah Industri						
2.4	Luas wilayah perkotaan						
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
3.1	Jumlah kantor perbankan	Unit	448	500	536		
3.2	Jumlah akomodasi	Unit	474	473	569		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
	(hotel/penginapan)						
3.3	Jumlah rumah makan/ restoran	Unit	1.086	1.340	716		
4	Lingkungan Hidup						
4.1	Persentase rumahtangga dengan sumber air bersih	%	82,18	80,87	85,35		
5	Komunikasi dan Informatika						
5.1	Daya listrik yang diproduksi	MWh	2.818.468,89	2.714.707,01	3.077.657,00		
5.2	Jumlah pelanggan listrik	titik	661.386	663.582	739.134		
Fokus Iklim Berinvestasi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Juta Rp	29.550.456,1	30.892.360,8	37.872.764,87	39.379.341,85	
Fokus Sumber Daya Manusia							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72,62	73,21	73,82		
1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		61,84	63,12	53,74		
1.3	Indeks		84,33	84,69	84,75		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
	Pembangunan Gender (IPG)						
1.4	Rasio ketergantungan		46,65	46,20	45,76		

Sumber: Gabungan dari berbagai sumber (diolah)

2.2 Evaluasi Kinerja Tahun Lalu

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevan. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan pembuatan program dan kegiatan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya untuk menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kerjanya (*outcome*). Indikator kinerja yang dimaksud merupakan suatu variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak.

Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 ini, evaluasi pembangunan menggunakan evaluasi RPJMD tahun kedua yakni tahun 2015. Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga



tahun 2015 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi terutama dalam kaitannya dengan pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah. Evaluasi tersebut akan memberi masukan dalam perencanaan ke depannya apakah akan terus dilanjutkan, disempurnakan, atau akan diganti sepenuhnya dengan kebijakan serta program dan kegiatan yang baru untuk memberikan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan selanjutnya. Berikut hasil evaluasi setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

1. Misi I, **“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi”**, diharapkan menjadi motor penggerak bagi ketercapaian misi-misi yang lain sekaligus modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan analisis capaian program kegiatan pembangunan pada evaluasi misi pembangunan kedua (evaluasi RKPDP 2015), dari 18 Program Prioritas dengan 30 indikator capaian kinerja, maka hanya 1 (satu) indikator saja yang belum memenuhi target, sementara sisanya 7 indikator menunjukkan telah menuju ke target 2015 yang ditetapkan dan 22 indikator lainnya telah menunjukkan pencapaian target (bahkan sebagian telah melebihi target yang ditetapkan). Jika ditinjau dari sisi implementasi programnya, maka dapat dikatakan bahwa 16 dari 18 Program Prioritas (atau 88,89%) telah mencapai target, dan masing-masing hanya 5,50% dikatakan sedang menuju target dan di bawah target. Peningkatan anggaran (APBN dan APBD) serta kemampuan daerah mengatasi kendala geografis dipertimbangkan penting untuk bisa menyempurnakan kinerja pembangunan.
2. Misi II, **“Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan”**, memiliki tantangan besar dalam pencapaiannya terlebih dengan upaya untuk mengupayakan target terbaru yaitu Sumber Daya Alam dan energi terbarukan. Misi kedua ini memiliki paling banyak program prioritas yakni mencapai 59 Program Prioritas yang harus dijalankan. Dari evaluasi RKPDP 2015 menunjukkan bahwa dari 61 indikator kinerja, ternyata 45 indikator diantaranya (73,77%) sudah menunjukkan pencapaian target, 10 indikator (16,39%) menuju target, dan sisanya 6 indikator (9,84%) belum mencapai target.



Ditinjau dari programnya, dapat disimpulkan bahwa dari 59 Program Prioritas terdapat 44 program telah mencapai target, 9 program menuju target, dan 6 program belum mencapai target. Akan tetapi beberapa angka capaian yang belum mencapai target masih bisa berubah, mengingat angka capaian definitif untuk triwulan ke-IV belum disampaikan. Penekanan pada misi kedua ini, peningkatan kapasitas atau keterampilan pelaku sektor pertanian (yang memiliki cakupan luas), pengembangan kewirausahaan dan ekonomi alternatif (a.l. melalui penggalian potensi kepariwisataan) layak dipertimbangkan karena sangat penting untuk meningkatkan kinerja pembangunan di masa depan.

3. Misi III, “**Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata**”, merupakan misi yang seharusnya paling konkrit dirasakan capaiannya, mengingat *output*-nya adalah infrastruktur fisik dan layanan jasa (a.l. transportasi dan komunikasi) yang sangat penting bagi kehidupan keseharian masyarakat.

Evaluasi terhadap program-program pembangunan pada misi ketiga dalam evaluasi RKPD 2015 menunjukkan bahwa dari 15 buah indikator kinerja pembangunan (untuk 14 Program Prioritas), sebanyak 6 indikator diantaranya (40%) mencapai target, 4 indikator (26,67%) menuju target, dan sisanya 5 indikator (33,33%) di bawah target. Cukup tingginya angka di bawah target pembangunan dikarenakan dua hal, yaitu:

- a. Persetujuan anggaran yang tidak memadai, sehingga hanya sebagian kegiatan saja yang dapat dilaksanakan; dan
- b. Beberapa angka kinerja baru bisa diperoleh jika telah tuntas selama 4 triwulan.

Mengingat pentingnya ketersediaan infrastruktur dasar dalam mendukung program pembangunan lainnya di tengah kendala geografis wilayah dan warga masyarakat yang tersebar hingga ke pedalaman, maka telah direkomendasikan untuk lebih selektif dan realistis dalam penetapan program, disamping kepentingan untuk membangun koordinasi yang lebih baik antar tingkat pemerintahan dari pusat hingga ke kabupaten/kota.



4. Misi IV, **“Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik “**, merupakan misi yang sangat disorot oleh publik, mengingat peran pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah pada berbagai tingkatan dewasa ini senantiasa dinilai sangat tidak optimal.

Hasil analisis pada evaluasi RKPD 2015 khususnya misi keempat menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana dari 13 indikator kinerja capaian untuk 12 Program Prioritas, terdapat 12 indikator (92,31%) telah mencapai target. Sedangkan Program Prioritas yang belum mencapai target adalah program Aplikasi yang Terintegrasi, meskipun kegiatan sudah dimulai pada pemasangan jaringan fiber optiknya. Walaupun berdasarkan target telah tercapai akan tetapi dengan mempertimbangkan tantangan pelayanan publik yang dituntut lebih baik ke depan seiring dengan perkembangan kebutuhan maka masih diperlukan peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur terkait

5. Misi V, **“Mewujudan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim”**, merupakan bagian dari upaya mendukung program global dan membawa Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi pelopor program-program prioritas dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Berdasarkan hasil dari evaluasi capaian kegiatan pembangunan misi kelima, dari 16 indikator capaian kinerja (16 Program Prioritas) terdapat 13 indikator (81,25%) telah mencapai target, 1 (satu) indikator kinerja program sedang proses, dan 2 (dua) indikator program belum mencapai target.

Program yang belum menunjukkan kinerja memuaskan adalah penanaman kembali/rehabilitasi mangrove dan program-program konservasi ekosistem bernilai konservasi tinggi. Jika dilihat kendala yang dihadapi adalah partisipasi para pihak non-SKPD termasuk dalam hal pasokan data yang masih rendah, disamping masih tingginya angka konflik sosial berkaitan dengan pemanfaatan/tenurial lahan. Koordinasi lintas sektor juga sangat dibutuhkan berkaitan dengan aspek lingkungan, yang seringkali menjadi tupoksi dari lembaga yang berbeda.

Dalam pengejawantahan misi pembangunan daerah, pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 memiliki 19 sasaran pembangunan daerah yang secara hierarki akan memberikan kontribusi dalam



keberhasilan pencapaian misi pembangunan. Sasaran pembangunan daerah tersebut memiliki 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau sering disebut *impact indicators* yang memiliki fungsi sebagai sebuah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada setiap tahapannya. Dalam evaluasi sasaran pembangunan tahun 2015, maka dibandingkan antara realisasi tahun 2015 (atau data terakhir) dengan target kinerja 2015 dalam dokumen perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, data dan informasi yang didapatkan dalam evaluasi harus valid dan *up-date* sebagai bagian dari optimalisasi evaluasi pembangunan daerah.

Hasil kajian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2015, didapatkan 18 dari 24 indikator kinerja sasaran pembangunan yang memuaskan dimana capaian target cukup memberikan hasil positif bahkan ada yang capaiannya mencapai 400an persen. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan bahwa berbagai arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dirumuskan dan diimplementasikan memiliki capaian yang sesuai dengan target sasaran sebesar 75 persen.

Capaian pembangunan jangka menengah fase kedua ini memiliki beberapa kendala yang memang dirasakan cukup memberi dampak signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Permasalahan yang cukup rumit dan kompleks dalam era pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah terkait kondisi sosial kehidupan masyarakat serta permasalahan ketimpangan struktur perekonomian wilayah yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan perekonomian beberapa tahun terakhir ini. Hal ini terlihat dari masih minimnya capaian pembangunan berupa penurunan tingkat kemiskinan yang menjauh dari target, tingkat pengangguran yang belum optimal penanganannya, serta pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari harapan. Kedua permasalahan ini memerlukan perhatian serius untuk pertimbangan kebijakan pembangunan ke depannya.

Berikut capaian kinerja sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015:



Tabel 2.26

Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2015

Sasaran		Indikator (Impact)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2015	Realisasi Kinerja 2015	% Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya IPM	IPM	73,21	77,14	73,82*	95,70%
2	Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf	97,95	98,50	98,75*	100,25%
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	8,87	10,50	9,60*	91,43%
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup	73,52	71,75	73,62*	102,61%
5	Meningkatnya pendapatan per kapita	Pendapatan per kapita	64,12	48,65	61,17*	125,73%
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	6,06	5,75	6,23	-54,84
7	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	7,94	7,00	7,50	46,81
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi	9,65	6,30±1	4,89	88,91%
		Paritas daya beli (<i>purchasing power parity</i>)	10.981	724.450	11.019	***
9	Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	0,3341	0,34	0,3332	100,00%
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi (tanpa kaltara)	2,21	3,2 - 3,7	-2,42	
		Pertumbuhan ekonomi non migas (tanpa kaltara)	5,39	7,0 - 7,3	-1,63	



Sasaran		Indikator (Impact)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2015	Realisasi Kinerja 2015	% Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara (tanpa kaltara)	6,03	7,7 - 8,0	4,14	53,77%
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (tanpa kaltara)	5,65	7	6,93*	99,00%
12	Tercapainya swasembada beras	Rasio pemenuhan beras	72	78	70,17	89,96%
13	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan	0,02	1,12	1,01	90,18%
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	6,00	6,21	103,50%
15	Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN	Indeks persepsi korupsi	5,2	5,7	5,58**	97,89%
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP**	100,00%



Sasaran		Indikator (Impact)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2015	Realisasi Kinerja 2015	% Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	68	75	76,65**	102,20%
17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	70,75	74	75,14	101,54%
		Kinerja Pemerintahan Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi**	100,00%
18	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan	74,07	79,24	78,29*	98,80%
19	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Intensitas emisi	1500	1458	1300	476,19%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

*) data tahun 2014,

**) data SKPD

**) konsep berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisa evaluasi hasil capaian pembangunan dalam kerangka sasaran implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun kedua yakni tahun 2015, secara umum dapat diasumsikan memiliki pencapaian yang cukup memuaskan pada berbagai sektor maupun bidang pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang telah Direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan



daerah selama ini memberikan dampak pada peningkatan berbagai bidang fisik maupun non fisik utamanya dalam menyejahterakan masyarakat secara merata dan berkualitas.

Keberhasilan pembangunan ini terlihat dari cukup mendekatinya realisasi capaian pembangunan dengan target pembangunan yang telah dirumuskan pada awal periode pembangunan jangka menengah. Data-data yang terlihat menunjukkan trend peningkatan berbagai target pembangunan melalui indikator sasaran maupun indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan ini akan menjadi modal dasar dan positif bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya sebagai estafet untuk menyempurnakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur.

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negative dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja. Oleh karena itu, setiap rumusan perencanaan pembangunan mempunyai upaya-upaya dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai target pembangunan sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut factor penghambat (permasalahan pembangunan) beserta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasinya berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.



Tabel 2.27
Faktor Penghambat dan Upaya-Upaya untuk Mencapai Target Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya IPM	Indeks Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah perbatasan dan terpencil 2) Rendahnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan 3) Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tinggi 4) Masih rendahnya sarana dan prasarana layanan publik terhadap anak berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas dan anak yang bermasalah hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pelayanan pendidikan/kesehatan secara baik terutama dalam rangka memberikan beasiswa, bosda dan pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak 2) Meningkatkan kondisi pemungkin (<i>enabling condition</i>) yang mampu mendorong kesempurnaan capaian IPM 3) Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau para pihak lainnya, terutama para pengusaha/pemegang izin pemanfaatan SDA di lapangan
2. Meningkatnya angka melek huruf	Angka Melek Huruf	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih adanya daerah perbatasan dan terpencil yang belum dapat mengakses pelayanan pendidikan secara merata 2) Persentase penduduk melek huruf sudah membaik, namun masih ada kesenjangan antar wilayah (akibat faktor internal dan eksternal) 3) Belum meratanya sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Derajat dan mutu pendidikan terukur dengan melihat angka melek huruf 2) Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun 3) Infrastruktur pendidikan perlu dilengkapi, terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan 4) Mendorong partisipasi kelompok pendampingan masyarakat dan pelaku usaha dengan tanggung



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		pendidikan (belum ada sekolah berasrama didaerah pedalaman, perbatasan dan terpencil)	jawab sosial (CSR) a.l. mengubah mindset petani
3. Meningkatnya ratarata lama sekolah	Angka ratarata lama sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fluktuasi rasio guru dan murid yang belum mendukung bagi kelancaran dan proses belajar mengajar yang berkualitas 2) Disparitas infrastruktur pendidikan, terutama gedung dan peralatan pendidikan antar kabupaten/kota 3) Persoalan putus sekolah dan/atau masih adanya kurangnya minat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bukan hanya dikarenakan faktor finansial, tetapi juga pola pikir 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penambahan dan pendistribusian guru bantu serta aplikasi terhadap Program Sarjana Mendidik di wilayah 3 T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) 2) Koordinasi program dan capaian kinerja kabupaten/kota, termasuk meminimalkan ketimpangan pendidikan antar wilayah 3) Pemberian beasiswa dan jaminan pendidikan untuk siswa miskin dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu 4) Pelaksanaan kajian dan pengembangan strategi efektif untuk menjawab akar masalah dari putus sekolah.
4. Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya program jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) 2) Kualitas pelayanan kesehatan yang belum efektif/efisien terhadap pasien 3) Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan (termasuk pengobatan gratis) bagi masyarakat kurang mampu 2) Peningkatan jumlah dan durasi pelayanan (tidak terkecuali tenaga medisnya), khususnya di wilayah terpencil, meskipun telah tersedia 100 puskesmas 24 jam di berbagai daerah



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		4) Distribusi tenaga medis belum merata 5) Belum maksimalnya kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.	3) Melakukan berbagai terobosan pelayanan kesehatan (a.l. Pusat Kesehatan Keliling/ Terapung puskesmas pembantu/Pusban) 4) Penyebarluasan atau penyuluhan pola hidup sehat di kalangan masyarakat serta penggalan potensi obat-obatan berbasis material lokal.
5. Meningkatnya pendapatan per kapita	Pendapatan per kapita	1) Mutu/kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah 2) UMP masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemilik tempat kerja 3) Kontribusi sumber penghasilan riil dari sektor dominan/pertanian di kalangan masyarakat belum signifikan	1) Kualitas SDM Kaltim yang memenuhi syarat dalam mengisi peluang kerja dan produktif 2) Peningkatan kuantitas, kualitas dan nilai tambah produk pertanian sebagai sumber utama pendapatan masyarakat di pedesaan dan wilayah terpencil 3) Strategi peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan bonus demografi yang ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif yang tinggi.
6. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	1) Laju penurunan angka kemiskinan cenderung melambat 2) Masih ada angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten/Kota 3) Peningkatan pemutusan hubungan kerja sektor SDA dan terbatasnya sumber pencaharian.	1) Pembangunan infrastruktur untuk mendorong akses terhadap layanan publik yang lebih baik 2) Sinergi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan di Kaltim 3) Hilirisasi sektor primer dan pencarian sumber ekonomi alternatif



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja masyarakat terutama yang memiliki pendidikan/keterampilan rendah 2) Belum optimalnya pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan wirausaha 3) Masih tingginya mindset bahwa bekerja itu adalah menjadi pegawai/karyawan/buruh 4) Masyarakat berpendidikan menengah atas masih memiliki idealisme harus bekerja di bidang tertentu dengan gaji tertentu 5) Belum maksimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perluasan kesempatan kerja masyarakat 2) Memperluas lapangan usaha 3) Peningkatan daya saing manusia menjadi modal dasar penciptaan kesempatan kerja berbasis SDM berkualitas.
8. Meningkatnya daya beli masyarakat	Inflasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Naiknya harga barang pada hari besar dan akhir tahun 2) Tingginya harga BBM dan TDL dan berkurangnya subsidi 3) Minimnya intervensi Pemda terhadap gejolak pasar 4) Lemahnya rantai distribusi komoditi strategis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan langkahlangkah untuk kestabilan harga 2) Memperbaiki sektor tata niaga dan pemasaran produk UMKM
9. Menurunnya	Indeks gini	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya pengembangan usaha pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan ekonomi kerakyatan



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Gini		<ul style="list-style-type: none"> sektor produktif 2) Rendahnya kualitas SDM pada masyarakat ekonomi lemah 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal dan kearifan lokal
10. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi non migas non batubara	<ul style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya hubungan pemerintah daerah terhadap iklim investasi yang kondusif 2) Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan sektor pengolahan industry migas 3) Pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat pada Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan SDA dan infrastruktur yang relatif baik 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Percepatan transformasi ekonomi 2) Lebih mengarahkan struktur ekonomi berbasis SDA terbarukan 3) Pembangunan ekonomi Kaltim yang saling terkait antara hulu dan hilir dengan komoditas unggulannya 4) Pengembangan perekonomian rakyat dan/atau sektor yang didukung oleh pelaku ekonomi yang lebih luas (pertanian)
11. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	<ul style="list-style-type: none"> 1) Masih rendahnya produk sektor pertanian 2) Kurang maksimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan agribisnis 2) Pertanian dengan sentra bisnis 3) Pengembangan agroindustri
12. Tercapainya swasembada beras	Rasio pemenuhan beras	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan dan pemberdayaan pertanian belum optimal 2) Kebijakan terkait kesejahteraan petani belum efektif 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dan penerapan teknologi 2) Perbaiki tata niaga dalam mendukung pergerakan ekonomi



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		3) Ketersediaan infrastruktur pertanian masih rendah 4) Luas tanam dan luas panen yang belum optimal 5) Masih kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian.	3) Mempertahankan dan bilamana mungkin memperluas areal tanam atau lahan pertanian masyarakat.
13. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energy baru dan terbarukan	1) Pemenuhan energi masih bergantung pada energi fosil 2) Belum berkembangnya energi bersumber non fosil 3) Kurang optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM 4) Masih rendahnya rasio elektrifikasi dan desa berlistrik 5) Daya mampu pembangkit listrik PLN masih kurang	1) Pemenuhan dan pemberdayaan energy yang ramah lingkungan 2) Mendorong pengembangan sumber energi alternatif, sampai pemanfaatan sampah organik menjadi bio massa
14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	1) Belum optimalnya penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan jalan 2) Belum optimalnya konektivitas jaringan transportasi di pusat-pusat pelayanan wilayah	1) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar 2) Pemerataan dan pengembangan wilayah dengan prototipe kawasan berkembang sekitarnya



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
infrastruktur dasar		<p>(intra regional) dan antar pusat pelayanan (inter regional)</p> <p>3) Daya dukung dan kapasitas prasarana untuk mobilisasi dan distribusi barang dan jasa</p> <p>4) Kualitas dan kuantitas infrastruktur perlu ditingkatkan</p> <p>5) Sulitnya penyelesaian masalah sosial terhadap kebutuhan lahan infrastruktur</p>	
15. Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi dan Opini BPK	<p>1) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur</p> <p>2) Manajemen pengelolaan asset daerah belum efektif dan efisien</p> <p>3) Minimnya perencanaan terhadap pengelolaan keuangan</p> <p>4) Kesalahan mindset “menghabiskan anggaran” bukannya “mengoptimalkan anggaran”</p>	<p>1) Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan</p> <p>2) Pengendalian dan pengelolaan asset daerah</p> <p>3) Memprioritaskan area perubahan seluruh aspek pemerintahan</p> <p>4) Percepatan pencapaian target penyelesaian tata kelola pemerintahan yang baik.</p>
16. Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	<p>1) Pelayanan publik di beberapa SKPD belum maksimal</p> <p>2) Masih kurangnya kesadaran aparatur sebagai pelayan masyarakat</p> <p>3) Masih ada anggota masyarakat yang belum</p>	<p>1) Perlu meningkatkan pelayanan publik</p> <p>2) Perlu menjadi aparatur yang berkualitas dengan tetap bekerja dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku</p>



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		paham tentang persamaan hak warga dalam memperoleh pelayanan.	
17. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	1) Indikator kinerja utama SKPD belum berorientasi hasil 2) Laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja	1) Perlu revisi Renstra SKPD 2) Perlu menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi yang mencapai/belum mencapai target kinerja
18. Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan	1) Data pendukung terkait dengan kualitas udara, air dan tutupan lahan belum lengkap tersedia/terserak pada SKPD yang berbeda untuk provinsi dan kabupaten/kota 2) Partisipasi parapihak di luar instansi pemerintah masih belum tinggi untuk penyerahan data 3) Semangat daerah untuk memajukan perekonomian, seringkali meninggalkan aspek pemantauan dampak lingkungan sebagai penyeimbangannya,	1) Menghimpun data pada titik-titik utama yang dipertimbangkan mampu merepresentasikan kualitas lingkungan hidup daerah 2) Mendorong partisipasi parapihak, khususnya pengusaha dan masyarakat, untuk terlibat aktif dalam pemantauan lingkungan 3) Memperketat ketersediaan dan implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Dokumen AMDAL sebagai syarat mutlak keamanan lingkungan akibat pembangunan
19. Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat emisi gas rumah kaca	1) Belum tersedianya parameter untuk menghitung intensitas emisi di kabupaten/ kota 2) Lemahnya peran serta perangkat daerah terkait pengumpulan data	1) Perlu komitmen kabupaten/kota untuk mengumpulkan data 2) Menyediakan pelatihan untuk menghitung intensitas emisi



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
			3) Membentuk pokja di setiap kabupaten/kota 4) Mengembangkan jaringan kerja ke tingkat Nasional dan Global.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 merupakan sebuah perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Perencanaan tahunan ini merupakan periode keempat dari pelaksanaan RPJMD tahun 2013-2018 yang memiliki tema pembangunan, "Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas". Sebagai tahapan keempat dari perencanaan pembangunan lima tahunan, RKPD tahun 2017 merupakan salah satu langkah akhir menuju pencapaian pembangunan tahun 2018 nanti. Oleh karena itu, segala persiapan dan finalisasi implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah harus direalisasikan.

Tema pembangunan daerah tahun 2017 memiliki fokus terhadap **perkembangan perekonomian daerah dimana kualitas struktur ekonomi diperhatikan secara seksama**. Hal ini tentu memiliki pengaruh terhadap berbagai kebijakan perekonomian daerah utamanya dalam mengembangkan perekonomian secara makro dan mikro. Selain itu, keuangan daerah yang merupakan modal dasar pembangunan juga memiliki peran penting sehingga perlu rumusan perencanaan perekonomian dan keuangan daerah yang saling terintegrasi untuk mencapai optimalisasi penggunaan aset negara untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berbagai kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya akan menjadi pembelajaran berharga jika evaluasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pembelajaran tersebut akan menjadi titik tolak perumusan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, hasil dari pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya sudah tentu menunjukkan hasil-hasil yang dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Positif maupun negatifnya hasil pembangunan tersebut akan menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan tahunan



periode ini maupun ke depan baik melalui penyempurnaan program dan kegiatan maupun penggantian program dan kegiatan yang lebih baik.

Dalam hal kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah, efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah. Se jauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan "besaran anggaran" yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa subyektifitas *stake holder* dalam menilai evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk prioritas capaian program pembangunan yang lebih tinggi (dalam hal ini pembangunan nasional).

Sebagai salah satu daerah otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki arahan kebijakan potensial dalam pembangunan daerah sebagai langkah untuk peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Kebijakan tersebut didasari oleh asas otonomi daerah sehingga melahirkan implikasi-implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Selanjutnya, implikasi-implikasi tersebut merupakan sarana langsung pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut akan berimbas pada sistem penganggaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks otonomi daerah karena akan dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan produk unggulan masing-masing.

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, untuk saat ini mudah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memenuhi *fiscal need*. Meskipun begitu, perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar Pendapatan Asli Daerah berasal dari sumber daya alam yang tak terbarui sehingga suatu saat nanti jika terjadi penurunan produksi sumber daya alam tersebut maka akan mengguncangkan sistem



perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh dan massive. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai merealisasikan perencanaan dan pelaksanaan ekonomi berkelanjutan sebagai penjamin kehidupan generasi mendatang.

Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memerhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah; dan
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh.

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkiraan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2017. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan tahun 2017 melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh.



3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan-kebijakan strategis secara relevan akan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun begitu, kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai aspek maupun bidang urusan pembangunan seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional.

Dalam melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah melalui indikator makro ekonomi daerah apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah.

Analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sehingga hal tersebut sangat penting dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Kebijakan Perkiraan Tahun 2016

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas



capaian PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk capaian PDRB pada 17 (Tujuh belas) kategori lapangan usaha sebagai berikut:

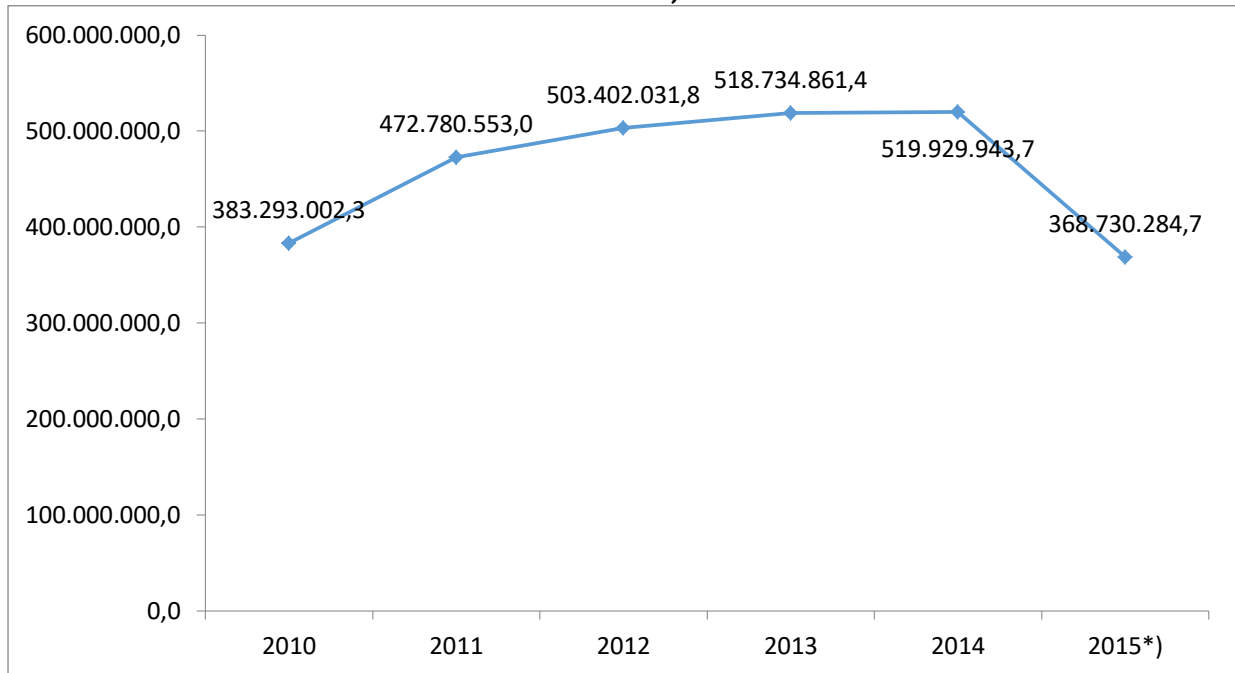
- 1) Sektor pertanian, kehutanan & perikanan;
- 2) Sektor pertambangan dan penggalian;
- 3) Sektor industri pengolahan;
- 4) Sektor pengadaan listrik, gas;
- 5) Sektor pengadaan air;
- 6) Sektor konstruksi;
- 7) Sektor perdagangan besar & eceran, Reparasi mobil & sepeda motor;
- 8) Sektor transportasi dan pergudangan;
- 9) Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
- 10) Sektor informasi dan komunikasi;
- 11) Sektor jasa keuangan;
- 12) Sektor real estate;
- 13) Sektor jasa perusahaan;
- 14) Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
- 15) Sektor jasa pendidikan;
- 16) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- 17) Sektor jasa lainnya

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi di daerah. Oleh karena itu, PDRB Provinsi Kalimantan Timur akan menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian dalam menata pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.



Gambar 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adh Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Ket : *) s/d Triwulan III 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara)

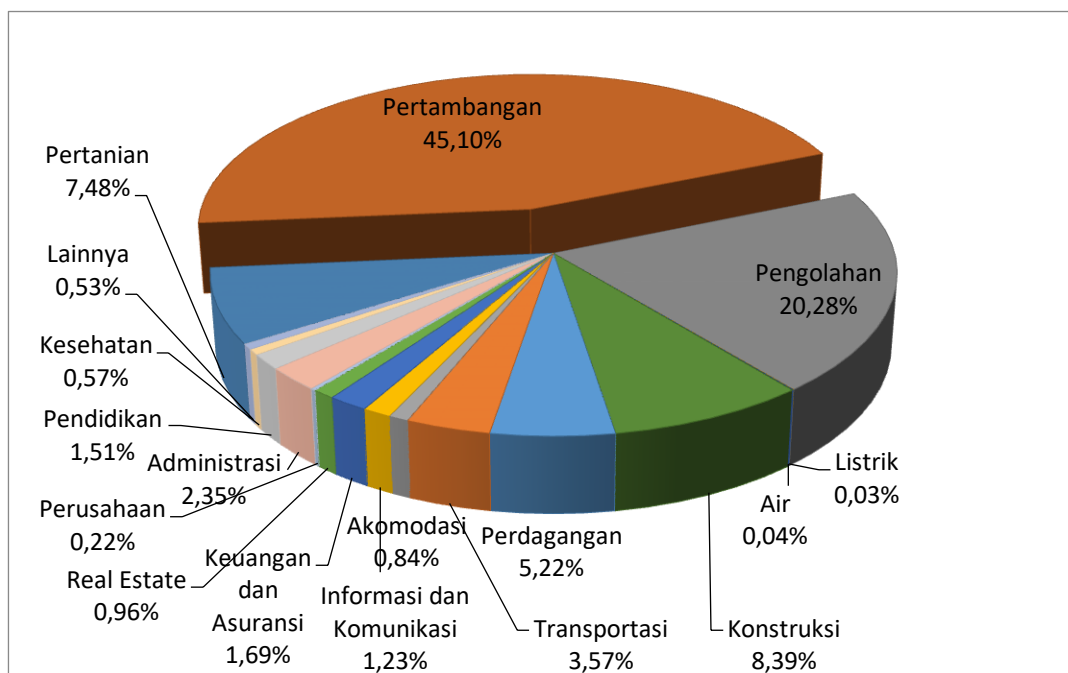
PDRB Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun hingga mencapai angka **518.734.861,4** juta rupiah atau hampir mencapai **518,73** triliun rupiah pada tahun 2013 dan mencapai **519,93** trilliun rupiah pada tahun 2014 dan hingga triwulan III 2015 telah mencapai angka **368,73** trilliun rupiah. Nilai PDRB tahun terakhir ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar **383,29** trilliun rupiah dimana kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun berikutnya yakni 2011 dengan nilai PDRB mencapai **472,78** trilliun rupiah.

b) Struktur Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan struktur ekonomi pada tahun sebelumnya dimana pertambangan dan penggalian terutama sumber daya alam yang tak terbarui menjadi sektor yang mendominasi pembentukan struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar **45,10** persen struktur ekonomi disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian serta sebesar **20,28** persen oleh sektor industri pengolahan.

Sebagai salah satu komoditas yang akan dijadikan sektor unggulan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2015 memiliki kontribusi perekonomian wilayah sebesar 7,48 persen. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai memberdayakan sektor-sektor yang berfokus pada sumber daya alam terbaharui mengingat sektor pertambangan dan penggalian semakin menurun produksinya.

Gambar 3.2
Struktur Ekonomi (%)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (Tahun Dasar 2010)



Sumber: BPS Kalimantan Timur (Data tanpa Kaltara)

c) Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

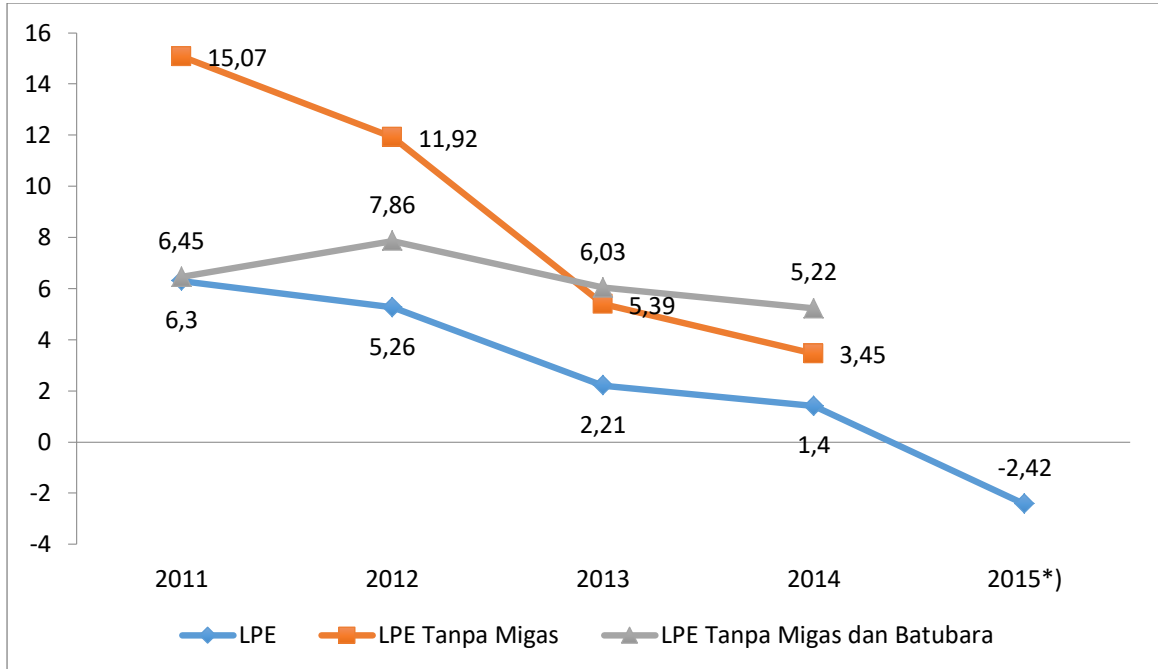
Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur secara valid. Oleh karena itulah, indikator ini dapat digunakan untuk merumuskan perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha yang potensial.



Laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada periode tertentu dimana pada penghitungan periode ini menggunakan tahun dasar terbaru yakni tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut akan menggambarkan suatu perubahan produksi barang dan jasa secara riil tanpa terpengaruh oleh perubahan harga pada periode analisis

Secara umum, dalam kurun waktu empat tahun terakhir terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada tahun 2012 dimana pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 5,26 persen dimana pada tahun sebelumnya mencapai 6,3 persen. Perlambatan terus terjadi hingga pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur hanya mencapai -2,42 persen.

Gambar 3.3
Grafik Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015



Ket : *) s/d Triwulan III 2015

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

*Data Prov.Kalimantan Timur tanpa Kaltara

Jika diperhatikan kinerja pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, perlambatan pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh



komoditas migas dan batubara (terutama pada sektor pertambangan dan penggalian). Hal ini tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang mencapai 3,45 persen pada tahun 2014. Sedangkan pada laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara mencapai 5,22 persen pada tahun 2014. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dalam pengembangan ekonomi potensial melalui pemberdayaan potensi sumber daya terbarukan.

3.1.2. Rencana Target Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Jika melihat perkembangan ekonomi makro Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan melalui perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Timur selama beberapa periode serta melihat laju pertumbuhan ekonomi baik makro maupun sektoral, maka rencana target ekonomi makro Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 diperkirakan sebagai berikut:

Dinamika globalisasi merupakan sebuah peradaban umat manusia yang tidak mungkin ditarik mundur. Globalisasi disamping menyediakan banyak peluang juga melekat berbagai tantangan dan eksekusi yang perlu dimitigasi. Integrasi ke dalam perekonomian global menyebabkan perekonomian domestik menjadi lebih terbuka terhadap berbagai guncangan eksternal. Hal ini terbukti pada kondisi perekonomian tahun 2014 dan 2015 yang mencerminkan adanya banyak kejutan sehingga menyebabkan kelesuan dan ketidakseimbangan perekonomian global.

Perbaikan kinerja ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat pasca krisis global ternyata tidak diikuti oleh pergerakan perekonomian dunia lainnya seperti Tiongkok yang justru mengalami perlambatan. Perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai sentra manufaktur global perlu diwaspadai karena dapat berlangsung lama dan berdampak besar bagi perdagangan dunia. Akibat dari ketimpangan perekonomian berimbas pada permintaan global melemah yang mendorong harga-harga komoditi dunia mengalami penurunan. Namun terdapat efek positif dari melemahnya perekonomian dunia yakni terjadi persaingan dalam memperebutkan pasar ekspor global semakin terbuka, termasuk Indonesia dan khususnya Provinsi Kalimantan Timur.



Tabel 3.1
Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Ekonomi	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	2,0	1,8 – 2,2	2,5 – 2,9
2	Inflasi	7,7	4,0 ± 1	4,0 ± 1

Laju pertumbuhan Kalimantan Timur pada tahun 2014 menurut tahun dasar 2010 kembali mengalami perlambatan yakni dari 2,72 persen pada tahun 2013 menjadi 2,02 persen. Perlambatan didorong oleh menurunnya kinerja sektor dominan utama pada struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yakni sektor pertambangan. Selain akibat menurunnya produksi beberapa barang tambang, hal tersebut juga merupakan dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok yang menyebabkan permintaan batubara dari Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan.

Pertambangan migas juga mengalami penurunan lifting pada empat tahun terakhir, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri pengolahan migas di Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2014 masih positif yang didorong oleh kinerja positif sektor pertanian, sektor pengadaan listrik dan gas serta perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor konstruksi. Sementara itu dari sisi permintaan, laju perekonomian Provinsi Kalimantan Timur didorong oleh kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi.

I. Nilai PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha

Selama beberapa periode terakhir, kondisi perekonomian global baik regional Provinsi Kalimantan Timur, nasional, maupun internasional mengalami ketidakstabilan yang disebabkan oleh berbagai aspek. Hingga akhir tahun 2015, kondisi perekonomian utamanya nasional, masih tidak bisa diperkirakan kemana arahnya mengingat pergantian “kursi” pemerintahan maupun beberapa sistem penunjangnya memberikan dampak yang berbeda pada setiap kebijakan yang diambil.



Kebijakan yang cukup besar dampaknya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada triwulan ke empat tahun 2014 yang memberikan dampak awal terguncangnya aktivitas ekonomi mikro hingga disusul melemahnya nilai tukar rupiah. Pergerakan pertumbuhan perekonomian nasional pun mengalami perlambatan yang menyebabkan lesunya perekonomian nasional dan disusul oleh beberapa wilayah.

Selain dampak perekonomian nasional, perekonomian global juga memberikan efek yang signifikan dalam pergerakan perekonomian Indonesia. Kondisi internasional yang tidak kalah signifikan dampaknya adalah situasi perdagangan internasional yang belum stabil (seiring dengan pelemahan harga-harga komoditas sumber energi baik migas maupun batubara) menyebabkan ekonomi global internasional mengalami masa sulit berkepanjangan.

Kondisi ketidakstabilan ekonomi tersebut telah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Pada Tahun 2015 sampai dengan triwulan III, nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 368,73 triliun (PDRB Tanpa Migas mencapai Rp 439,47 triliun dan PDRB Tanpa Migas dan Batubara mencapai Rp. 250,98 triliun).

Jika dilihat berdasarkan struktur ekonomi daerah, pada Tahun 2015 sampai dengan Triwulan III sektor pertambangan dan penggalian menghasilkan “kue ekonomi” terbesar yakni sebesar Rp 166,29 triliun atau 45,10 persen dari total nilai PDRB (dengan sumbangan subsektor pertambangan tanpa migas (batubara) sebanyak Rp 196,2 triliun). Selanjutnya, andil perekonomian tertinggi diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai tambah bruto (NTB) sebesar Rp 74,79 triliun (20,28%) kemudian sektor konstruksi sebesar Rp 30,94 triliun (8,39%) serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 27,56 triliun (7,48%). Sedangkan sektor-sektor lainnya memiliki nilai PDRB dibawah Rp 20 triliun.

Data dari indikator perekonomian ini memberikan sebuah gambaran bahwa perekonomian makro di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh perekonomian berbasis sumber daya tak terbarukan dimana pada kajian pengembangan perekonomian daerah Kalimantan Timur menyebutkan bahwa dalam jangka waktu produksi minyak mentah hanya berkisar 11,80 tahun, produksi gas bumi



selama 13,53 tahun, dan produksi batubara selama 43,87 tahun (dengan asumsi produksi setiap tahun stabil). Oleh karena itu, tantangan pengambil kebijakan perekonomian ke depan adalah membuat suatu rumusan mendalam mengenai perekonomian Provinsi Kalimantan Timur agar pada generasi mendatang memiliki daya saing ekonomi yang berkualitas dengan mempertahankan berbagai ekosistem lingkungan hidup secara madani.

Tabel 3.2
Statistik PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015*)

No	Lapangan Usaha dan Kelompok Sektor	PDRB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%) ADHK	Distribusi (%)	
		ADHB	ADHK		ADHB dengan migas	ADHB tanpa migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.564.666,2	20.408.656,1	2,20	7,48	10,5
2.	Pertambangan dan Penggalian	166.285.481,1	163.979.078,3	-4,94	45,10	47,1
3.	Industri Pengolahan	74.787.892,5	62.792.243,6	-4,88	20,28	8,7
4.	Pengadaan Listrik, Gas	124.429,2	145.738,9	46,11	0,03	0,03
5.	Pengadaan Air	154.756,9	141.378,5	2,12	0,04	0,05
6.	Konstruksi	30.935.584,0	23.095.128,1	1,53	8,39	10,55
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.249.404,7	16.050.457,6	2,81	5,22	6,78
8.	Transportasi dan Pergudangan	13.155.026,6	9.183.815,7	3,80	3,57	4,45
9.	Penyediaan Akomodasi dan	3.080.418,5	2.332.756,8	5,01	0,84	1,04



No	Lapangan Usaha dan Kelompok Sektor	PDRB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%) ADHK	Distribusi (%)	
		ADHB	ADHK		ADHB dengan migas	ADHB tanpa migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyediaan Makan Minum					
10.	Informasi dan Komunikasi	4.522.822,3	4.543.505,0	8,32	1,23	1,55
11.	Jasa Keuangan	6.245.269,1	4.800.317,5	2,13	1,69	1,95
12.	Real Estate	3.534.547,1	2.939.916,0	4,26	0,96	1,10
13.	Jasa Perusahaan	811.973,8	646.754,7	-4,60	0,22	0,29
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.669.936,1	6.168.974,5	9,40	2,35	3,02
15.	Jasa Pendidikan	5.569.158,7	4.336.839,2	15,86	1,51	1,73
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.100.229,6	1.628.124,3	14,73	0,57	0,63
17.	Jasa Lainnya	1.938.688,5	1.476.005,9	8,05	0,53	0,57
PDRB		368.730.284,7	324.669.690,7	-2,42		
PDRB Tanpa Migas					100,00	100,00
PDRB Tanpa Migas dan Batubara						

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara)
ADHK: Atas Dasar Harga Konstan
ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan III tahun 2015 merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Turunnya pertumbuhan ekonomi sangat disebabkan oleh dua sektor paling berpengaruh dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur yakni sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan terutama subsektor industri pengolahan migas.



Perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar -2,42 persen ini terjadi karena penurunan PDRB pada sektor pertambangan dan penggalian dimana sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,94 persen. Tingginya pengaruh sektor pertambangan dan penggalian dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan sektor tersebut memiliki andil terbesar dalam struktur ekonomi yakni sebanyak 45,10 persen sehingga sedikit saja penurunannya akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Selain itu, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar -4,88 persen dimana kecilnya pertumbuhan sektor ini dipengaruhi oleh penurunan subsektor Industri Migas sebesar -0,28 persen.

Pada sektor-sektor lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi positif dimana sektor Pengadaan Listrik, dan Gas tercatat memiliki pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 46,11 persen, diikuti jasa pendidikan (15,86 persen), sektor Jasa Kesehatan (14,73 persen), dan sektor lainnya dengan pertumbuhan dibawah 9 persen.

II. Nilai PDRB dari Sisi Permintaan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang perekonomiannya mengandalkan kinerja komoditas ekspor barang terutama ekspor sektor primer seperti batubara, minyak bumi, maupun gas alam. Namun barang-barang ekspor tersebut memiliki kelemahan yakni merupakan bagian dari sumber daya alam yang tak terbarui dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproduksi kembali. Kondisi struktur ekonomi ini harus memiliki kebijakan-kebijakan yang strategis dalam kaitannya restrukturisasi perekonomian wilayah dari sector dominan sumber daya tak terbarui menjadi perekonomian berkelanjutan.

Adanya ketidakstabilan situasi ekonomi global di pasar internasional memberikan beberapa efek negatif terhadap situasi perekonomian wilayah di Negara Indonesia. Meskipun begitu, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki catatan positif yakni mengalami surplus pada komponen net ekspor antar daerah sebanyak Rp 27,46 triliun lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai Rp 25,02 triliun. Komoditas ekspor utama Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah batubara, gas alam, minyak mentah, minyak kelapa sawit/CPO, dan pupuk. Sedangkan



yang merupakan impor masuk antara lain minyak mentah, mesin, peralatan dan barang konsumsi, serta barang modal.

Tabel 3.3
PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2014 (Jutaan Rp.)

Kategori Penggunaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	74.345.462,81	82.983.993,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.526.219,27	1.731.913,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19.819.388,79	23.323.075,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	129.083.647,03	139.830.347,87
5. Perubahan Inventori	9.842.941,81	12.092.354,73
6. Ekspor Luar Negeri	376.072.300,22	360.513.291,93
7. Impor Luar Negeri	110.042.557,93	118.561.293,72
8. Net Ekspor Antar Daerah	18.087.459,42	18.016.260,23
PDRB	518.734.861,42	519.929.943,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 74,35 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 82,98 triliun pada tahun 2014. Pengeluaran tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 11,62 persen pada tahun 2014. Sedangkan pada pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 19,82 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 23,32 triliun pada tahun 2014

Kondisi investasi di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2014 masih menunjukkan trend positif yang ditunjukkan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar Rp 129,08 triliun menjadi Rp 139,83 triliun pada tahun 2014. Sedangkan jika dilihat dari laju pertumbuhannya, PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 8,33 persen pada tahun 2014.



Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (%)

Kategori Penggunaan	2014
(1)	(2)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,27
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,70
5. Perubahan Inventori	25,57
6. Ekspor Luar Negeri	-9,97
7. Impor Luar Negeri	0,63
8. Net Ekspor Antar Daerah	-518,13
PDRB	1,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010

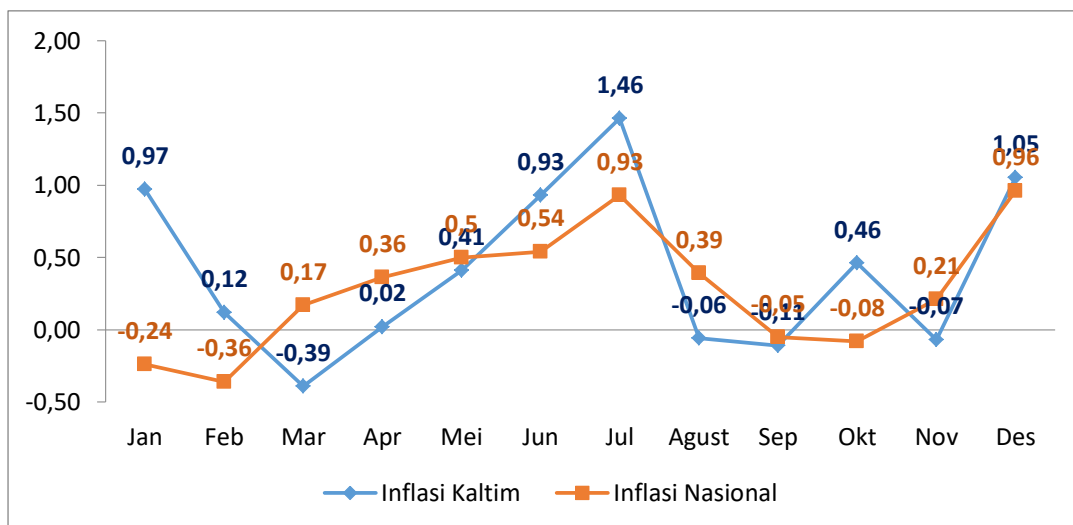
Hingga akhir tahun 2014, melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing (US Dollar) masih terus terjadi. Hal ini menyebabkan situasi perdagangan khususnya produk unggulan sektor primer Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 mengalami ketidakstabilan. Tercatat nilai ekspor atas dasar harga berlaku pada 2014 mengalami penurunan dari Rp. 376,07 triliun menjadi Rp. 360,51 triliun. Kondisi ini juga diikuti perkembangan secara riil (berdasarkan harga konstan 2010), dimana ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar negatif 4,14 persen. Sedangkan untuk nilai impor Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 110,04 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 118,56 triliun pada tahun 2014.



III. Inflasi

Inflasi merupakan gambaran perubahan harga suatu wilayah yang dilihat dari sisi konsumennya. Inflasi dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menggambarkan perekonomian secara mikro suatu wilayah dengan memperhatikan perubahan harga dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil pemantauan selama bulan Januari-Desember 2015, Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 4,89 persen (tahun kalender 2015). Inflasi kumulatif selama tahun 2015 ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 yaitu sebesar 9,65 persen. Jika dilihat dari 3 kota pembentuk inflasi di Provinsi Kalimantan Timur yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Tarakan, masing-masing mengalami inflasi sebesar 4,24 persen; 6,26 persen; dan 3,42 persen.

Gambar 3.4
Grafik Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional
Bulan Januari - Desember 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Pergerakan inflasi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2015 memiliki trend yang hampir sama dengan inflasi level nasional. Dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun 2015, pada bulan Januari, Februari, September dan Oktober mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,24 persen, -0,36 persen, -0,05 persen, -0,08 persen sedangkan bulan lainnya mengalami inflasi dengan capaian tertinggi pada bulan Desember sebesar 0,96 persen. Ekstrimnya inflasi pada bulan-bulan terakhir tahun



2015 ini dipicu karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempengaruhi hampir di semua harga kebutuhan pokok masyarakat secara Nasional.

Selama tahun 2015, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi dengan nilai inflasi paling besar berada pada kelompok bahan makanan yang mencapai 9,28 persen dan diikuti makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (8,48%) serta kesehatan (5,82%). Sedangkan inflasi terendah berada pada kelompok transportasi & komunikasi yang mengalami deflasi mencapai 0,30 persen selama periode tahun 2015.

Tabel 3.5
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kalimantan Timur Tahun 2015 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012 = 100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2015	Inflasi Tahun Kalender			
		Kalimantan Timur	Samarinda	Balikpapan	Tarakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UMUM	126,42	4,89	4,24	6,26	3,42
1. Bahan Makanan	134,06	9,28	8,69	11,90	3,99
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau	134,73	8,48	10,27	6,40	7,25
3. Perumahan	121,46	3,09	1,86	5,03	2,23
4. Sandang	109,09	1,45	-0,09	3,02	2,59
5. Kesehatan	123,43	5,82	3,93	7,92	6,85
6. Pendidikan, Rekreasi, & Olah Raga	122,67	5,04	4,56	6,11	3,92
7. Transportasi & Komunikasi	125,50	-0,30	-1,98	1,97	-0,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015



IV. Kemiskinan

Selama kurun waktu setahun terakhir dari 2013-2015 (kondisi bulan maret), telah terjadi kenaikan angka kemiskinan baik secara absolut maupun persentasenya dimana pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 237.960 jiwa kemudian meningkat menjadi 253.600 jiwa pada tahun 2014. Demikian pula angka kemiskinan yang meningkat menjadi 6,42 persen pada tahun 2014 dimana tahun sebelumnya tingkat kemiskinan hanya sebesar 6,06 persen. Namun pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 212.890 dengan tingkat kemiskinan mencapai 6,23 persen.

Jika dilihat dari klasifikasi wilayah administrasinya, jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selama periode Maret 2013-Maret 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebanyak 7.470 ribu orang sedangkan di daerah pedesaan juga meningkat sebanyak 8.170 ribu orang. Selain itu, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Hal ini juga terlihat pada persentase penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan pada bulan Maret 2014 sebesar 10,33 persen sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,01 persen. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan menjadi 86.820 jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 6,23 persen.



Tabel 3.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur
Menurut Daerah, Maret 2013 – Maret 2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2011	92,14	155,77	247,90	4,06	11,21	6,77
Maret 2012	95,20	158,13	253,34	4,05	11,01	6,68
Maret 2013	90,42	147,54	237,96	3,71	9,90	6,06
Maret 2014	97,89	155,71	253,60	4,01	10,33	6,42
Maret 2015	86,82	126,06	212,89	4,03	9,96	6,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

1) Garis Kemiskinan Maret 2013 – Maret 2015

Garis kemiskinan merupakan suatu batasan pengeluaran per kapita penduduk dimana jika berada di bawah batasan tersebut maka penduduk dianggap memasuki kuadran miskin (tergolong penduduk miskin), begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya garis kemiskinan pada wilayah tersebut.

Garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur pada maret 2015 mencapai Rp. 473.710,- dengan jumlah penduduk miskin mencapai 212.890 jiwa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 212.890 penduduk Provinsi Kalimantan Timur memiliki pengeluaran tidak lebih dari Rp. 473.710,- dalam waktu sebulan. Garis



kemiskinan ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2014 di bulan yang sama dan peningkatannya mencapai 9,77 persen. Peningkatan garis kemiskinan yang cukup tinggi ini berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan juga tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Jika memperhatikan komponen garis kemiskinan, maka garis kemiskinan makanan lebih mendominasi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, maupun kesehatan).

Jika dilihat dari administrasi wilayah, garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan dengan garis kemiskinan pada bulan Maret 2015 di daerah perkotaan sebesar Rp 485.887,- sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 452.999,-. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Tabel 3.7
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Klasifikasi Wilayah, Maret 2013 - Maret 2015

Wilayah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Perkotaan</u>					
Maret 2013	285.303	115.829	401.132	90,42	3,71
Maret 2014	314.344	133.876	448.220	97,89	4,01
Maret 2015	337.970	147.917	485.887	86,82	4,03
<u>Perdesaan</u>					
Maret 2013	261.242	88.694	349.935	147,54	9,90
Maret 2014	301.084	103.470	404.554	155,71	10,33
Maret 2015	333.612	119.387	452.999	126,06	9,96



Wilayah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
<u>Kota+Desa</u>					
Maret 2013	276.173	105.533	381.706	237,96	6,06
Maret 2014	309.285	122.275	431.560	253,60	6,42
Maret 2015	336.356	137.353	473.710	212,89	6,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Analisis kemiskinan memiliki berbagai kajian variable berdasarkan survei sosial ekonomi nasional. Selain jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan, analisis terkait kemiskinan suatu wilayah harus memperhatikan tingkat kedalaman maupun tingkat keparahan dari kemiskinan tersebut. Kebijakan pemerintah daerah harus mampu merepresentasikan penurunan kemiskinan dengan meminimalisir kedalaman dan keparahan kemiskinan agar permasalahan kemiskinan tidak terus mengakar.

Pada periode Maret tahun 2014 hingga Maret tahun 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,077 pada keadaan Maret 2014 menjadi 0,904 pada keadaan Maret 2015. Demikian juga Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,188 menjadi 0,279 pada periode yang sama.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Pada bulan Maret 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya sebesar 0,622 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,383. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,155 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,327. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di daerah perdesaan baik dari segi



kualitas kemiskinan maupun kesenjangan antar penduduk miskin lebih memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Tabel 3.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2013 - Maret 2015

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</i>			
Maret 2013	0,421	1,495	0,828
Maret 2014	0,703	1,683	1,077
Maret 2015	0,622	1,383	0,904
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</i>			
Maret 2013	0,104	0,325	0,188
Maret 2014	0,188	0,427	0,279
Maret 2015	0,155	0,327	0,219

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015



Tabel 3.9
Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Indikator Kinerja Daerah						Ket.
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.028.487	3.131.964	3.199.696	3.275.844	3.351.432	3.427.100	
2.	Pertumbuhan Ekonomi (Th.Dasar 2010)	%	-	6,3	5,26	2,21	1,4	-2,42	2015 s/d Triwulan III
3.	Laju Inflasi	%	7,28	6,35	5,60	9,65	7,66	4,89	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Indikator Kinerja Daerah						Ket.
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	Pendapatan per Kapita (Th. Dasar 2000)	Juta Rp	37,28	44,62	48,30	47,52			Tdk dihitung lagi
5	Persentase penduduk miskin (Kondisi Maret)	%	7,66	6,77	6,68	6,06	6,42	6,23	
6.	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	749.360	871.251	986.563	1.096.709	1.136.173		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Indikator Kinerja Daerah						Ket.
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	363.367	403.719	450.920	508.706	508.801		
6.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	385.993	467.532	535.643	588.003	627.372		
7.	PDRB per kapita (Th.Dasar 2010)	Juta Rp	105,35	129,78	138,74	143,92	145,86		Tahun Dasar 2010



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Indikator Kinerja Daerah						Ket.
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Juta Rp & Ribu US\$	7.881.289,78 & 988.710,14	16.196.330,39 & 1.348.060,81	7.709.270,00 & 2.529.900,00	18.441.377,30 & 1.324.197,42	12.983.049,70 & 2.145.665,10	9.611.313,10 & 2.381.442,30	



III. Prospek dan Resiko Perekonomian Kalimantan Timur 2016-2017

Pergerakan laju perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2015 akan banyak dipengaruhi oleh konstelasi perekonomian global. Sementara itu tren penurunan harga komoditas global yang diperkirakan masih berlangsung sepanjang 2015 akan berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Namun diperkirakan akan sedikit membaik di tahun 2016.

Disisi sektoral, turunnya level permintaan Tiongkok masih menjadi isu terdepan dalam bisnis batubara, khususnya untuk regional Asia, Sebagai importer dan konsumen batubara terbesar didunia, permintaan Tiongkok memainkan peranan penting dalam pembentukan harga batubara. Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok menjadi penyebab utama masih akan tertahannya produksi batubara Kalimantan Timur. Pemerintah Tiongkok bahkan memberlakukan kebijakan pemotongan angka produksi sebesar 150 juta ton dan impor sejumlah 50 juta ton dalam menyikapi rendahnya harga di level domestik. Selain kebijakan tersebut efektif per 15 Oktober 2014 Pemerintah Tiongkok juga mulai memberlakukan pajak impor bagi batubara untuk memproduksi penambangan lokal.

Sama dengan Tiongkok, sentiment negatif juga masih terjadi pada pasar batubara Kalimantan Timur dengan tujuan Korea Selatan. Dalam menyikapi penerapan pajak impor yang baru yaitu US\$ 16,2/ton untuk kalori kurang dari 5.000 kc dan US\$18,2. Untuk yang lebih dari kalori tersebut, Importir Korea mulai mengalihkan review atas pajak tersebut, khususnya untuk batubara dengan kalori yang banyak dikomsumsi yakni 3.800 kc NAR. Importir mengusulkan agar khusus untuk kalori tersebut pajaknya ditambah menjadi US\$ 14,2/ton namun tampaknya review ini tidak ditanggapi oleh pemerintah. Perkembangan ekspor batubara Kalimantan Timur masih dapat terbantu dengan peningkatan batubara di india meskipun relatif masih terbatas.

Dari sisi migas berdasarkan hasil liaison diindikasikan bahwa sampai dengan awal 2015 penurunan lifting diperkirakan masih akan terus terjadi. Penurunan ini merupakan dampak belum adanya kepastian perpanjangan salah satu blok migas. Sentimen positif yang menjadi pendukung pendukung sedikit tertahannya kontraksi di



sektor pertambangan migas terutama karena mulai berproduksinya beberapa proyek dengan total produksi sekitar 615 mmscfd.

Dari sisi fiskal penurunan harga minyak dan batubara di pasar Internasional juga berfotensi menurunkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya DBH Sumber Daya Alam. Penurunan kapasitas fiskal tersebut menjadi faktor yang menghambat pemerintah dalam mempercepat infrastruktur di Kalimantan Timur.

Penurunan yang diperkirakan terjadi di sektor pertambangan dapat ditahan oleh perbaikan sektor pertanian sairing dengan adanya program penguatan ketahanan pangan, pembangunan proyek infrastruktur strategis, dan berkembangnya industri pengolahan nonmigas. Perekonomian Kalimantan Timur juga akan didorong oleh sektor pengadaan listrik yang diperkirakan terus meningkat dalam dua tahun ke depan seiring dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam rencana usaha dan bisnis PT PLN yang akan mendirikan berbagai pembangkit listrik, dari sisi fiskal meskipun dana transfer pusat mengalami penurunan, namun pendapatan asli daerah justru semakin meningkat proporsinya.

Dari sisi harga pergerakan inflasi Kalimantan Timur 2015 diperkirakan masih mendapatkan tekanan baik dari sisi kebijakan pemerintahan maupun dari factor non-fundamental seperti gangguan cuaca yang menyebabkan gangguan pada stok pangan dan distribusika mengingat Kalimantan Timur masih bergantung dari daerah lain. Resiko inflasi yang disebabkan oleh pangan masih cukup tinggi mengingat prognosa produksi pertanian di Kalimantan Timur masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di Kalimantan Timur. Ketergantungan dari daerah lain masih menjadi andalan di tangan resiko cuaca ekstrim dan naik turunnya gelombang laut untuk mendukung kelancaran distribusi. Optimalisasi utilitas pelabuhan menjadi factor kunci dalam menjaga kelancaran distribusi yang merupakan factor penting dalam pengendalian inflasi. Selain bahan makanan, komsumsi durable goods mesyarakat diperkirakan akan mengalami kenaikan di akhir tahun sesuai dengan pola historis dimana komsumsi barang tahan lama cenderung meningkat di akhir tahun. Program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong terwujudnya



swasembada pangan, serta meningkatnya *awareness* pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya inflasi akan menjaga stabilitas inflasi di Kalimantan Timur.

3.2. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan yang ada. Salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan melihat derajat otonomi fiskal yang dihitung melalui ukuran kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan entitas akuntansi dalam pemerintahan daerah sehingga memiliki tanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansi. Realisasi dari penggunaan anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Biro Keuangan Sekda Prov Kaltim dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah periode tahun-tahun sebelumnya, maka disusunlah laporan keuangan oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh Biro Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Biro



Keuangan sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Biro Keuangan.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2013 dapat dikatakan telah berhasil meskipun harus terus ditingkatkan karena hasil opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa “Wajar Tanpa Pengecualian”. Namun pada tahun 2014, opini BPK tersebut menurun kategorinya menjadi “Wajar Dengan Pengecualian” yang mengindikasikan terjadinya penurunan performa pelaporan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penurunan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan daerah perlu menjadi perhatian penting mengingat fokus utama reformasi birokrasi salah satunya adalah tertib administrasi yang mengindikasikan meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.12, dimana analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

Meskipun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah mencapai 13,7 persen, namun realisasi pendapatan daerah tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh penurunan hampir di seluruh unsur-unsur pendapatan daerah kecuali DAU dan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat yang peningkatannya tidak signifikan. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak daerah dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terutama dari sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki sumbangan perekonomian terbesar di Kalimantan Timur.

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23.3%. Secara umum selama kurun waktu lima tahun terakhir, semua unsur PAD yang menunjukkan peningkatannya yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Namun pada tahun terakhir semua unsur pembentuk PAD tersebut mengalami penurunan 439,37



milyar rupiah. Peningkatan unsur PAD selama lima tahun terakhir ini menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan. Hal ini terjadi khususnya pada pajak daerah yang merupakan unsur dominan yang mampu memberikan kontribusi yang kuat terhadap PAD sekaligus menjadi indikasi tumbuhnya perekonomian daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 berada pada kisaran 38,5 persen s.d. 51,6 persen. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat berada pada tingkat sedang.

Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,1 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh unsur dana bagi hasil pajak/dan bukan pajak dan DAK yang juga cenderung meningkat meskipun pada tahun terakhir terjadi penurunan. Sedangkan unsur lainnya yaitu DAU terjadi penurunan rata-rata sebesar -38,8 persen.

Kenaikan dana bagi hasil pajak/dan bukan pajak menggambarkan meningkatnya pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pendapatan dari eksplorasi/eksploitasi SDA yang dibagikan kepada daerah. Sedangkan menurunnya DAU disebabkan oleh adanya pelaksanaan formula DAU secara murni oleh Pemerintah Pusat. Sehingga Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan DAU yang semakin kecil karena secara menyeluruh Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kapasitas fiskal yang cenderung lebih besar dari kebutuhan fiskalnya. Dengan demikian Provinsi Kalimantan Timur dianggap mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan pendanaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA).

Secara totalisasi realisasi anggaran dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata pertumbuhannya sebesar 566,2 persen. Demikian juga kontribusinya terhadap pendapatan daerah terus meningkat dari 0,3 persen tahun 2010 menjadi 3,3 persen pada tahun 2014. Meskipun begitu, secara spesifik unsur hibah dari Pemerintah dan unsur hibah dari kelompok masyarakat cenderung menurun.



Tabel 3.10
Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan Daerah	9.819.130	11.904.245	11.631.697	11.192.326	8.999.519
1.	Pendapatan Asli Daerah	4.503.239	5.409.949	5.885.262	5.771.202	4.484.753
1.1	Pajak Daerah	3.679.367	4.486.404	4.929.791	4.887.846	3.753.718
1.2	Retribusi Daerah	13.699	22.496	33.677	11.951	14.722
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	215.653	207.749	291.684	267.705	230.816
1.4	Lain-lain PAD yang sah	594.520	692.755	630.110	613.699	485.496
2	Dana Perimbangan	5.298.980	6.089.861	5.335.760	5.053.998	4.024.025
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	5.206.241	5.984.332	5.272.172	4.953.302	3.805.373
2.2	DAU	51.447	52.638	55.540	57.312	-
2.3	DAK	38.188	34.616	8.048	1.384	218.651
2.4	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
2.5	Dana Insentif Daerah	3.104	18.275	-	-	-
3	Lain-Lain PAD yang sah	16.911	404.935	410.675	367.126	490.741



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	329	-	-	-	-
3.2	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	886	12.891	14.044	15.495	8.967
3.3	Dana Penyesuaian	-	389.643	394.631	351.631	479.336
3.4	Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
3.5	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
3.6	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	15.696	2.401	2.000	-	2.437-



3.2.2 Belanja Daerah

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Proporsi realisasi penggunaan belanja daerah (data tahun 2014 merupakan target belanja) dapat dilihat pada Tabel 3.11. sebagai berikut:

Tabel 3.11
Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.679.991	6.126.151	7.103.434	6.598.286	5.734.343
5.1.1	Belanja Pegawai	697.747	765.957	779.583	1.027.980	942.463
5.1.4	Belanja Hibah	683.778	856.807	1.567.764	946.892	966.801
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	130.813	7.074	3.940	5.500	4.410
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.863.897	2.132.835	2.692.808	2.576.756	2.440.676
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	1.303.593	2.354.897	2.059.339	2.031.159	1.376.558



NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
	Desa dan Partai Politik					
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	165	8.581	-	10.000	3.434
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.462.844	5.213.614	6.676.811	5.619.397	3.964.706
5.2.1	Belanja Pegawai	279.926	493.003	568.036	490.278	281.455
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.406.715	2.221.478	2.457.693	2.418.455	1.688.776
5.2.3	Belanja Modal	1.776.203	2.499.133	3.651.082	2.710.664	1.994.474
	Jumlah Belanja	8.142.835	11.339.765	13.780.245	12.217.683	9.699.049
	Proporsi Belanja Tidak Langsung (%)	57,47	54,02	51,55	54,01	5.734.343
	Proporsi Belanja Langsung (%)	42,53	45,98	48,45	45,99	3.964.706

Sumber: Data Diolah

Secara umum, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2014 terjadi penurunan belanja. Sebagian besar realisasi belanja digunakan untuk belanja tidak langsung mencapai 54,01 persen pada tahun 2014 yang artinya semakin besarnya porsi penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat daerah.



Secara umum, rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung sama dengan realisasi belanja langsung yang mencapai 22,10 persen selama lima tahun terakhir. Namun yang perlu digarisbawahi adalah belanja bantuan social yang mengalami penurunan besaran belanja dari tahun ke tahun (bahkan rata-rata pertumbuhannya mencapai -18,3%).

Analisis terhadap realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dikaji dari informasi pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (dalam juta rupiah)

No	TAHUN	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	1.270.750	8.142.835	15.61%
2	2012	1.514.854	11.339.765	13.36%
3	2013	1.696.672	12.900.000	13.15%
4	2014	1.587.234	12.217.683	12.99%

Sumber: Data Diolah

Dari Tabel 3.12 diatas dapat dilihat persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 20,31 persen hingga 12,79 persen pada tahun terakhir. Selain disebabkan total pengeluaran pemerintah yang meningkat tajam, penurunan ini disebabkan pula karena upaya pemerintah untuk lebih memprioritaskan belanja publik untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar kebutuhan masyarakat.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti: gaji dan



tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Informasi realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini. Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2010-2014 (data tahun 2014 merupakan target belanja) dapat dijelaskan antara lain:

- Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2010-2014 adalah sebesar 30,1 persen. Kenaikan ini dikarenakan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat.
- Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung adalah sebesar 30,6 persen. Dalam pengecekannya, perhitungan kenaikan ini disebabkan karena semua unsur belanja tidak langsung cenderung meningkat. Terlebih lagi unsur belanja bagi hasil yang dominan juga meningkat baik dari sisi jumlah dana maupun persentase.
- Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung adalah sebesar 14,4 persen yang disebabkan karena semua unsur belanja langsung cenderung meningkat.



Tabel 3.13
Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Belanja Tidak Langsung	2.472.776	2.782.161	3.063.571	3,807,431
1	Gaji dan Tunjangan	321.603	345.849	465.048	467,878
2	Tambahan Penghasilan PNS	274.906	290.737	323.347	354,834
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.370	12.740	13.621	15,268
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Prov.upaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.863.897	2.132.835	2.261.555	2,779,451
B.	Belanja Langsung	37.833	50.749	48.227	48,227
5	Belanja honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis	-		-	-
6	Belanja Beasiswa tugas belajar PNS	26.492	35.818	28.695	37,765



No	Uraian	2011	2012	2013	2014
7	Belanja Jasa Kantor	11.341	14.931	19.532	23,914
	- Belanja Air	4.412	5.283	4.645	4,914
	- Belanja Listrik	3.540	4.445	5.302	6,281
	- Belanja Surat Prov.ar / Majalah	2.591	3.145	3.485	4,336
	- Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	798	2.059	6.100	14,105
	- Belanja Sewa Gedung	-	-	-	
8	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	-	
C.	Pembiayaan pengeluaran				
9	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
10	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	
	Total	2.521.950	2.847.842	3.131.330	

Sumber: Data Diolah



3.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran.

Tabel 3.14
Defisit Riil Anggaran (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pendapatan	9.819.129	11.904.745	11.631.697	11.192.326	8.999.519
	<u>Dikurangi</u> <u>Realisasi:</u>					
2.	Belanja Daerah	8.142.835	11.339.765	13.780.245	12.217.683	1.036.628
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	491.006	202.800	-	25.000	
	DEFISIT RIIL (REALISASI)	1.185.289	361.680	(2.148.548)	(1.050.357)	(699.539.004)

Sumber: Data Diolah



Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi penutup defisit anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 3.15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur
(dalam juta rupiah)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2.837.724	3.198.904	1.050.356	800.000	1.036.628
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	-	-	-	-	



No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	yang sah					
4.	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya	2.837.724	3.198.904	1.050.356	800.000	
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	

Sumber: Data Diolah

SILPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SILPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya menunjukkan bahwa tahun 2010-2014 terjadi penurunan dengan rata-rata sebesar -1,6 persen. Hal ini dapat menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan efektifitas penggunaan anggaran terutama pada dua tahun terakhir yang sisa lebih penghitungan anggarannya menurun cukup drastis.



3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir selama pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2017 sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2011-2015), maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode pembangunan tahun 2017.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (*tax effort*). Daya pajak merupakan perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal, dalam hal ini secara umum menggunakan nilai PDRB.

3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.



Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan. Sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan Tahun 2016-2017 Provinsi Kalimantan Timur

Uraian	TARGET	
	Penetapan Tahun 2016 (Rp.000.000)	Rencana Tahun 2017 (Rp.000.000)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN	10.296.924	6.602.986
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.089.508	4.039.003



Uraian	TARGET	
	Penetapan Tahun 2016 (Rp.000.000)	Rencana Tahun 2017 (Rp.000.000)
(1)	(2)	(3)
I. Pajak Daerah	4.012.255	3.090.089
II. Retribusi Daerah	12.996	16.308
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	289.251	196.606
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	775.005	735.998
B. DANA PERIMBANGAN	5.186.846	2.552.080
I. Bagi Hasil Pajak	886.000	660.000
II. Bagi Hasil Bukan Pajak	3.212.361	1.811.678
III. Dana Perimbangan Lainnya		
a. Dana Alokasi Umum	80.402	80.402
b. Dana Alokasi Khusus	1.011.082	
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.570.	11.902



Uraian	TARGET	
	Penetapan Tahun 2016 (Rp.000.000)	Rencana Tahun 2017 (Rp.000.000)
(1)	(2)	(3)
I. Pendapata Hibah	15.570	11.902
II. Dana Penyesuaian Otonomi khusus	5.000	

3.3.1.2. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Tabel 3.17
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat (Dalam Juta)

No	Uraian	Penetapan Tahun 2016 (Rp.000.000)	Rencana Tahun 2017 (Rp.000.000)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja Tidak Langsung	5.783.922.	3.680.160
	Belanja Pegawai	1.052.777	1.550.000
	Hibah dan Bansos Wajib	1.171.123	37.250
	Bantuan Keuangan Spesifik	1.461.640	548.156
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.098.380	1.666.000
2.	Belanja Langsung	1.234.300	1.745.990



No	Uraian	Penetapan Tahun 2016 (Rp.000.000)	Rencana Tahun 2017 (Rp.000.000)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belanja MYC	735.000	1.149.390
	- Tol	332.000	450.000
	- BSB	272.000.	250.000
	- Jembatan Mahakam 4	41.000	90.890
	- Jalan Pendekat Mahakam 4	90.000	200.000
	- Spam Maloy	-	89.300
	- Pipa Distribusi Maloy	-	69.200
	BLUD	499.300.	596.600
3.	Pembiayaan Pengeluaran	-	
	Pembentukan Dana Cadangan		
	Pembayaran Pokok Utang		
	Total	7.018.222	5.426.150

Sumber: Data Diolah



Dilihat dari tabel 3.19. bahwa proyeksi belanja wajib dan mengikat di tahun dasar 2016 sebesar Rp.7.018.222.000.000,- sedangkan tahun 2017 menjadi 5.426.150.000.000,-

3.3.1.3. Kerangka Pendanaan Keuangan Daerah

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2017 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan tahun 2017 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, regional maupun lokal serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian yang cukup berefek pada skala internasional.

Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja (USK) terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya, di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti: belum sepenuhnya kesadaran



sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Dari jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 6.602.885.000.000 diperkirakan dibelanjakan sebesar Rp. 5.547.398.000.000 untuk Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2016-2017 seperti tabel berikut

Tabel 3.18
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2016-2017

No	Uraian	Target	
		Penetapan Tahun 2016 (Rp.000.000)	Rencana Tahun 2017 (Rp.000.000)
(1)	(2)	(3)	(4)



1.	Pendapatan	10.296.924	6.602.986
2.	Pencairan Dana Cadangan		
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	800.000	-
	Total Penerimaan	11.096.824	6.602,986
	<u>Dikurangi</u>		
4.	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	7.018.222	5.547.398
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4.078.702	1.055.588

Sumber: data diolah

3.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam

ekstensifikasi meliputi:

1. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
 - a. Menjamin kepastian hukum.
 - b. Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
2. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*)
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak.
 - b. Meningkatkan pelayanan.
 - c. Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2017, terdapat beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan antara lain:

1. Bidang Pajak Daerah.
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan;



- a) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kalimantan Timur khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - b) Menambah kantor samsat pembantu/unit pelayanan pada daerah-daerah yang sulit terjangkau dari kantor induk terutama di daerah pesisir dan daerah perbatasan.
 - c) Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor tahun pembuatan 2005 ke bawah.
 - d) Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.
 - e) Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
 - f) Membangun *counter-counter* pelayanan pada mall/pusat perbelanjaan di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang termasuk menyediakan layanan payment point dengan menggunakan jasa perbankan (BanKalimantan Timur) sampai ke tingkat pedesaan.
 - g) Menyediakan *Speed Boat Delivery Order* yang ditempatkan di Pelabuhan KPLP, Mangkupalas, Harapan baru, dan Sungai Lais, dan menjangkau wajib pajak di daerah terpencil, serta sulit dilalui roda 4, juga disediakan sepeda motor *Delivery Order*.
 - h) Dispenda sudah berkerja sama dengan Universitas Mulawarman untuk menempatkan mobil Samsat Kampus.
 - i) Meningkatkan mutu layanan berstandar ISO di seluruh kantor bersama Samsat.
 - j) Meningkatkan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi penerimaan.
 - k) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - l) Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan:



- a) Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan.
 - b) Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah kepada para Dealer dan Agen Tunggal pemegang merk termasuk Badan Leasing.
 - c) Melakukan Kegiatan Penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna Alat Berat/Besar yang beroperasi di Kalimantan Timur.
 - d) Membuat kebijakan pemberian insentif pengurangan BBNKB bagi Wajib Pajak yang bernomor polisi luar daerah Kalimantan Timur untuk memutasikan ke Nomor Polisi Kalimantan Timur dalam bentuk Peraturan Gubernur.
 - e) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis Dump Truck yang tidak menggunakan jalan umum.
 - f) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kalimantan Timur khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - g) Meningkatkan kerja sama dengan Dinas / Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi.
 - h) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - i) Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan:
- a) Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda No.01 Tahun 2011.
 - b) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
 - c) Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kalimantan Timur wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.



- d) Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.
 - e) Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
 - f) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan kebijakan:
- a) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b) Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
 - c) Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.
- Khusus untuk pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 kewenangan pemungutan dilakukan oleh Kabupaten/Kota.
2. Bidang Retribusi Daerah, dengan kebijakan:
- a. Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
 - b. Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyeteroran.
 - c. Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
 - d. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
 - e. Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.
 - f. Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.



3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Belanja bagi hasil pada kabupaten/kota merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program-program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
6. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
7. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 119 prioritas pembangunan Tahun 2017.



8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun rencana dan proyeksi struktur belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Rencana Struktur Belanja Daerah Tahun 2016-2017

Uraian		Jumlah	
		Penetapan Tahun 2016 (Rp.000.000)	Rencana Tahun 2017 (Rp.000.000)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendapatan	10.296.924	6.602.986
2.	Belanja	11.096.924	6.202.986
2.1.	Belanja tidak langsung	5.809.876	3.801.043
2.2.	Belanja Langsung	5.287.048	2.801.578
	Surplus / Defisit	800.000	0

Sumber: Data diolah

Belanja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Kalimantan Timur tahun 2017, akan meliputi:

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 persen anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 (sepertiga) untuk upaya kuratif dan 2/3 (dua per tiga) untuk upaya preventif;



3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja dan Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin;
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dengan Peningkatan kualitas tenaga kerja;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang, peningkatan investasi sektor UMKM, memperbaiki tata niaga dan pemasaran produk UMKM dan pengarusutamaan gender serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga;
6. Percepatan transformasi ekonomi dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, meningkatkan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, peningkatan ekspor produk olahan dan pengembangan zonasi kawasan agroindustri hilirisasi sumber daya mineral, gas, dan batubara;
7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan dengan peningkatan bauran energi baru dan terbarukan dan peningkatan rasio elektrifikasi;
8. Pengembangan Agribisnis dengan meningkatkan ekspor produk olahan unggulan, konektivitas infrastruktur dasar menuju setra agribisnis, penyediaan SDM pendukung yang berkualitas dan penerapan inovasi teknologi agribisnis;
9. Peningkatan produksi pangan dengan peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan, peningkatan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas pertanian dan penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian;
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dengan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan dan peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan;
11. Reformasi birokrasi dan layanan public dengan standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas focus dan peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur; dan



12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup Penurunan emisi gas rumah kaca, Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi, perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan, Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas udara dan lingkungan hidup perkotaan, serta penegakan hukum lingkungan.

3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerapan anggaran defisit dalam RKPD tahun 2017 sejalan dengan konsep penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk mengakomodir lebih banyak kebutuhan publik dan untuk stimulasi ekonomi melalui tambahan belanja infrastruktur dalam APBD. Adapun defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp. 600 milyar, seperti pada tabel 3.22 selanjutnya akan dipenuhi melalui sumber Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 600 Milyar, selanjutnya Rp.100 milyar dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah. Penentuan besaran pembiayaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecenderungan adanya sisa lebih penyerapan anggaran tahun anggaran 2016.



Tabel 3.20
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2016-2017
Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Jumlah	
		Penetapan Tahun 2016 (Rp.000.000)	Rencana RPJMD Tahun 2017 (Rp.000.000)
(1)	(2)	(3)	(4)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	800.000	
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa)	-	-
2.	Pencairan dana cadangan	-	-
3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-
1.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	100.000	
3.	Pembayaran pokok utang	-	-
4.	Pemberian pinjaman daerah	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	800.000	

Sumber: Data diolah



Ke depannya, untuk lebih mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam **menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada**, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan belanja daerah tersebut dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih di kaji untuk dikembangkan di Kalimantan Timur adalah pelaksanaan program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP) serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta diantaranya melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) atau selanjutnya disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu terus mendapat dukungan dari semua pihak terkait. Melihat karakteristik ekonomi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki SDA melimpah, serta dengan keberadaan jumlah perusahaan Internasional maupun nasional yang cukup banyak, maka potensi dana CSR merupakan salah satu poin yang perlu diperhatikan kemanfaatannya.



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah administrasi di Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas Pulau Kalimantan yakni potensi sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini akan menjadi modal dasar untuk mengembangkan setiap gerak langkah pembangunan daerah dengan tujuan menyejahterakan masyarakat secara merata. Hal inilah yang menjadi kunci dari prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sehingga layak untuk dirumuskan perencanaan pembangunan secara seksama.

Kondisi riil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada era sekarang memiliki berbagai tantangan dan kendala serta faktor penghambat yang memberikan efek negative dalam pencapaian tujuan pembangunan. Kurang optimalnya implementasi dan realisasi perencanaan pembangunan daerah menyebabkan masih terdapat kesenjangan antara target capaian kinerja pemerintah dengan realita kondisi pembangunan saat ini. Oleh karena itu, pada perencanaan pembangunan selanjutnya perlu menekankan dan fokus pada beberapa permasalahan mendasar pembangunan daerah melalui berbagai kajian dan analisis sektoral sehingga hasil yang didapatkan cukup relevan untuk merumuskan perencanaan pembangunan ke depan.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Jangka Menengah Tahun 2013-2018 hampir memasuki klimaks periodik dimana pelaksanaan pembangunan telah berada pada tahun 2016 dan perumusan perencanaan pembangunan tahun 2017 telah disusun. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen



perencanaan pembangunan baik nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sendiri.

Penting adanya penjabaran secara umum namun relevan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional era Presiden Ir. Joko Widodo untuk menyusun berbagai kebijakan dalam RKPD 2017. Hal ini akan mencerminkan sebuah integrasi baru antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen perencanaan jangka menengah nasional melalui hierarki revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2017 ini akan merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan revisi perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi untuk mengakomodir perubahan kebijakan level nasional utamanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam bab ini akan membahas prioritas pembangunan yang merupakan kebijakan berupa program dan kegiatan unggulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan skala prioritas paling tinggi (*output & outcome*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan tahun realisasi perencanaan. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang bersifat internal maupun eksternal. Kemudian akan dapat diketahui faktor penyebab atau pemicu permasalahan secara internal maupun eksternal maka langkah selanjutnya menyusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program-program prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran dan identifikasi permasalahan.

4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Pembangunan suatu negara identik dengan persoalan pemerataan capaian pembangunan secara optimal dan berkualitas. Permasalahan inilah yang menjadi salah satu dasar bagi setiap pengambil kebijakan di pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan, penyempurnaan kebijakan, hingga revisi kebijakan agar dalam pembangunan nasional selalu mengalami peningkatan capaian kinerja. Perubahan kebijakan ini semakin nyata terlihat ketika pergantian presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia dimana setiap visi dan misi yang diembannya memiliki beberapa perbedaan dengan pendahulunya.



Perbedaan pandangan kebijakan ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan selama masih mengacu pada pokok pembangunan jangka panjang nasional utamanya sesuai peraturan perundang-undangan nasional yang masih berlaku. Meskipun begitu, dampak perubahan kebijakan ini memiliki berbagai sisi negatif maupun positif ketika dihierarki vertikal ke bawah yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karenanya, perlu adanya kajian dan analisa kembali terhadap kebijakan nasional sehingga mempermudah pemerintah daerah dalam merevisi dan merumuskan kembali berbagai dokumen perencanaan pembangunan.

Pada periode saat ini, Pemerintahan Republik Indonesia berada pada periode 2015-2019 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintahan nasional yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

TRISAKTI:

1. Kedaulatan dalam politik
2. Berdikari dalam ekonomi
3. Kepribadian dalam kebudayaan

Dimana Trisakti merupakan modal dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, menjalankan, dan mengimplementasikan cita-cita kebangsaan Negara Republik Indonesia secara professional, konsekuen, dan berkesinambungan. Dalam realisasi pelaksanaan pembangunan nasional, **TRISAKTI** dijabarkan menjadi berbagai prioritas utama pada realisasi pembangunan nasional yang diuraikan secara umum sebagai berikut:

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4 prioritas utama)
2. Memperkuat sistem pertahanan Negara (4 prioritas utama)
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8 prioritas utama)
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen Negara (7 prioritas utama)
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7 prioritas utama)



6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6 prioritas utama)
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah (11 prioritas utama)
8. Memberdayakan Desa (8 prioritas utama)
9. Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat (6 prioritas utama)
10. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan (7 prioritas utama)
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42 prioritas utama)
12. Berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (5 prioritas utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI

1. Mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia (1 prioritas utama)
2. Membangun kedaulatan Pangan berbasis pada Agribisnis Kerakyatan (4 prioritas utama)
3. Dedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional (9 prioritas utama)
4. Penguasaan sumber daya alam (7 prioritas utama)
5. Membangun pemberdayaan Buruh (10 prioritas utama)
6. Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional (4 prioritas utama)
7. Penguatan investasi sumber domestic (10 prioritas utama)
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara (8 prioritas utama)
9. Penguatan infrastuktur (40 prioritas utama)
10. Pembangunan ekonomi maritim (9 prioritas utama)
11. Melakukan penguatan sektor kehutanan (14 prioritas utama)
12. Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkeberlanjutan (7 prioritas utama)
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan (13 prioritas utama)
14. Membangun karakter dan potensi pariwisata (4 prioritas utama)
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional (8 prioritas utama)
16. Pengembangan industri manufaktur (7 prioritas utama)



BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN

1. Mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa (10 prioritas utama)
2. Memperteguh ke-bhineka-an Indonesia dan memperkuat restorasi sosial (5 prioritas utama)
3. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga (10 prioritas utama)

Ketiga Trisakti ini secara terintegrasi akan memberikan suatu motivasi utuh kepada setiap pelaksana sektoral pemerintahan pusat maupun daerah untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional juga dirumuskan Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas sebagai landasan berkehidupan. Hal ini juga diwujudkan dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai harapan serta tercapai target yang diinginkan. Berikut Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas pembangunan pada masa pemerintahan nasional periode 2015-2019:

VISI:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

MISI:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;



6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA** yang rinciannya sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sebagai sebuah agenda prioritas nasional, NAWA CITA akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari beberapa inovasi-inovasi kebijakan yang terangkum dalam agenda prioritas yang secara tidak langsung memberikan “perintah” bagi daerah untuk menaatinya. Inovasi yang cukup fenomenal bagi masyarakat Republik Indonesia adalah jargon “Revolusi Mental” yang diusung oleh Presiden Ir. Joko Widodo pada setiap perumusan kebijakannya akan memberikan warna tersendiri bagi perencanaan pembangunan daerah.

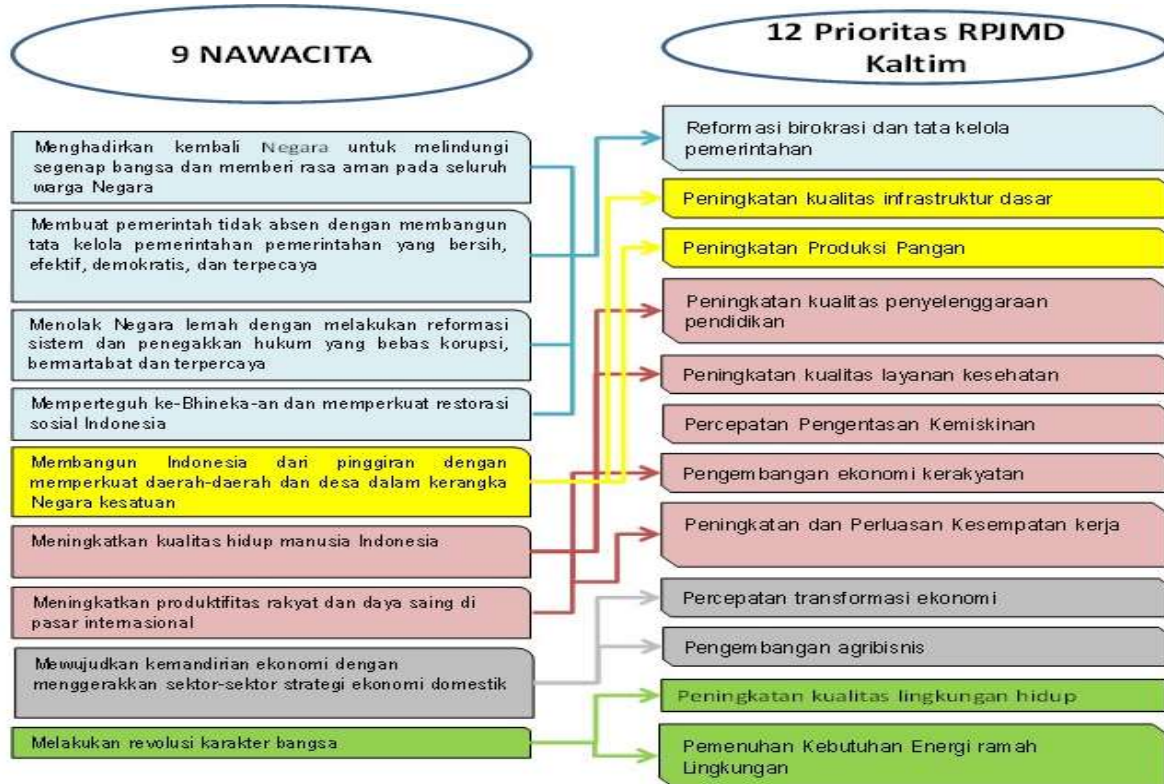


Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan pembangunan nasional harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan tahun 2017 akan mengakomodir setiap revisi dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang telah direvisi dan disesuaikan dengan kebijakan nasional. Hal ini dilakukan karena pada masa penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, masih menggunakan kebijakan pembangunan nasional presiden terdahulu, sehingga untuk *meng-up date* setiap arahan pemerintah pusat perlu dilakukan revisi.

Dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah harus mengimplementasikan kebijakan nasional, sehingga secara eksplisit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melaksanakan berbagai penyempurnaan dan revisi kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional di bawah kepemimpinan Ir. Joko Widodo. Oleh karena itu, pada rumusan arah kebijakan (program dan prioritas) perencanaan pembangunan tahun 2017 telah dilakukan penajaman arah kebijakan untuk disesuaikan dan diintegrasikan dengan kebijakan nasional dengan tetap membawa karakteristik daerah sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan. Berikut penajaman arah kebijakan pembangunan tahun 2017 yang merupakan turunan dari penajaman arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.



Gambar 4.1
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Penajaman arah kebijakan (prioritas dan sasaran) untuk tahun 2017 ini akan memberikan suatu sinkronisasi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus akan memberi percepatan pencapaian target jika dilaksanakan secara utuh dan optimal. Penajaman arah kebijakan ini juga harus diturunkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memegang penyesuaian kebijakan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya review kembali terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah apakah masih layak untuk dilaksanakan, apakah perlu penambahan program dan kegiatan, ataukah perlu juga penghapusan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

4.2 Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019

Keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pencapaian pembangunan-pembangunan di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah yang maju, mandiri, dan



berdaya saing menjadi modal dasar dan kekuatan utama bangsa dalam membangun kemajuan dan kemandirian. Terkait hal tersebut, pengembangan wilayah menjadi cukup penting dan fundamental dalam mengoptimalkan setiap potensi daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang berkualitas dan merata.

Pengembangan setiap wilayah di Negara Republik Indonesia ini tergambar jelas pada misi pembangunan jangka menengah nasional dan dipertegas melalui agenda prioritas NAWA CITA yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah. Isu utama dalam pembangunan kewilayahan adalah kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait pengembangan wilayah akan difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah kawasan timur Indonesia, dimana salah satunya adalah wilayah Kalimantan.

Sebagai bagian dari wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi sumber daya yang strategis dan berkualitas untuk penunjang pengembangan wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, penjabaran tema pengembangan wilayah Kalimantan menjadi penting untuk dikaji agar mengetahui seberapa besar porsi pembangunan Kalimantan Timur dalam kancah pembangunan nasional. Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan ini akan menjadi salah satu isu strategis untuk penyempurnaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar terintegrasi dan saling mendukung antara pembangunan nasional dengan Provinsi Kalimantan Timur.

A. Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar “Pembangunan Wilayah Kalimantan” adalah:

- 1) Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung,



- dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan;
- 2) Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
 - 3) Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; serta
 - 4) Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

B. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya;
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata



- pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,85 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,06 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,75;
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimantan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan;
 4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri;
 5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya;
 7. Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4)



Terlaksananya penggunaan *block grant* (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur); serta

8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019). Dengan



demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Pulau Kalimantan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai realisasi bentuk pencapaian visi dan misi pembangunan, maka disusunlah target prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur oleh Pemerintah Pusat pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

No	Sasaran Nasional	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5	5,6	5,6	6,4	7,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,1	4,7	4,3	3,9	3,5
3	Tingkat Pengangguran (%)	8,4	8,0	7,6	7,2	6,9

Jika menyandingkan target RPJM Nasional untuk regional Kalimantan pada tahun 2016 dengan target RKPD yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, maka terlihat perbedaan yang terjelaskan melalui fenomena maupun data dan informasi. Perbedaan tersebut sebagian besar karena karakteristik wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada Pulau Kalimantan dimana sumber daya alam yang melimpah namun mengingat sumber daya alam tersebut tidak dapat terbaharui maka semakin lama pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Hal tersebut disebabkan karena dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam kontribusi pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur sehingga menurunnya produksi pertambangan dan penggalian akan berakibat signifikan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.



Poin penting dalam target sasaran pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur adalah target pertumbuhan ekonomi dengan migas yang mengalami perubahan dikarenakan isu strategis terkait lingkungan hidup yang menurunkan permintaan ekspor batubara seperti dari Negara Tiongkok meskipun terjadi perluasan ekspor ke Negara India. Selain itu, menurunnya eksplorasi dan produksi sektor pertambangan dan batubara baik batubara, minyak bumi, maupun gas alam menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sektoral yang signifikan dan otomatis mempengaruhi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh. Berikut sasaran target nasional dan target Provinsi Kalimantan Timur yang telah direvisi pada tahun 2016 ini.

Tabel 4.2
Sasaran Target Nasional dan Target Provinsi Kalimantan Timur

No.	Sasaran	Target Tahun 2017	
		Nasional	Provinsi Kalimantan Timur
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,6	2,50
2	Tingkat Kemiskinan	4,3	5,15
3	Tingkat Pengangguran	7,6	6,00

4.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018. Prioritas dan sasaran diturunkan melalui rumusan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi baik dari eksternal (nasional dan wilayah sekitarnya) serta internal (dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang lain). Oleh karena itu, keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi penting. Hal ini mengingat kerangka kerja yang disusun dalam RPJMD merupakan hierarki pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Gubernur Kalimantan Timur.



Perwujudan prioritas pembangunan harus dipilih sedemikian rupa agar dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMD dapat seoptimal mungkin mencapai target-target kinerja pembangunan khususnya indikator kinerja pembangunan sesuai yang telah disepakati. Secara harfiah perlu dipahami bahwa prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung terkait dalam pencapaian target RPJMD melalui rencana program dan kegiatan. Sedangkan, rencana program dan kegiatan merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas.

Terkait hal tersebut, dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017. Oleh karena itu, perlu disusun kriteria khusus yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2017.
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*.
3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan nasional dan provinsi.
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual akan dihadapi pada tahun 2017.
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.



Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan **penjabaran tahun ke empat** dari **RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**. Terkait hal tersebut, dengan memedomani dokumen RPJMD maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2017.

Tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- **Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim**

Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai peranan kunci dalam menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, dengan salah satunya memberikan beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dengan hal ini, kita diharapkan mampu meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Peningkatan SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan hal ini maka pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. Dengan demikian, program pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan semaksimal dan seoptimal mungkin agar



peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan dan menikmati hasil pembangunan daerah dapat terwujud.

Guna mewujudkan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Timur, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatnya Kualitas SDM dengan IPM pada tingkat 75,70;**
 - 2. Meningkatnya pemerataan pendidikan di segala usia dengan angka melek huruf menjadi 98,80 persen;**
 - 3. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dengan rata-rata lama sekolah menjadi 9,75 tahun;**
 - 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan angka harapan hidup menjadi 74,25 tahun; dan**
 - 5. Meningkatnya kehidupan social ekonomi masyarakat secara merata dan berkualitas dengan pendapatan perkapita menjadi Rp. 52,65 juta.**
- **Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan menjadi komponen penting dalam pencapaian pembangunan daerah. Keberhasilan dalam berbagai bidang pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat terlihat dengan sejahtera dan tidaknya masyarakat. Salah satu indikasi kesejahteraan adalah kesehatan, mutu kesehatan masyarakat yang baik atau tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga mempengaruhi capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Dengan hal ini, Provinsi Kalimantan Timur harus meningkatkan akses kesehatan agar masyarakat di daerah pedalaman dapat menjangkau pelayanan kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan dengan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Selain aspek kesehatan, penyerapan pasar tenaga kerja merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan peningkatan



kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan terutama dalam aspek sosial masyarakat. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

Dengan peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri, jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, pemerintah harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran:

- 1. Menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 5,15 persen;**
- 2. Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 6,00 persen;**
- 3. Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat paritas daya beli Rp.11.250,- per hari dengan tingkat inflasi sebesar $5,90 \pm 1$; dan**
- 4. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan Indeks Gini pada skala 0,32.**

- **Tujuan 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau**

Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas-luasnya. Hal ini dilakukan dengan melalui pemberdayaan pertanian dalam arti luas di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi Hijau dimaknai dengan pembangunan pada sector ekonomi yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Pembangunan perekonomian yang dimaksud adalah pembangunan yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan serta hemat sumber daya alam. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan



ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pembangunan tetap dapat dilaksanakan akan tetapi kelestarian alam dan ekosistem alam dapat terjaga.

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar:**
 - a. 2,5 persen (Laju pertumbuhan ekonomi migas),**
 - b. 5,5 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas), dan**
 - c. 7,8-8,4 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara);**
- 2. Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas) sebesar 9,00 persen;**
- 3. Tercapainya swasembada pangan (rasio pemenuhan beras) sebesar 86,00 persen;**
- 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 2,12 persen;**

- **Tujuan 4: Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas**

Infrastruktur dasar merupakan fasilitas dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan hal ini infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik dan layak. Melihat pentingnya infrastruktur dasar maka hal ini sangat mempengaruhi kehidupan, salah satunya dapat terkait dengan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar sering dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Pembangunan infrastruktur seperti kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas



masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu dalam perencanaan ke depan, tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran, **“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 6,80”**.

• **Tujuan 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan hukum maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam mewujudkan good governance diperlukan peran masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan masyarakat berpartisipasi aktif maka segala hal/tindakan yang berindikasi negative dapat dicegah atau diatasi.

Selanjutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. **Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 6,70 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK;**
2. **Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 83 (sangat baik);**
3. **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 78,00 (B+) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “sangat tinggi”;**
4. **Terwujudnya stabilitas keamanan dan kedamaian wilayah dengan angka kriminalitas sebesar 27,5; dan**
5. **Meningkatnya kehidupan demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur dengan Indeks demokrasi provinsi Kalimantan Timur sebesar 80 (baik).**



- **Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup merupakan suatu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan melestarikan lingkungan hidup maka pembangunan daerah diharapkan akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukung lingkungannya. Sehingga berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral menjadi pendukung penuh dalam usaha sector kehutanan, sector perkebunan, sektor pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah. Namun demikian pendayagunaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 81,14; dan tingkat emisi gas rumah kaca dari 1500 ton CO₂/US \$juta PDRB (tahun 2013) menjadi 1.300 ton CO₂/US \$ juta PDRB (tahun 2017).**

Tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil atau target yang diharapkan dari suatu tujuan dengan formulasi terukur, spesifik, mudah dicapai, serta rasional sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, pada perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini juga memiliki sasaran yang harus dicapai pada tahun berkenaan. Berikut tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017.



Tabel 4.3
Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Visi: Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Satuan)	Kondisi awal (2013)	2017
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi				
1. Meningkatkan kualitas SDM Kaltim	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	IPM	73,21	75,70
	2. Meningkatnya pemerataan pendidikan di segala usia	Angka Melek Huruf (%)	97,95	98,80
	3. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,87	9,75
	4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (tahun)	73,52	74,25
	5. Meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara merata dan berkualitas	Pendapatan per kapita (juta rupiah)	64,12	63,50
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber				



Visi: Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Satuan)	Kondisi awal (2013)	2017
Daya Alam dan Energi Terbarukan				
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	6. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	6,06	5,15
	7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	7,94	6,00
	8. Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi (%)	9,65	5,90±1
		Paritas daya beli/PPP (Rp)	10.981	11.250
9. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	0,3341	0,32	
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	2,21	2,50
		Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	5,39	5,50
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	6,03	7,8-8,4
	11. Meningkatnya nilai tambah dan	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)	5,65	9,00



Visi: Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Satuan)	Kondisi awal awal (2013)	2017
	produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)			
	12. Tercapainya swasembada pangan	Rasio pemenuhan beras (%)	72,00	86,00
	13. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan (%)	0,02	2,12
Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata				
4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	6,80
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik				
5. Mewujudkan	15. Terwujudnya	Indeks Persepsi	5,20	6,70



Visi: Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Satuan)	Kondisi awal (2013)	2017
tata kelola pemerintahan yang baik	pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Korupsi		
		Opini BPK	WTP	WTP
	16. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68 (baik)	83 (sangat baik)
	17. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	70,75 (B+)	78,00 (B+)
Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tinggi	Sangat Tinggi	
Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim				
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	18. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara berkesinambungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,07	81,14
		Intensitas Emisi (ton CO ₂ /PDRB US \$ juta)	1.500	1.200



4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Optimisme pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan efek positif pada pelaksanaan hierarki pembangunan daerah tingkat II (kabupaten/kota). Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja setiap aspek pembangunan akan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pencapaian sasaran pembangunan provinsi pada dasarnya adalah agregasi dari keberhasilan pembangunan dari pemerintah provinsi (termasuk SKPD) dan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2013-2018, serta memperhitungkan distribusi PDRB, penduduk miskin, dan jumlah pengangguran, maka target pembangunan Kabupaten/Kota tahun 2017 untuk beberapa indikator utama pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Target Peningkatan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Kabupaten/Kota	IPM	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran	Tingkat Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Samarinda	79,15	6,29	6,29	3,05
2. Balikpapan	81,31	6,06	6,92	2,17
3. Bontang	78,29	5,90	9,48	5,16
4. Berau	75,77	7,95	4,98	4,41
5. Paser	76,60	9,13	7,75	7,01
6. PPU	74,87		6,67	7,88
7. Kutai Barat	76,78	6,95	7,04	5,65
8. Kutai Timur	74,66	10,55	5,26	8,20
9. Kutai Kartanegara	77,20	20,85	5,81	3,35

Prioritas pembangunan Kaltim pada tahun 2017 di fokuskan kepada daerah kabupaten/kota yang memiliki indikator Makro 3 (tiga) terbawah, fokus kewilayahan



terhadap kabupaten/kota yang masih memiliki indikator yang masih rendah diharapkan kabupaten/kota tersebut nantinya tidak semakin tertinggal di banding kabupaten/kota lainnya se-Kalimantan Timur. Pemerataan pembangunan dan peran serta provinsi akan semakin nyata di rasakan oleh Kabupaten/kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari RPJMD 2013-2018 yang memiliki skala prioritas pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat (RPJM Nasional yang dijabarkan kembali dalam RKP). Proses ini akan meningkatkan keselarasan dan integrasi dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pada intinya, dokumen RKPD merupakan tahapan/langkah pelaksanaan dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah. Dengan memedomani pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018, maka RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 mempunyai tema yang tersaji pada gambar berikut.

Gambar 4.2
Fokus atau Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018



Dari gambar di atas tampak jelas bahwa agenda pembangunan pada (RKPD) tahun 2017 adalah **“Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”** sebagai bagian dari tahapan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018. Selanjutnya, agar dokumen RKPD tahun



2017 sinkron dan selaras dengan RPJMD 2013-2018 serta RKPD tahun-tahun sebelumnya, maka dalam penyusunan RKPD tahun 2017 perlu memperhatikan:

- Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2013-2018 yang belum tercapai;
- Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2017;
- Identifikasi target-target pembangunan RKPD tahun 2016 yang belum tercapai;
- Identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional (RKP Tahun 2017); dan
- Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Prioritas pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan dalam penyusunan program pembangunan disesuaikan dengan isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2017 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017	
1	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1	Peningkatan kesempatan belajar anak
		2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	2	Peningkatan mutu di bidang kesehatan
		3	Percepatan pengentasan kemiskinan	3	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
4	Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin				
2	Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	4	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPDP Tahun 2017	
		5	Pengembangan ekonomi kerakyatan	6	Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang
				7	Peningkatan investasi sektor UMKM
				8	Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga
3	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik	6	Percepatan transformasi ekonomi	9	Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global
				10	Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)
				11	Peningkatan ekspor produk olahan
				12	Pengembangan ekowisata
		7	Pengembangan agribisnis	13	Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah
				14	Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis
				15	Penerapan Inovasi Teknologi agribisnis
16	Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah				
4	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-	8	Peningkatan produksi pangan	17	Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017	
5	daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan			18	Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian
				19	Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi
				20	Peningkatan infrastruktur pertanian
				21	Peningkatan produktivitas pertanian
				22	Perbaikan tata niaga produk pangan
		10	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	23	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
		24	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan		
		25	Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan		
		11	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	26	Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus;



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017	
6	Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia				
7	Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya				
8	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya			27	Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
				28	Percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
9	Melakukan revolusi karakter bangsa	9	Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan	29	Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan
				30	Peningkatan rasio elektrifikasi
		12	Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan	31	Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi
				32	Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan
				33	Penegakan hukum lingkungan



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017	
				34	Penurunan emisi gas rumah kaca
				35	Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kinerja pembangunan lintas bidang/sektor maupun lintas wilayah secara kompleks dan menyeluruh memiliki tujuan dalam perwujudan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Sebagai wilayah yang memiliki cukup banyak daerah sulit/tertinggal, aksesibilitas intra dan antar wilayah merupakan “harga mati” bagi pengembangan perekonomian daerah secara adil dan merata. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana penunjang konektivitas wilayah perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam meningkatkan distribusi orang, barang, maupun jasa.

Selain itu, pembangunan daerah yang optimal, efektif, dan efisien dapat dilakukan dengan mempercepat pencapaian keunggulan sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Terlebih lagi Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki wilayah luas dengan keanekaragaman tipologi wilayah. Hal inilah yang menjadikan tantangan sekaligus permasalahan pokok pembangunan yang harus diantisipasi dan diselesaikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi di atas serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, maka akan diupayakan pelaksanaan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek-aspek *rethinking*, restrukturisasi, revitalisasi, dan *renewal* secara kontinyu dan berkesinambungan. Dari keempat aspek tersebut, aspek *rethinking* merupakan aspek



dominan dalam pencapaian reformasi birokrasi karena terkait dengan paradigma aparatur pemerintahan selama ini.

Aspek *rethinking* sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan perumusan perencanaan pembangunan mengingat pemerintahlah yang memiliki kewenangan dalam menyusunnya. Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan tahunan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi segala kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya perhatian pemerintah akan dokumen perencanaan kerja tahunan lebih ditingkatkan melalui reformasi birokrasi.

Dalam tahapan RPJMD tahun 2013-2018, RKPD tahun 2017 merupakan fase pertengahan yang memiliki keterkaitan antara awal dan akhir dari pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, segala kebijakan yang akan dirumuskan pada tahun 2017 ini akan sangat mempengaruhi capaian pembangunan pada akhir periode RPJMD karena jangka waktunya yang sudah mendekati 2018. Dengan adanya penekanan tersebut diharapkan program prioritas pada tahun 2017 akan memberikan fondasi dan dukungan yang positif pada pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan optimal.

Sesuai dengan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, maka tema untuk RKPD 2017 telah ditetapkan, yakni: **“Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”** yang selanjutnya tema tersebut dijabarkan dalam Program Prioritas Pembangunan pada tabel berikut.



Tabel 4.7
Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD		
				2015	2017			
1	Meningkatnya IPM							
2	Meningkatnya angka melek huruf							
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Strategi 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)	65.30	65	DINAS PENDIDIKAN
			2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	rasio angka minat baca di perpustakaan (buku/tahun)	1/3	6-Jan	BADAN PERPUSTAKAAN
			3	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Proporsi anak yang kembali bersekolah	0.05	37	BPPKB



Sasaran		Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
						2015	2017	
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Strategi 2: Peningkatan kualitas layanan kesehatan	4	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	67	93%	Dinas Kesehatan
			5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV/AIDS	0.09	<1	DINAS KESEHATAN
					Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	56,7	98.7	Dinas Kesehatan,RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
				Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	0,2	1.2	DINAS KESEHATAN	



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
			tingkat kematian akibat malaria	0	4.5	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
			Prevalensi Tuberklosis (TB) per 100.000 penduduk	56	217	DINAS KESEHATAN
			Persentase keberhasilan pengobatan TB	56,7	91	DINAS KESEHATAN
			Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS	19.80	48	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
		6 Program standarisasi pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	21.00	18	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
			Angka Kematian Balita per 1000 KH	31.00	27	DINAS KESEHATAN
			Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	177.00	118	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
		7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	100	80	DINAS KESEHATAN



Sasaran		Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
					2015	2017	
5	Meningkatnya pendapatan per kapita	Strategi 5: Pengembangan ekonomi kerakyatan	8	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP = KHL	UMP = KHL	DISNAKERTRANS
			9	Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan	Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	72.65	80



Sasaran		Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
					2015	2017	
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Strategi 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan	10 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat miskin pedesaan yang berdaya dan melakukan usaha ekonomi melalui agrobisnis TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan program PNPM pedesaan (jiwa)	1.543		BPM-PD



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
		11 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	47,50	3.888	DINAS SOSIAL
		12 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif	9,00	16,60	BPP-KB
		13 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Penduduk miskin yang terserap di dunia kerja	9.907	600	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
		14 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu	7,00	28	DINAS KEHUTANAN
		15 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Persentase petani miskin yang difasilitasi untuk usaha pertanian	0	40	Dinas Pertanian
		16 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan	Jumlah KK yang dilatih budidaya peternakan	75	225	Dinas Peternakan



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD	
				2015	2017		
		17 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana	Persentase daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam	4	68,30 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
		18 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat	2,75	42,50	DINAS PU (CIPTA KARYA)	
7	Menurunnya tingkat pengangguran	Strategi 4: Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja	19 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	23,83	33%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			20 Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha	21,00	25	DINAS SOSIAL



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD		
				2015	2017			
			sendiri					
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Strategi 5: Pengembangan ekonomi kerakyatan	21	Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	87,86	85%	Bappeda
			22	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	rasio pasar per 10.000 penduduk	1,09	0,99	DISPERINDAGKOP
			23	Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah kelompok komoditi yang dapat dijaga kestabilan harganya	3,39	5	Biro Ekonomi



Sasaran		Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
						2015	2017	
9	Menurunnya Indeks Gini							
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Strategi 6: Percepatan transformasi ekonomi	24	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi (triliun)	30,91	40	BPPMD
			25	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Persetujuan Investasi (Triliun)	21,34	51,59	BPPMD
			26	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)	1,1	2	BPPMD
			27	Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir	Volume Usaha kawasan industri (Triliun)	93	160	DISPERINDAGKOP
			28	Program Perluasan Kebun Sawit	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	1,19	1,8	DISBUN



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
		29 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor	20	10 IKM	DISPERINDAGKOP
		30 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)	4	92	DISNAK
		31 Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah	Jumlah produk turunan perkebunan (produk)	5	4	DISBUN
		32 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis	2	11	DISPERINDAGKOP



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD	
				2015	2017		
		33 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara	4	12 Juta US\$	DISPERINDAGKOP	
		34 Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah kunjungan wisatawan derawan dan sekitarnya (orang)	45.865	90	DISBUDPAR	
		35 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah wisatawan (juta orang)	2.180.659	1226	DISBUDPAR	
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Strategi 7: Pengembangan agribisnis	36 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas)	160.139	150.156 Ha	DISBUN



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD	
				2015	2017		
		37 Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah Kawasan Peternakan	6.00	20	DISNAK	
		38 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (juta USD)	15.11	20	DINAS PERIKANAN	
		39 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas	Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB (Triliun)	33.33	35 Triliun	DISPERINDAGKOP, DISTAN, DISBUN	
12	Tercapainya swasembada beras	Strategi 8: Peningkatan Produksi Pangan	40 Program Peningkatan Produksi pertanian	jumlah produksi padi (GKG) (ton)	463,070	617.2	DISTAN



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
		41 Program Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha)	4.75	4,9 Ton/Ha	DISTAN
		42 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas	803.00	1.039	BKPP
		43 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas	Jumlah PPL Perikanan Berkualitas	33.00	111	BKPP
		44 Program Penguatan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah BPP	88.00	125	BKPP
		45 Program Pengembangan	Jumlah kawasan transmigrasi	0.00	4	DISNAKER TRANS



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
		Wilayah Transmigrasi				
		46 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)	4.920	5.987 Ha	DINAS PU
		47 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Daerah	80.66	95.59%	BKPP
		48 Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan	jumlah produksi daging (ton)	70.146		DISNAK
		49 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	194.192	257.772 ton	Dinas kelautan dan perikanan



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD		
				2015	2017			
		50	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	98.659	157.743 ton	Dinas kelautan dan perikanan	
		51	Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian	42.00	75	DISTAN	
		52	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	98.54	105	DISTAN	
13	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Strategi 9: Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah Lingkungan	53	Program Diversifikasi Energi	% Bauran Energi Baru Terbarukan	1.01	2%	DISTANBEN & PLN dan Swasta
			54	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Instalasi Biogas (unit)	105.00	530	DISNAK



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD	
				2015	2017		
		55 Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	78.75	78	DISTANBEN	
		56 Program pengembangan listrik pedesaan	Persentase desa berlistrik (%)	95.5	97	DISTANBEN	
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Strategi 10: Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	57 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)	6,78	34,6	DINAS PU
			58 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan (%)	57,19	86,01	DINAS PU
			59 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)	40,96	98,58	DINAS PU



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
		60 Program pembangunan jalan tol	Ketersediaan jalan tol (%)	0	40	DINAS PU
		61 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Kuantitas Komoditas dan Penumpang	699.580.433	332.2000.000 ton dan 15.500.000 Org	Dinas Perhubungan
		62 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi	13	7 Kecamatan	DINAS PU
		63 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana	10.00	7 Kecamatan	Dinas Perhubungan



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
			transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan			
		64 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara	2.00	2 Kec	Dinas Perhubungan
		65 Program sarana dan prasarana telekomunikasi	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi	100.00	75%	Diskominfo
		66 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Kapasitas air baku (l/detik)	0	1040 lt/dt	DINAS PU



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
		67 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.	Cakupan Layanan Air Minum (%)	42	47%	DINAS PU
		68 Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air	Persentase penyediaan air baku kawasan industri	0	30%	DINAS PU
		69 Program pengendalian banjir	Luas genangan banjir (Ha)	0	410 Ha	DINAS PU
		70 Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis	0	32 DAS	DINAS PU



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD	
				2015	2017		
15	Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN	Strategi 11: Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	71 Program penguatan kelembagaan PTSP	Menurunnya tingkat korupsi	5.50	6,7	Biro Organisasi
			72 Program pengembangan zona integritas	jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	2	4	Inspektorat
			73 Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Menurunnya kasus KKN	0	3	Inspektorat
			74 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini laporan keuangan pemerintah provinsi	WTP	WTP	Biro Keuangan



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD	
				2015	2017		
16	Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik	75	Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Prosentase Kab/Kota yg memperoleh opini WTP	20	80%	Biro Keuangan
		76	Program peningkatan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	76.65	82	Biro Organisasi
		77	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas SD aparatur	92.24	97%	BKD
		78	Program integrasi aplikasi	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	0	15	Kominfo



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
		79 Pengembangan data statistik dan spasial	Tingkat ketersediaan data & informasi perencanaan pembangunan	75.89	90%	Bappeda
17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	80 Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	BB (75.14)	A (78)	Biro Organisasi
		81 Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	Sangat Tinggi	Biro Pemerintahan



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD		
				2015	2017			
			% Kab/Kota yang memperoleh status sangat tinggi (ST) untuk kinerja penyelenggaraan	55	70	Inspektorat		
			82	Program Pendidikan politik masyarakat	Indeks demokrasi	68.13	73	Kesbangpol
18	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	Strategi 12: Peningkatan kualitas lingkungan hidup	83	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah KPH	8	14 unit	DISHUT
			84	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	181.125	161.250 Ha	DISHUT
			85	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skor penyelenggaraan tata ruang	69.14	76.83	DINAS PU



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
		86 Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas penanaman mangrove	36	320 Ha	DISHUT
		87 Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	Jumlah HCV dikawasan hutan	0	5 kawasan HCV	DISHUT
		88 Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang	% Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	44.30	38%	DISTAMBEN
		89 Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah Emisi yang diturunkan	250	312,50 CO2E	DISBUN
		90 Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	193.00	250 perusahaan	BLH



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
		91 Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	75.24	81,14	BLH
		92 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat adipura	4	8 kab/kota	BLH
		93 Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata	266	336 sekolah	BLH
		94 Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH	PPLHD dan PPNS (orang)	76 24	PPNS = 28, PPLHD = 82	BLH
		95 Program Pengembangan	Perda/Pergub	2.00	0	BLH



Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	
		kapasitas pengelolaan lingkungan hidup				
19 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		96 Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/kota yang mengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)	3	4	Bappeda
		97 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim	Intensitas emisi	1.300	1.317 ton/1 jt US\$	BLH, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, DISTAMBEN,
		98 Inventarisasi emisi gas rumah kaca	Ketersediaan dan pelaporan data level emisi yang terukur serta dapat di verifikasi	2	2 Kali PEP /tahun	BLH



Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian	Target	SKPD
				2015	2017	





BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam tiap pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk pada pelaksanaannya yang dilakukan pada tiap tahun mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga dengan hal ini diharapkan pembangunan mampu dilaksanakan dengan optimal dan maksimal. Pada hakikatnya pada tiap focus pembangunan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni pencapaian visi Gubernur terpilih selaku kepala daerah. Pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2017 ini, tema yang diusung adalah **“Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”**. Meskipun fokus pembangunan periode ini adalah peningkatan kegiatan industri hilir dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi yang lebih berkualitas. Namun berbagai aspek prioritas lain tetap merupakan unsur penentu pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam menindaklanjuti langkah-langkah tersebut maka perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi Gubernur, dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), hingga penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan adanya program dan kegiatan maka jika capaian kinerja suatu program yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, maka pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi program serta kajian ulang perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD 2017 harus merujuk



pada program dan prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Sehingga alur kedua dokumen perencanaan tersebut mampu selaras dan tidak saling tumpang tindih. Sesuai dengan peruntukannya, perencanaan pada dokumen RKPD 2017 dirancang sesuai dengan perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam SKPD provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan melihat beberapa hal penting diatas maka yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah pendanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Perioritas Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti luas, serta penunjang lainnya, yang dibagi menjadi urusan Wajib dan urusan Pilihan.

1. 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum
- 4) Perumahan
- 5) Penataan ruang
- 6) Perencanaan Pembangunan
- 7) Perhubungan
- 8) Lingkungan Hidup
- 9) Pertanahan
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 13) Sosial
- 14) Ketenagakerjaan
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil menengah
- 16) Penanaman Modal Daerah



- 17) Kebudayaan
- 18) Pemuda dan Olahraga
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri
- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
- 21) Kepegawaian
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan desa
- 23) Statistik
- 24) Kearsipan
- 25) Komunikasi dan informatika
- 26) Perpustakaan

2. 8 (delapan) Urusan Pilihan ;

- 1) Pertanian
- 2) Kehutanan
- 3) Energi dan Sumber daya Mineral
- 4) Parawisata
- 5) Kelautan dan Perikanan
- 6) Perdagangan
- 7) Perindustrian
- 8) Ketransmigrasian

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2017

Adapun program dan kegiatan prioritas pembangunan RKPD tahun 2017 sebagai berikut :

I. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. DINAS PENDIDIKAN
 - 1) Program pendidikan non formal
 - 2) Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
 - 3) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - 4) Program pendidikan menengah
 - 5) Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
 - 6) Program peningkatan mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan



2. BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH
 - 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
3. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
 - 1) Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak

II. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

1. DINAS KESEHATAN
 - 1) Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
 - 2) Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
 - 3) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - 4) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
 - 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - 6) Program standarisasi pelayanan kesehatan
 - 7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

III. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

1. DINAS PENDIDIKAN
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan
2. DINAS KESEHATAN
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan
3. DINAS SOSIAL
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur indeks kedalaman kemiskinan
 - 2) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
4. BIRO EKONOMI
 - 1) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
5. BPM dan PEMERINTAHAN DESA
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat



6. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan KB
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan
7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan
8. DINAS KEHUTANAN
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan
9. DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan
10. DINAS PETERNAKAN
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan
11. DINAS PEKERJAAN UMUM
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
12. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana

IV. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAHGANGAN KOPRASI DAN UMKM
 - 1) Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah
 - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. DISNAKERTRANS
 - 1) Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)
 - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif
 - 3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - 4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja



3. DINAS SOSIAL
 - 1) Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah
4. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
 - 1) Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

V Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 2) Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan
2. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB
 - 1) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
3. BAPPEDA
 - 1) Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan daerah
4. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPRASI DAN UMKM
 - 1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5. BIRO EKONOMI
 - 1) Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

VI Percepatan Transformasi Ekonomi

1. BADAN PERIJINAN PENANAMAN MODAL DAERAH
 - 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 3) Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan
2. DINAS PERINDUSTRIAN KOPRASI DAN UMKM
 - 1) Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
 - 2) Program Penataan Struktur Industri Hulu Hilir



- 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 4) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- 5) Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor
3. DINAS PERKEBUNAN
 - 1) Program Perluasan Kebun Sawit
 - 2) Program Pengembangan Produk-produk Perkebunan Unggulan daerah
4. DINAS PETERNAKAN
 - 1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
5. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
 - 1) Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan
 - 2) Program Pengembangan Distinasi Pariwisata

VII. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

1. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 - 1) Program diversifikasi energi
 - 2) Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - 3) Program pengembangan listrik pedesaan
2. PLN / Swasta
 - 1) Program diversifikasi energi
3. DINAS PETERNAKAN
 - 1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Ketenagalistrikan

VIII. Pengembangan Agrobisnis

1. DINAS PERKEBUNAN
 - 1) Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non sawit
2. DINAS PETERNAKAN
 - 1) Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - 1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4. DINAS PERINDUSTRIAN KOPRASI DAN UMKM



- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Industri olahan non migas

IX. Penguatan Cadangan Pangan

1. DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
 - 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - 2) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - 3) Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian
 - 4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
 - 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan
 - 2) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas
 - 3) Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan
 - 4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan)
3. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
4. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - 1) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air payau dan Air tawar
 - 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
5. DINAS PETERNAKAN
 - 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6. DINAS PEKERJAAN UMUM
 - 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

X. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

1. DINAS PEKERJAAN UMUM
 - 1) Program Pembangunan jalan dan Jembatan
 - 2) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan
 - 3) Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan
 - 4) Program pembangunan jalan tol



- 5) Program pembukaan keterisolising wilayah sektor jalan dan jembatan
 - 6) Program penyediaan dan pengolahan air baku
 - 7) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum & air limbah
 - 8) Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air
 - 9) Program Pengendalian Banjir
 - 10) Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
2. DINAS PERHUBUNGAN
 - 1) Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP
 - 2) Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan
 - 4) Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara
 3. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 - 1) Program sarana dan prasarana telekomunikasi

XI. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

1. INSPEKTORAT
 - 1) Program Pengembangan Zona Integritas
 - 2) Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN
 - 3) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah
2. BIRO ORGANISASI
 - 1) Program Penguatan Kelembagaan PTSP
 - 2) Program peningkatan pelayanan publik
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Manajemen berbasis kinerja
4. BIRO KEUANGAN
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah
5. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 - 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
6. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



- 1) Program Integrasi Aplikasi
7. KESBANGPOL
 - 1) Program Pendidikan politik masyarakat
8. BIRO PEMERINTAHAN
 - 1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

XII. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

1. DINAS KEHUTANAN
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan KPH
 - 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 3) Rehabilitasi Hutan Mangrove
 - 4) Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi
2. DINAS PEKERJAAN UMUM
 - 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. DINAS PERTAMBANGAN A DAN ENERGI
 - 1) Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang
4. DINAS PERKEBUNAN
 - 1) Program Pembinaan Perkebunan ramah lingkungan
5. BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - 2) Program pengendalian pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup
 - 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - 4) Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - 5) Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan lingkungan hidup
 - 6) Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
 - 7) Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim
 - 8) Investasi emisi gasrumah kaca



6. BAPPEDA

- 1) Program Pengaruh pengaruh perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program kegiatan, sasaran program, Instansi Penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rancangan Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017. Pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.801.408.043.996,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.745.990.000.000,-



TABEL. 5.1
DAFTAR PAGU INDIKATIF RENJA SKPD 2017

KODE	UNIT ORGANISASI	PAGU INDIKATIF 2017
1	2	3
1.01.01	Dinas Pendidikan	93,000,000,000
1.02.01	Dinas Kesehatan	19,166,000,000
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda	6,000,000,000
1.02.03	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	19,531,000,000
1.02.05	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	6,721,000,000
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	415,000,000,000
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18,040,000,000
1.06.02	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal	3,705,000,000
1.07.01	Dinas Perhubungan	35,000,000,000
1.08.02	Badan Lingkungan Hidup	9,000,000,000
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	3,375,000,000
1.13.01	Dinas Sosial	19,567,000,000
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14,465,000,000
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	23,000,000,000
1.16.01	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)	5,636,000,000
1.18.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	37,945,000,000
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,000,000,000
1.19.02	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3,091,000,000
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,329,000,000
1.20.03.1	Biro Umum	37,759,000,000
1.20.03.2	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	4,337,000,000
1.20.03.3	Biro Hukum	1,664,000,000
1.20.03.4	Biro Organisasi	1,894,000,000
1.20.03.5	Biro Pemerintahan Umum	1,610,000,000
1.20.03.6	Biro Sosial	2,425,000,000
1.20.03.7	Biro Perekonomian	2,000,000,000
1.20.03.8	Biro Keuangan	8,040,000,000
1.20.03.10	UPT Sub. Bagian Perbend. Wil.Selatan	458,000,000
1.20.03.11	UPT. Sub Bagian Perbend. Wil. Utara	458,000,000
1.20.03.12	Biro Pembangunan Daerah	3,050,000,000
1.20.03.13	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama	2,509,000,000
1.20.03.14	Biro Perlengkapan	9,487,000,000
1.20.03.15	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	4,432,000,000
1.20.04	Sekretariat DPRD	20,000,000,000
1.20.06	Badan Penelitian dan Pengembangan	5,000,000,000



1.20.07	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	4,089,000,000
1.20.08	Kantor Penghubung	3,676,000,000
1.20.10	Badan Pendidikan dan Pelatihan	7,710,000,000
1.20.11	Badan Kepegawaian Daerah	13,985,000,000
1.20.12	Dinas Pendapatan Daerah	20,338,000,000
1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	9,500,000,000
1.22.04	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5,894,000,000
1.24.01	Badan Arsip Daerah	3,081,000,000
1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	9,724,000,000
1.25.02	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	1,150,000,000
1.26.01	Badan Perpustakaan	3,561,000,000
2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	35,000,000,000
2.01.02	Dinas Perkebunan	14,000,000,000
2.01.03	Dinas Peternakan	20,000,000,000
2.02.01	Dinas Kehutanan	12,000,000,000
2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi	24,650,000,000
2.04.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9,536,000,000
2.05.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan	13,000,000,000



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 memiliki posisi strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen perencanaan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, RKPD Tahun 2017 mengemban amanat pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tema, **“Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”**. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan perekonomian utamanya dalam mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor-sektor dominan.

Hal ini sejalan dengan rumusan Visi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2030 nanti dimana pada periode 2015-2020 merupakan fase **“Peningkatan Nilai Tambah”** dengan strategi yang digunakan dan dikembangkan yakni:

1. Peningkatan **produktivitas** sektor pertanian dalam arti luas,
2. Pembatasan alih fungsi lahan dan pembatasan ekspor sektor primer (batubara dan migas);
3. Persiapan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); dan
4. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri migas, batubara dan pertanian, serta sektor jasa dan perdagangan.

Pada perumusan RKPD Tahun 2017 ini juga memperhatikan kebijakan nasional presiden dan wakil presiden terpilih yakni Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kebijakan berupa agenda prioritas yang dikenal dengan sebutan NAWA CITA telah diimplementasikan dalam rumusan RKPD Tahun 2017 sebagai bagian dari integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional.

RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang secara otentik dirumuskan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh



pemerintah daerah selama tahun 2017. Seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaraan pemerintah daerah wajib memedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2017 utamanya program dan kegiatan untuk SKPD/Dinas/Instansi terkait agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah.

a. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Berikut beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2017 yang perlu untuk diperhatikan oleh pemangku kepentingan maupun subyek pelaksana pembangunan lainnya.

1. Seluruh SKPD/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017 tanpa terkecuali. Selain itu, konsistensi, integrasi, dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2013-2018.
2. RKPD Tahun 2017 merupakan langkah awal dalam penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2017 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur)
3. Dalam upaya menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah, maka setiap SKPD/Dinas/Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2017 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya)



4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Tahun 2017 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pengendalian dan pengawasan akan mengoptimalkan berbagai capaian kinerja pembangunan karena akan merevisi setiap kekurangan dan mengakselerasi capaian positif pembangunan daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan
6. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017.
7. Pada akhir tahun 2017, setiap kepala SKPD/Dinas/Instansi wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2017.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2018.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen tersebut hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD tahun 2017, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.